

LAPORAN BULANAN

DATA SOSIAL EKONOMI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JANUARI 2019



LAPORAN BULANAN

DATA SOSIAL EKONOMI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JANUARI 2019

The background features a collage of official documents from the BPS (Badan Pusat Statistik) of Nusa Tenggara Timur. The documents include:

- BERITA RESMI STATISTIK** (Official Statistical News) with the BPS logo and the text "BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR".
- A report titled "PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI NOVEMBER 2015" (Development of Farmer Exchange Rates in November 2015), which includes a table of exchange rates.
- Another report titled "PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMSI NOVEMBER 2015 NUSA TENGGARA TIMUR INFLASI" (Development of Consumer Price Index in November 2015, Nusa Tenggara Timur Inflation).

Overlaid on these documents are several white icons in circular frames:

- A building icon representing urban or industrial sectors.
- A farmer with a pitchfork icon representing agriculture.
- A magnifying glass over a bar chart and line graph, symbolizing data analysis.
- A house with a dollar sign icon representing housing or real estate.
- An airplane icon representing transportation.
- A speech bubble containing three wheat stalks, representing agriculture.

Kategori	Nilai Tukar Petani (2012=100)
Geram, Belerang, Kapur (25)	652
Bahan Bakar Mineral (27)	593
Kendaraan dan Begiannya (87)	276

Kategori	Indeks Harga Konsumen
Geram, Belerang, Kapur (25)	652
Bahan Bakar Mineral (27)	593
Kendaraan dan Begiannya (87)	276

**LAPORAN BULANAN
DATA SOSIAL EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JANUARI 2019**

ISSN : 2528-0910
Nomor Publikasi : 53560.1902
Katalog : 9199017.53
Periode Terbit : Bulanan
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xviii + 107 halaman

Naskah :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penyunting :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**LAPORAN BULANAN
DATA SOSIAL EKONOMI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JANUARI 2019**

Pengarah :

Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

Penanggung Jawab :

Ir. Tio Faryda Gultom M.M.

Penyusun :

Aluse Destiah Kana Mangngi, SST

Tata Letak dan Perwajahan :

Aluse Destiah Kana Mangngi, SST

<https://www.bps.go.id>

Kata Pengantar

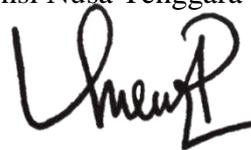
Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d Desember 2018), nilai tukar petani (s.d Desember 2018), ekspor-impor (s.d November 2018), tingkat penghunian kamar hotel berbintang (s.d November 2018), perkembangan angkutan udara sipil (s.d November 2018), kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran (s.d Maret 2018), keadaan ketenagakerjaan (s.d Agustus 2018), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d Triwulan III 2018), luas panen dan produksi padi (2018), perkembangan triwulanan indeks produksi industri manufaktur (s.d Triwulan III 2018), perkembangan triwulanan indeks tendensi konsumen (s.d Triwulan III 2018), produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun (2014), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017, Indeks Kebahagiaan tahun 2017, Hasil Pendaftaran Usaha Sensus Ekonomi 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta hasil Pendataan Potensi Desa di Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran dari pembaca dan pengguna data publikasi ini sangat diharapkan guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Semoga bermanfaat.

Kupang, Januari 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

HEADLINES

1. Inflasi

Desember 2018 Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,70. Dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi yaitu Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan Kota Maumere sebesar 0,14 persen.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

- Pada bulan Desember 2018, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 107,02. Terjadi penurunan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan dengan NTP November 2018.
- Di daerah perdesaan terjadi inflasi pada bulan Oktober 2018 sebesar 0,61%.

3. Ekspor

Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan November 2018 senilai US \$ 1.271.325 dengan volume sebesar 5.515,39 ton mengalami penurunan sebesar 31,91 persen dari ekspor bulan Oktober 2018 yang sebesar US \$ 1.867.050.

4. Impor

Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada November 2018 senilai US \$ 8.150.123 dengan volume sebesar 8.865,17 ton.

5. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan November 2018 sebesar 61,65 persen, naik 3,62 poin dibanding TPK Oktober 2018 yang sebesar 58,03 persen.

6. Angkutan Udara

Jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada bulan Oktober 2018 berjumlah 161.748 orang sedangkan penumpang yang berangkat berjumlah 156.812 orang.

7. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 1.142,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen).

Periode September 2017 – Maret 2018, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 2,35 persen, yaitu dari Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 354.898,- per kapita per bulan pada Maret 2018.

8. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 mencapai 3,01 persen, turun 0,26 poin dari Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Penganggur di NTT pada Agustus 2018 sebesar 74,7 ribu orang, berkurang 3,8 ribu orang dibanding penganggur Agustus 2017 sebesar 78,5 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT Agustus 2018 sebesar 70,17 persen, naik 1,08 poin dibandingkan TPAK NTT Agustus 2017 yang sebesar 69,09 persen. Angkatan kerja NTT pada Agustus 2018 sebesar 2,49 juta orang, bertambah 87,7 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 sebesar 2,40 juta orang.

9. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2018 mencapai 25,86 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,09 triliun. Ekonomi NTT triwulan III-2018 tumbuh sebesar 5,14 persen.

10. Luas Panen dan produksi Padi

Luas panen padi di NTT periode Januari–September 2018 sebesar 173,42 ribu hektar.

Produksi padi di NTT periode Januari–September 2018 sebesar 690,82 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG).

11. Produksi Industri Manufaktur

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) triwulan III tahun 2018 di NTT mengalami kenaikan sebesar 3,36 persen dibanding triwulan II tahun 2018.

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (q-to-q) triwulan III tahun 2018 naik sebesar 1,03 persen dibanding triwulan II tahun 2018.

12. Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) NTT pada Triwulan III 2018 sebesar 113,64.

13. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2017 mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016.

14. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT Tahun 2017 sebesar 75,51 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 6,98 poin dibandingkan dengan IDI 2016 sebesar 82,49.

15. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan NTT tahun 2017 berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) sebesar 68,98 pada skala 0 – 100.

16. Sensus Ekonomi 2016

Jumlah usaha non-pertanian hasil pendaftaran usaha Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) mencapai 436,4 ribu usaha, meningkat sebesar 51,99 persen jika dibandingkan jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE2006) yang tercatat sebanyak 287,1 ribu usaha.

17. Potensi Desa 2018

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 3.353 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 3.048 desa dan 305 kelurahan. Podes juga mencatat sebanyak 309 kecamatan dan 22 kabupaten/kota. BPS melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan mandiri. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa tertinggal 1.094 (35,89 persen), desa berkembang 1.945 (63,81 persen), dan desa mandiri 9 (0,30 persen). Rata-rata IPD untuk Dimensi Transportasi 81,79, Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan 74,14, Dimensi Pelayanan Dasar 49,54, Dimensi Pelayanan Umum 42,77, dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 28,96.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Headlines	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xvii
Fokus Perhatian.....	1
I. INFLASI DESEMBER 2018.....	8
II. NILAI TUKAR PETANI DESEMBER 2018	20
III. EKSPOR NOVEMBER 2018	26
IV. IMPOR NOVEMBER 2018	28
V. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BINTANG NOVEMBER 2018	30
VI. PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA SIPIL PROVINSI NTT SELAMA NOVEMBER 2018.....	31
VII. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2018	33
VIII. KEADAAN KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2018	40
IX. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2018	46
X. LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI.....	58
XI. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III 2018	64
XII. INDEKS TENDENSI KONSUMEN TRIWULAN III 2018	68
XIII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2017.....	72
XIV. INDEKS DEMOGRAFI INDONESIA (IDI) TAHUN 2017	79
XV. INDEKS KEBAHAGIAAN TAHUN 2017	87
XVI. HASIL PENDAFTARAN USAHA SENSUS EKONOMI 2016	92
XVII. HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES)	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Desember 2018, Tahun Kalender 2017 dan <i>Year on Year</i> menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	8
Tabel 1.2	Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Desember 2018	10
Tabel 1.3	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Kupang Desember 2018, Tahun Kalender 2017 dan <i>Year on Year</i> menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	11
Tabel 1.4	Inflasi dan Andil Inflasi Kota Kupang Desember 2018	13
Tabel 1.5	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Maumere Desember 2018, Tahun Kalender 2017 dan <i>Year on Year</i> menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	14
Tabel 1.6	Indeks Harga Konsumen, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Maumere Desember 2018	15
Tabel 1.7	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on year di Maumere, Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Desember 2014- Desember 2018	17
Tabel 1.8	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota di Kawasan Timur Indonesia Desember 2018 (2012=100)	18
Tabel 1.9	Indeks Harga November (IHK) dan Inflasi di 82 Kota Desember 2018 (2012=100)	19
Tabel 2.1	Nilai Tukar Petani NTT Per Subsektor Januari 2018 - Desember 2018 (2012=100)	22
Tabel 2.2	Indeks Harga Diterima Petani, Indeks Harga Dibayar Petani per Subkelompok Pengeluaran serta Perubahannya Desember 2018 (2012=100)	23
Tabel 2.3	Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan Desember 2018 (2012=100)	24
Tabel 2.4	Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan Periode November- Desember 2018 (2012=100)	24
Tabel 2.5	Indeks Harga BPPBM pada November- Desember 2018	54
Tabel 3.1	Ekspor NTT Menurut Beberapa Kelompok Komoditas, Oktober 2018 – November 2018	27
Tabel 3.2	Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan, November 2018	27
Tabel 3.3	Ekspor Provinsi Asal Menurut Komoditas, November 2018	27
Tabel 4.1	Ekspor NTT Menurut Negara Asal, November 2018	28
Tabel 4.2	Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor) NTT, Tahun 2010-2018	29
Tabel 6.1	Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT Oktober- November 2018	32
Tabel 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	33
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	35
Tabel 7.3	Daftar Komoditi yang memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%), Maret 2018	36

Tabel 7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di NTT Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018.....	38
Tabel 8.1	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 2017-Agustus 2018	40
Tabel 8.2	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kategori Lapangan Pekerjaan Utama pada Februari 2017- Agustus 2018	41
Tabel 8.3	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan menganggur Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Februari 2017- Agustus 2018	44
Tabel 8.4	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas menurut TPT dan TPAK Agustus 2018 di Kabupaten/Kota	45
Tabel 8.5	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustus 2018	46
Tabel 9.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)	53
Tabel 9.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen).....	54
Tabel 9.3	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2017, Triwulan II-2018 dan Triwulan III-2018 (persen)	55
Tabel 9.4	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)	56
Tabel 9.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)	56
Tabel 9.6	Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II dan III Tahun 2017-2018 (persen).....	57
Tabel 10.1	Luas Panen Padi menurut Kabupaten/Kota di NTT,2018	62
Tabel 10.2	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di NTT,2018	63
Tabel 11.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, Kontribusi Nilai Produksi Terhadap Total Nilai Produksi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar Sedang Pada Trw II 2018 dan Trw III 2018	65
Tabel 11.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III Tahun 2018	67
Tabel 12.1	Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II 2018 dan Triwulan III 2018 Menurut Variabel Pembentuknya	68
Tabel 12.2	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III 2018 dan Triwulan IV-2018 Menurut Variabel Pembentuknya	67
Tabel 12.3	Indeks Tendensi Konsumen Trw III 2017 sampai dengan Trw III 2018 Tingkat Nasional dan Provinsi	69
Tabel 13.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Menurut Komponen, 2010-2017	73
Tabel 13.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017	78
Tabel 14.1	Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2017	83
Tabel 14.2	Perkembangan Indeks Aspek Variabel dan Skor Indikator 2016-2017	85
Tabel 14.3	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017	86
Tabel 15.1	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusunnya Menurut Karakteristik Provinsi NTT, 2017	90

Tabel 16.1 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	93
Tabel 16.2 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	94
Tabel 16.3 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	96
Tabel 16.4 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	97
Tabel 16.5 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	99
Tabel 17.1 Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2018	101
Tabel 17.2 Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten, 2018	106
Tabel 17.3 Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Kabupaten/Kota 2018	107

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur Desember 2018.....	9
Gambar 1.2	Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur Oktober 2017 – Desember 2018.....	9
Gambar 1.3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Kupang Desember 2018....	12
Gambar 1.4	Perkembangan Inflasi Kota Kupang Desember 2017- Desember 2018	12
Gambar 1.5	Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Maumere Desember 2018.....	15
Gambar 1.6	Perkembangan Inflasi Kota Maumere Desember 2017- Desember 2018..	16
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor NTT, Oktober 2017 – November 2018 (Dalam US \$).....	26
Gambar 4.1	Perkembangan Nilai Impor NTT, November 2017- November 2018...	29
Gambar 5.1	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di NTT November 2017- November 2018 (dalam persen)	30
Gambar 5.2	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang di Provinsi NTT November 2017- November 2018.....	31
Gambar 6.1	Persentase Penumpang Angkutan Udara Menurut Bandara Sipil di NTT, November 2018	31
Gambar 7.1	Perkembangan Kemiskinan Provinsi NTT, 2010-2018.....	34
Gambar 8.1	Pekerja Sektor Formal dan Informal NTT pada Februari 2017-Agustus 2018.....	42
Gambar 8.2	Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja pada Februari 2017-Agustus 2018.....	43
Gambar 9.1	Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Trw III 2018 (y on y) ...	47
Gambar 9.2	Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Trw III 2018 (y on y)	47
Gambar 9.3	Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Trw III 2018 (q to q) ...	47
Gambar 9.4	Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Trw I-III 2018 (c to c) .	48
Gambar 9.5	Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2018 (y-on-y)	49
Gambar 9.6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2018 (y-on-y)	50
Gambar 9.7	Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Trw III-2018 (q-to-q)	50
Gambar 9.8	Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Triwulan III-2018 (c-to-c) .	51
Gambar 9.9	Pertumbuhan Beberapa Komponen Semester I-2018 (c to c)	52
Gambar 10.1	Perkembangan Luas Panen Padi di NTT, Januari-Desember 2018.....	59
Gambar 10.2	Perkembangan Produksi Padi (GKG) di NTT, Januari-Desember 2018	60
Gambar 10.3	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di NTT, Januari-Desember 2018 (Ton-GKG).....	60
Gambar 11.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III Tahun 2018 NTT & Nasional (q to q) dan (y on y)	64
Gambar 11.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I Tahun 2017 s/d Triwulan III 2018 (q-to-q) NTT	

dan Nasional	66
Gambar 12.1 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2018 Tingkat Nasional dan Provinsi	69
Gambar 12.2 Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2018 Tingkat Nasional dan Provinsi	70
Gambar 13.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT, 2010-2017.....	73
Gambar 13.2 Umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH) NTT (tahun), 2010-2017.....	74
Gambar 13.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah NTT (tahun), 2010-2017	75
Gambar 13.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di NTT (Rp 000), 2010-2017	75
Gambar 13.5 IPM NTT Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2017	77
Gambar 14.1 Perkembangan IDI NTT, 2011-2017	79
Gambar 14.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI NTT, 2009-2017.....	80
Gambar 14.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI NTT, 2016-2017.....	81
Gambar 15.1 Perkembangan Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2014 dan 2017	87
Gambar 15.2 Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2017	88
Gambar 15.3 Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi, 2017	91
Gambar 16.1 Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	94
Gambar 16.2 Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	95
Gambar 16.3 Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	97
Gambar 16.4 Persentase Tenaga Kerja menurut Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	98
Gambar 16.5 Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016	100
Gambar 17.1 Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2018	101
Gambar 17.2 Jumlah Desa Menurut Status IPD, 2018.....	102
Gambar 17.3 Perkembangan Desa Menurut Status IPD, 2018.....	102
Gambar 17.4 Tingkat Kenaikan IPD Menurut Dimensi Penyusunnya, 2014 – 2018	103
Gambar 17.5 Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Produk Unggulan 2018	104

FOKUS PERHATIAN**1. Inflasi**

Desember 2018 Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,70. Dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi yaitu Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan Kota Maumere sebesar 0,14 persen. Inflasi Desember 2018 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran, dimana kelompok Transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,94 persen yang diikuti kelompok bahan makanan sebesar 3,82 persen. Selama tahun 2018, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen, Kota Kupang mengalami inflasi 3,23 persen dan Kota Maumere 2,00 persen. Di Tahun 2018, penyebab utama terjadinya inflasi di Nusa Tenggara Timur didorong oleh kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan. Seluruh kelompok pengeluaran selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga. Dari 82 kota sampel IHK Nasional, pada Desember 2018 80 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dengan inflasi sebesar 0,02 persen.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2018 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2012 (2012=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Pada bulan Desember 2018, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 107,02 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 111,38 untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P); 104,44 untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 102,21 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 108,36 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 108,36 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi). Terjadi penurunan sebesar -0,07 persen pada NTP Desember 2018 jika dibandingkan dengan NTP November 2018. Walaupun tidak signifikan namun dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan/daya beli dan daya tukar (term of trade) petani di pedesaan menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan pendapatan petani meningkat tidak sebanding dengan peningkatan harga barang konsumsi dan biaya produksi meningkat. Di daerah pedesaan terjadi inflasi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,65%. Faktor pemicunya adalah adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada subkelompok bahan makanan, makanan jadi dan perumahan.

3. Ekspor

Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Oktober 2018 senilai US \$ 1.867.050 dengan volume sebesar 7.085,619 ton mengalami kenaikan sebesar 13,52 persen dari ekspor bulan September 2018 sebesar US \$ 1.644.696. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US \$ 262.422 dan ekspor non migas senilai US \$ 1.604.628. Komoditas ekspor Provinsi NTT bulan Oktober 2018 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US \$ 1.867.050. Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada bulan

Oktober 2018 adalah kelompok komoditas Kendaraan dan Bagiannya (87) senilai US \$ 316.851.

4. Impor

Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada November 2018 senilai US \$ 8.150.123 dengan volume sebesar 8.865,17 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral (27) yang didatangkan dari Malaysia. Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US \$ 16.582.636 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US \$ 107.599.231 maka pada tahun 2018 terdapat defisit sebesar US \$ 91.016.595.

5. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan November 2018 sebesar 61,65 persen, naik 3,62 poin dibanding TPK Oktober 2018 yang sebesar 58,03 persen. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang bulan November 2018 sejumlah 33.854 orang dengan rincian 32.727 orang tamu nusantara dan 1.127 orang tamu mancanegara. Rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada bulan November 2018 selama 1,54 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,50 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 2,79 hari.

6. Angkutan Udara

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan November 2018 sebanyak 161.748 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 156.812 orang. Pada November 2018, empat bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat terbanyak adalah Bandara Eltari (51,03 persen), Komodo (13,53 persen), Tambolaka (6,23 persen), dan Frans Seda-Maumere (5,89 persen).

7. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 1.142,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 4.510 orang (dari 1.015,70 ribu orang menjadi 1.020,21 ribu orang) dan untuk perkotaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2.910 orang (dari 119,04 ribu orang menjadi 121,95 ribu orang).

Periode September 2017 – Maret 2018, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 2,35 persen, yaitu dari Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 354.898,- per kapita per bulan pada Maret 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2018 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 78,59 persen, sedikit mengalami penurunan dibanding periode September 2017 yang sebesar 78,83 persen.

Pada periode September 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,158 pada September 2017 menjadi 3,908 pada Maret 2018. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu turun dari 1,174 menjadi 1,026 pada periode yang sama.

8. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 mencapai 3,01 persen, turun 0,26 poin dari Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Penganggur di NTT pada Agustus 2018 sebesar 74,7 ribu orang, berkurang 3,8 ribu orang dibanding penganggur Agustus 2017 sebesar 78,5 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT Agustus 2018 sebesar 70,17 persen, naik 1,08 poin dibandingkan TPAK NTT Agustus 2017 yang sebesar 69,09 persen. Angkatan kerja NTT pada Agustus 2018 sebesar 2,49 juta orang, bertambah 87,7 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 sebesar 2,40 juta orang. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2018 mencapai 2,41 juta orang, bertambah 91,5 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2017 sebesar 2,32 juta orang. Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 berdasarkan KBLUI 2015 sebagian besar penduduk bekerja di kategori Pertanian sebesar 1,32 juta orang (54,73 persen), diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (9,64 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (8,96 persen).

9. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2018 mencapai 25,86 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,09 triliun. Ekonomi NTT triwulan III-2018 tumbuh sebesar 5,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,60 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor yang bertumbuh sebesar 58,63 persen. Ekonomi NTT triwulan III-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen dibandingkan dengan triwulan II-2018 (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,78 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor sebesar 43,87 persen. Ekonomi NTT pada triwulan I sampai dengan Triwulan III 2018 tumbuh sebesar 5,14 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,33 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan III-2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 66,94 persen.

10. Luas Panen dan Produksi Padi

Luas panen padi di NTT periode Januari–September 2018 sebesar 173,42 ribu hektar. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 adalah 200,88 ribu hektar. Produksi padi di NTT periode Januari–September 2018 sebesar 690,82 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi padi tahun 2018 sebesar 800,98 ribu ton GKG. Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke beras tahun 2018, maka produksi padi tersebut setara dengan 466,74 ribu ton beras.

11. Produksi Industri Manufaktur

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) triwulan III tahun 2018 di NTT mengalami kenaikan sebesar 3,36 persen dibanding triwulan II tahun 2018, dan pertumbuhan (y-on-y) triwulan III tahun 2018 terhadap triwulan III tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,18 persen.

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (q-to-q) triwulan III tahun 2018 naik sebesar 1,03 persen dibanding triwulan II tahun 2018, dan pertumbuhan (y-on-

y) triwulan III tahun 2018 terhadap triwulan yang sama tahun 2017 NTT naik sebesar 30,35 persen.

12. Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

ITK NTT pada triwulan III-2018 sebesar 113,64, artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 116,48), tidak adanya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 123,44) juga penurunan volume konsumsi (nilai indeks sebesar 94,44). Sebagian provinsi di Indonesia mengalami perbaikan kondisi ekonomi konsumen. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah NTT dengan nilai indeks sebesar 113,64 sedangkan provinsi yang memiliki nilai ITK terendah adalah Sumatera Barat dengan nilai indeks sebesar 95,39. Nilai ITK NTT pada triwulan IV-2018 diperkirakan sebesar 125,81 artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan lebih meningkat. Tingkat optimisme konsumen diperkirakan semakin tinggi dibandingkan triwulan III-2018 (nilai ITK sebesar 113,64).

13. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Sejak tahun 2011, status pembangunan manusia di NTT telah mencapai level “sedang”. IPM NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,80 persen dibandingkan tahun 2011. Selama periode 2016 hingga 2017, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

14. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT tahun 2017 mencapai angka 75,51 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun sebesar 6,98 poin dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 82,49. Capaian kinerja demokrasi NTT tersebut berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan

dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil turun 16,56 poin (dari 96,25 menjadi 79,69), (2) Hak-Hak Politik juga turun 11,93 poin (dari 81,68 menjadi 69,75), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 12,93 poin (dari 66,46 naik menjadi 79,39). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

15. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan di NTT tahun 2017 berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) sebesar 68,98 pada skala 0-100. Indeks Kebahagiaan NTT tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction), perasaan (Affect), dan makna hidup (Eudaimonia). Kontribusi masing-masing dimensi terhadap Indeks Kebahagiaan NTT adalah Kepuasan Hidup 34,80 persen, Perasaan (Affect) 31,18 persen, dan Makna Hidup (Eudaimonia) 34,02 persen.

Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 69,83; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 65,23; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 71,53. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0-100.

16. Sensus Ekonomi 2016 (Hasil Sementara)

Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebanyak 436,4 ribu usaha/ perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, meningkat 51,99 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 287,1. Berdasarkan skala usaha, 433,1 ribu usaha/perusahaan (99,24 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 3,3 ribu usaha/ perusahaan (0,76 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha/ perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 185,5 ribu usaha/ perusahaan atau 42,49 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di NTT. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 290,1 ribu tenaga kerja atau 31,57 persen dari tenaga kerja yang ada di Provinsi NTT. Sebaran jumlah usaha/perusahaan antar kawasan dan antar pulau secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 206,2 ribu usaha/ perusahaan di Flores (termasuk Alor dan Lembata) atau 47,25 persen dan 173,9 ribu di Timor (termasuk Rote Ndao dan Sabu Raijua) atau 40,24 persen terhadap jumlah usaha/perusahaan di NTT.

<https://ntt.bps.go.id>

I. INFLASI NOVEMBER 2018

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

A. Perkembangan Harga Barang dan Jasa di Nusa Tenggara Timur Desember 2018

Nusa Tenggara Timur pada Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 1,84 persen setelah bulan sebelumnya, November 2018, mengalami inflasi sebesar 0,87 persen. Dengan kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,26 pada Bulan November menjadi 134,70 pada Bulan Desember 2018. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 4,94 persen diikuti oleh kelompok bahan makanan yang naik sebesar 3,82 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Desember 2018, Tahun Kalender 2018 dan Year on Year
menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Desember 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2017	November 2018	Desember 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	130,68	132,26	134,70	1,84	3,07	3,07
1 Bahan Makanan	123,63	123,71	128,44	3,82	3,89	3,89
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148,87	152,66	152,79	0,08	2,63	2,63
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128,50	130,16	130,36	0,16	1,45	1,45
4 Sandang	129,66	130,45	130,32	-0,10	0,51	0,51
5 Kesehatan	117,70	118,93	119,05	0,10	1,15	1,15
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	132,66	134,70	134,72	0,02	1,56	1,56
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134,68	136,83	143,59	4,94	6,61	6,61

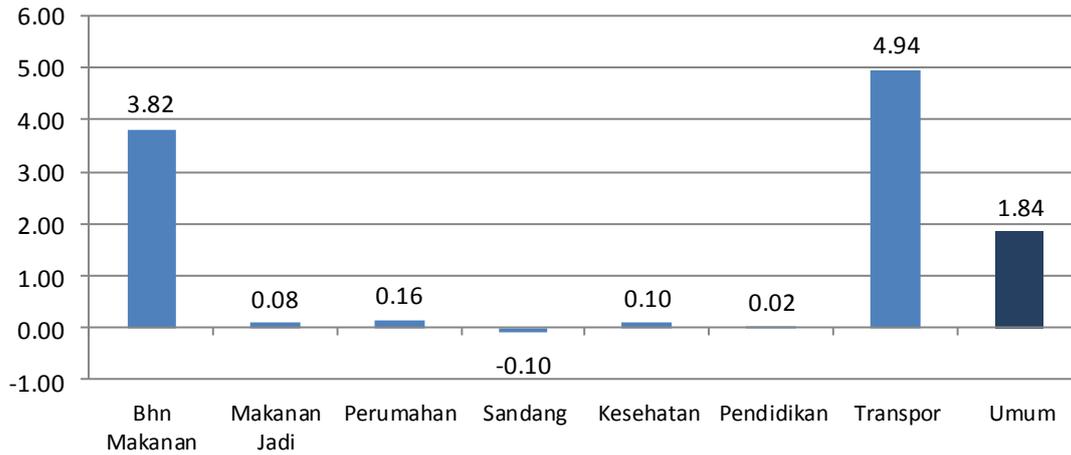
*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,

**) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

***) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

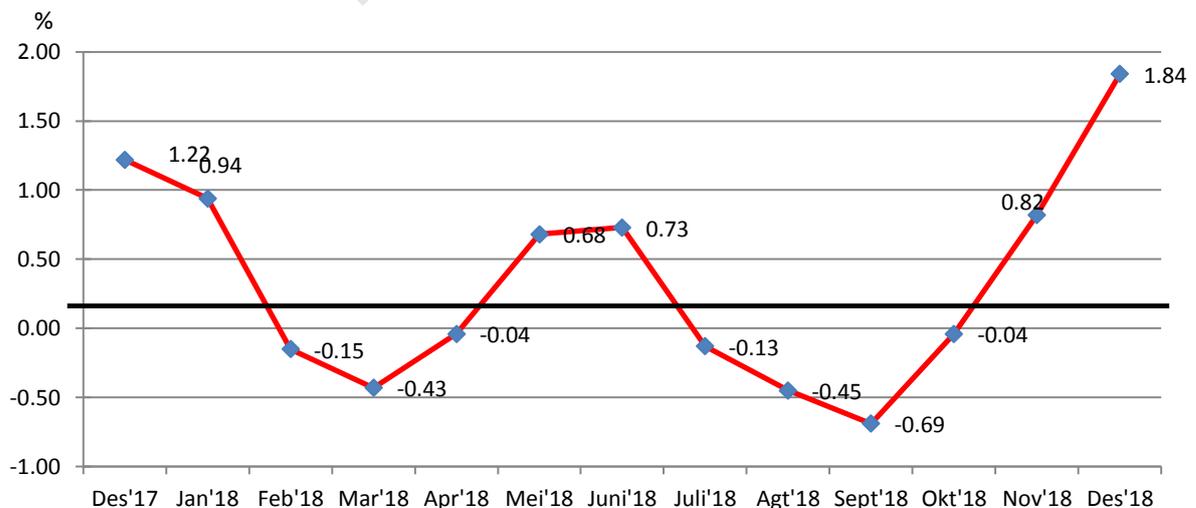
Gambar 1.1

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur Desember 2018



Inflasi yang terjadi pada Desember 2018 ini searah dengan yang terjadi di Desember 2017 yang lalu yang juga mengalami inflasi. Jika di Desember 2017 terjadi inflasi sebesar 1,22 persen, maka Desember 2018 terjadi inflasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,84 persen. Selama Tahun 2018 (Januari-Desember 2018), Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen. Inflasi yang terjadi selama tahun 2018 dipicu oleh naiknya indeks harga dari seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 6,61 persen, diikuti kelompok bahan makanan yang selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 3,89 persen

Gambar 1.2
Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur
Desember 2017 – Desember 2018



Tabel 1.2

Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Desember 2018

Kelompok Pengeluaran	Desember 2018		2018	
	Perubahan (%)	andil (%)	Perubahan (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	1.84	1.84	3.07	3.07
Bahan Makanan	3.82	0.90	3.89	0.94
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.08	0.01	2.63	0.39
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.16	0.04	1.45	0.37
Sandang	-0.10	0.00	0.51	0.03
Kesehatan	0.10	0.00	1.15	0.05
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.02	0.00	1.56	0.12
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	4.94	0.89	6.61	1.17

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan Desember 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 0,90 persen, disusul kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen. Selama tahun 2018, kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan merupakan kelompok penyumbang terbesar terhadap inflasi yakni sebesar 1,17 persen. Disusul oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,94 persen.

B. Perkembangan Harga Barang dan Jasa di Kota Kupang

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan Desember 2018, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,09 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 133,18 pada bulan November 2018 menjadi 135,96 pada Desember 2018.

Tabel 1.3

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Kupang
Desember 2018, Tahun Kalender 2018 dan Year on Year

menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Desember 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2017	November 2018	Desember 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	131,71	133,18	135,96	2,09	3,23	3,23
1 Bahan Makanan	125,46	125,39	130,80	4,31	4,26	4,26
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148,70	152,40	152,49	0,06	2,55	2,55
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	129,11	130,59	130,82	0,18	1,32	1,32
4 Sandang	131,24	131,77	131,62	-0,11	0,29	0,29
5 Kesehatan	117,29	118,04	118,15	0,09	0,73	0,73
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	130,89	132,86	132,89	0,02	1,53	1,53
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	137,23	139,55	147,31	5,56	7,35	7,35

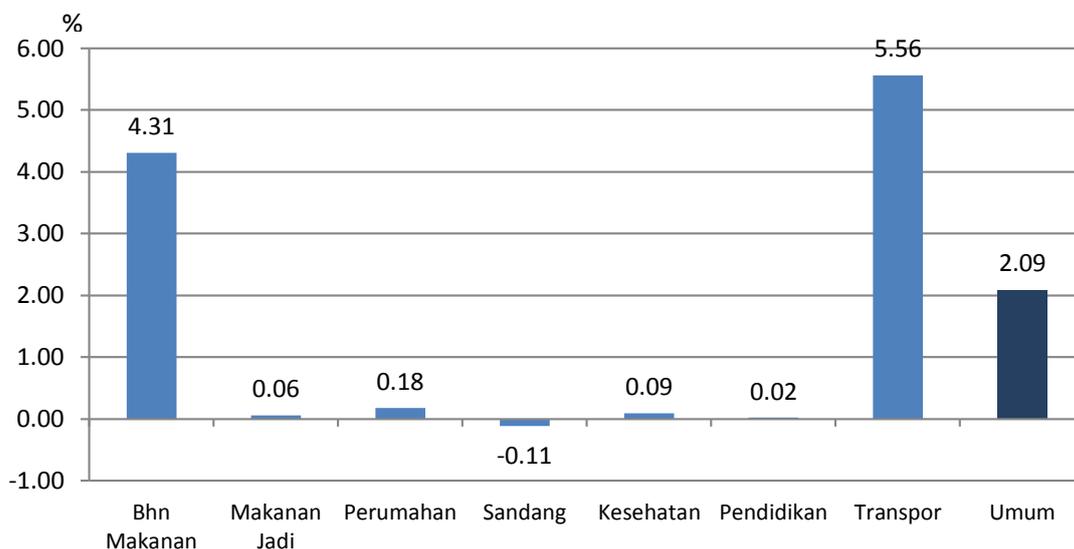
*) *Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,*

**) *Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017*

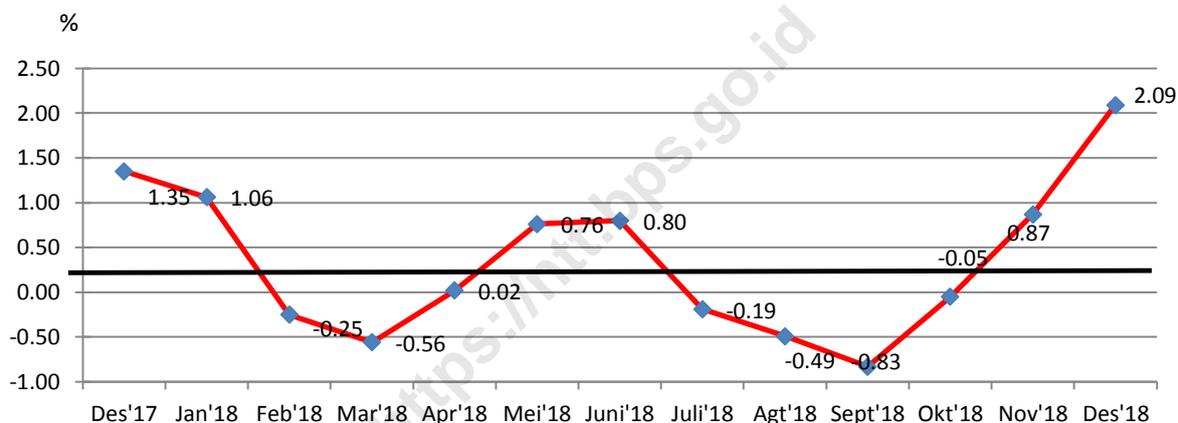
***) *Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017*

Secara tahunan, selama tahun 2018, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 3,23 persen. Inflasi ini dipicu oleh naiknya indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok Pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 7,35 persen, diikuti kelompok bahan makanan yang naik sebesar 4,26 persen.

Gambar 1.3
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Kupang Desember 2018



Gambar 1.4
Perkembangan Inflasi Kota Kupang Desember 2017 – Desember 2018



Searah dengan tahun sebelumnya Desember 2017 dimana Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 1,35 persen, pada Desember 2018 ini Kota Kupang juga mengalami inflasi yaitu sebesar 2,09 persen.

Tabel 1.4
Inflasi dan Andil Inflasi Kota Kupang Desember 2018

Kelompok Pengeluaran	Desember 2018		2018	
	Perubahan (%)	Andil (%)	Perubahan (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	2.09	2.09	3.23	3.23
Bahan Makanan	4.31	1.02	4.26	1.02
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.06	0.01	2.55	0.37
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.18	0.04	1.32	0.34
Sandang	-0.11	-0.01	0.29	0.01
Kesehatan	0.09	0.00	0.73	0.04
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.02	0.00	1.53	0.12
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	5.56	1.01	7.35	1.33

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil dalam pembentukan inflasi Kota Kupang bulan Desember 2018 adalah bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil masing-masing sebesar 1,02 dan 1,01 persen. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil inflasi di Kota Kupang Desember 2018 antara lain naiknya harga tarif angkutan udara, daging ayam ras, ikan tongkol, sawi putih, tomat sayur, ikan tembang, telur ayam ras, kangkung, ikan kakap merah dan bayam. Sedangkan komoditas utama yang menghambat inflasi antara lain turunnya harga daun singkong, ikan kembung, daging babi, bunga papaya, buncis, ikan ekor kuning, terong panjang, bawang merah, pare dan labu parang/manis.

Selama tahun 2018, kelompok komoditas yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Kota Kupang adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil sebesar 1,33 persen. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil inflasi di Kota Kupang selama tahun 2018 antara lain naiknya tarif angkutan udara, daging ayam ras, ikan tembang, kangkung, beras, ikan kakap merah, tomat sayur, rokok kretek, bayam, dan nasi dengan lauk. Sedangkan komoditas utama yang menghambat inflasi Kota Kupang selama tahun 2018 antara lain turunnya harga ikan kembung, bawang merah, kentang, tahu mentah, telepon seluler, ikan cakalang, daun seledri, sawi putih, cabai rawit dan daging babi.

C. Perkembangan Harga Barang dan Jasa di Kota Maumere

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan Desember 2018, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,14 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 126,23 pada bulan November 2018 menjadi 126,41 pada Desember 2018.

Selama tahun 2018 Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,00 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan IHK tertinggi selama tahun 2018 adalah kelompok kesehatan sebesar 3,80 persen, diikuti kelompok makanan jadi sebesar 3,19 persen.

Tabel 1.5
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Maumere
Desember 2018, Tahun Kalender 2018 dan Year on Year
menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Desember 2018 *)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2017	November 2018	Desember 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	123,93	126,23	126,41	0,14	2,00	2,00
1 Bahan Makanan	111,60	112,73	112,96	0,20	1,22	1,22
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	149,96	154,37	154,75	0,25	3,19	3,19
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	124,47	127,32	127,37	0,04	2,33	2,33
4 Sandang	119,32	121,79	121,83	0,03	2,10	2,10
5 Kesehatan	120,37	124,76	124,95	0,15	3,80	3,80
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	144,24	146,74	146,74	0,00	1,73	1,73
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	118,00	118,98	119,18	0,17	1,00	1,00

*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,

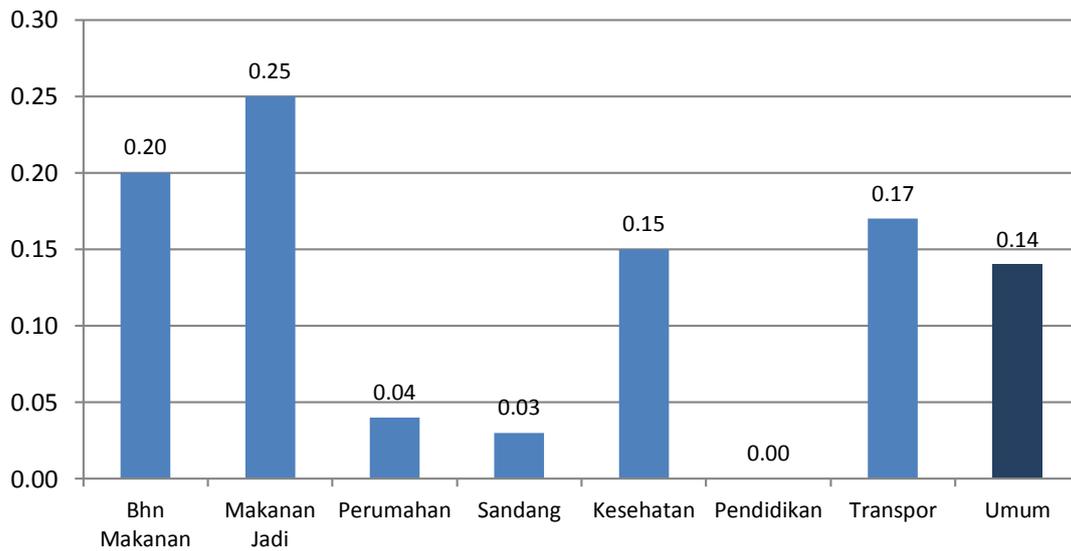
***) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

****) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017

Pemicu inflasi bulan Desember 2018 di Kota Maumere adalah karena naiknya indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks terbesar yakni masing-masing sebesar 0,25 dan 0,20 persen.

Gambar 1.5

Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Maumere Desember 2018



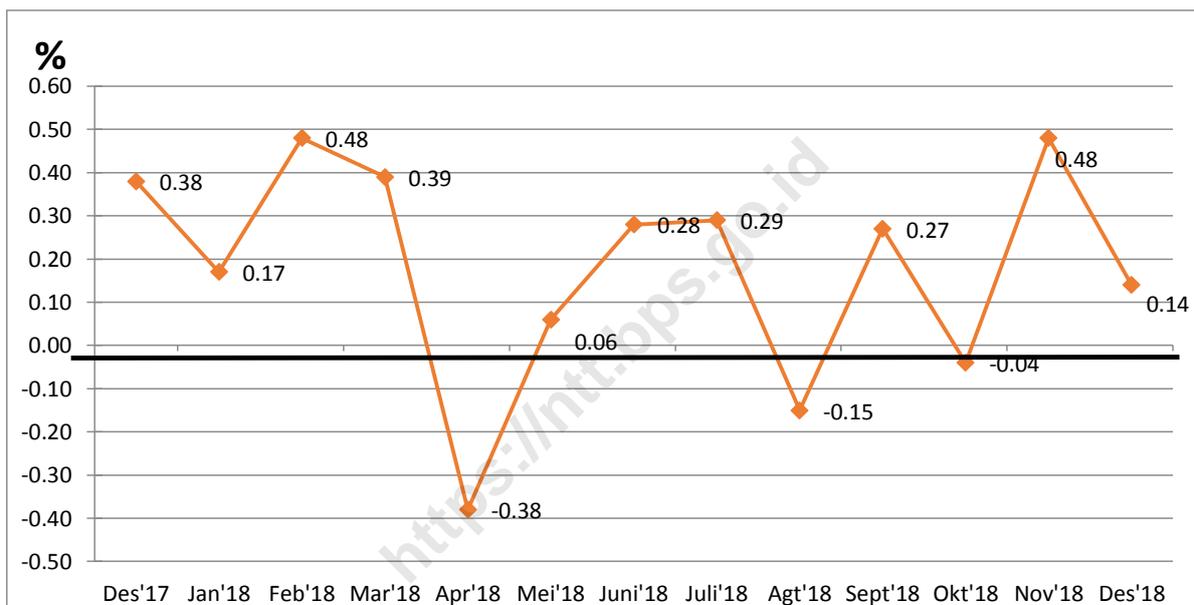
Tabel 1.6
Indeks Harga Konsumen, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Maumere Desember 2018

Kelompok Pengeluaran	Desember 2018		2018	
	Perubahan (%)	Andil (%)	Perubahan (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	0,14	0,14	2,00	2,00
Bahan Makanan	0,20	0,06	1,22	0,37
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,25	0,04	3,19	0,54
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,04	0,01	2,33	0,56
Sandang	0,03	0,00	2,10	0,10
Kesehatan	0,15	0,01	3,80	0,17
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0,00	0,00	1,73	0,15
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,17	0,02	1,00	0,12

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi Kota Maumere bulan Desember 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil 0,06 persen. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil inflasi di Kota Maumere pada Desember 2018 antara lain naiknya harga telur ayam ras, bawang merah, kol putih, rokok putih, sawi hijau, daging ayam ras, tomat sayur, cabai rawit, daging sapi dan cabai merah. Sedangkan komoditas utama yang menghambat inflasi antara lain turunnya harga ikan layang, kangkung, ayam hidup, ikan asin belah, minyak goreng, ikan tongkol, ikan tuna, ikan selar, tauge dan daun singkong.

Selama tahun 2018, kelompok komoditas yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Kota Maumere adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar 0,56 persen. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil inflasi di Kota Maumere selama tahun 2018 antara lain naiknya harga beras, rokok kretek filter, besi beton, air kemasan, kontrak rumah, bayam, rokok putih, sawi hijau, tarif sekolah dasar, dan wortel. Sedangkan komoditas utama yang menghambat inflasi Kota Maumere selama tahun 2018 antara lain turunnya harga ikan layang, ayam hidup, ikan selar kering, ikan selar segar, daging ayam kampung, ikan teri basah, angkutan udara, minyak goreng, gula pasir dan cumi-cumi.

Gambar 1.6
Perkembangan Inflasi Kota Maumere Desember 2017 – Desember 2018



Searah dengan kondisi bulan Desember tahun 2017 dimana Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,38 persen, pada Desember 2018 ini Kota Maumere pun mengalami inflasi yang lebih rendah yaitu sebesar 0,14 persen.

D. Perbandingan Inflasi Bulanan, Inflasi Tahun Kalender, dan Inflasi *Year on Year*

Dalam lima tahun terakhir, tercatat di bulan Desember Nusa Tenggara Timur selalu mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,41 persen. Inflasi bulan Desember tahun 2017 sebesar 1,22 persen merupakan inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir.

Inflasi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2017 sebesar 2,00 persen juga merupakan inflasi tahunan terendah dalam lima tahun terakhir. Sedangkan inflasi tahunan terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,76 persen.

Tabel 1.7
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on year
di Maumere, Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Desember 2013 – Desember 2018

Tahun	Maumere	Kupang	Nusa Tenggara Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
Inflasi Bulanan (Desember)			
2014	2,22	3,58	3,41
2015	1,03	2,67	2,46
2016	1,65	1,96	1,92
2017	0,38	1,35	1,22
2018	0,14	2,09	1,84
Inflasi Tahun Kalender (Januari-Desember)			
2014	4,00	8,32	7,76
2015	3,89	5,07	4,92
2016	3,62	2,31	2,48
2017	1,70	2,05	2,00
2018	2,00	3,23	3,07
Inflasi Year on Year			
2014	4,00	8,32	7,76
2015	3,89	5,07	4,92
2016	3,62	2,31	2,48
2017	1,70	2,05	2,00
2018	2,00	3,23	3,07

E. Inflasi Beberapa Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Dari 24 kota sampel IHK Nasional di Kawasan Timur Indonesia pada bulan Desember 2018 ini, 22 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Kupang yang sebesar 2,09 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Maumere yang sebesar 0,14 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi di Kota Sorong sebesar 0,15 persen dan terendah terjadi di Kota Kendari sebesar 0,09 persen

Inflasi selama tahun 2018 untuk kota di Kawasan Timur Indonesia terjadi di Kota Jayapura sebesar 6,70 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kota Tual sebesar 1,62 persen.

Tabel 1.8
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota di Kawasan Timur Indonesia Desember 2018
(2012=100)

Kota	IHK	Inflasi (%)	Inflasi Tahun Kalender (%)
1	2	3	4
KUPANG	135.96	2.09	3.23
JAYAPURA	140.58	1.62	6.70
BAU-BAU	136.61	1.61	2.92
MANOKWARI	132.03	1.37	6.02
AMBON	130.23	1.20	3.53
PALU	141.15	1.10	6.46
MERAUKE	141.02	1.09	5.42
PARE-PARE	128.76	0.96	1.96
BIMA	138.71	0.95	3.22
MAKASSAR	136.70	0.93	3.48
SINGARAJA	142.28	0.84	1.88
TERNATE	138.31	0.79	4.12
MANADO	133.64	0.78	3.83
DENPASAR	131.50	0.77	3.40
PALOPO	134.06	0.68	4.19
GORONTALO	129.80	0.57	2.15
MATARAM	132.81	0.53	3.15
TUAL	155.79	0.52	1.62
MAMUJU	132.62	0.46	1.80
BULUKUMBA	141.56	0.40	3.85
WATAMPONE	132.88	0.21	4.69
MAUMERE	126.41	0.14	2.00
KENDARI	128.48	-0.09	2.55
SORONG	134.89	-0.15	4.95

F. Inflasi Kota-kota Sampel IHK Nasional

Dari 82 kota sampel IHK Nasional, pada Bulan Desember 2018 80 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dengan inflasi sebesar 0,02 persen.

Inflasi selama tahun 2018 yang terbesar terjadi di Kota Jayapura sebesar 6,70 persen, dan yang terendah adalah Kota Meulaboh sebesar 0,96 persen.

Tabel 1.9
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi di 82 Kota Desember 2018 (2012=100)

Kota	IHK	Inflasi	Th Kalender ^{*)}	Kota	IHK	Inflasi	Th Kalender ^{*)}
KUPANG	135.96	2.09	3.23	CILEGON	141.62	0.58	2.73
PANGKAL PINANG	141.67	1.88	3.45	SURAKARTA	129.30	0.57	2.45
JAYAPURA	140.58	1.62	6.70	YOGYAKARTA	131.81	0.57	2.66
BAU-BAU	136.61	1.61	2.92	GORONTALO	129.80	0.57	2.15
TARAKAN	147.40	1.60	5.00	BANYUWANGI	128.96	0.55	2.04
SAMPIT	139.06	1.47	6.02	PURWOKERTO	131.87	0.53	2.98
MANOKWARI	132.03	1.37	6.02	MATARAM	132.81	0.53	3.15
PONTIANAK	145.58	1.28	3.99	SUKABUMI	134.06	0.52	2.95
BATAM	137.03	1.20	3.65	TUAL	155.79	0.52	1.62
AMBON	130.23	1.20	3.53	SUMENEP	130.78	0.51	2.82
PALU	141.15	1.10	6.46	JEMBER	130.62	0.49	2.95
MERAUKE	141.02	1.09	5.42	MEULABOH	133.08	0.48	0.96
PALANGKARAYA	131.87	1.07	3.68	KUDUS	140.92	0.48	3.11
LHOKSEUMAWE	131.16	1.05	2.05	TEGAL	131.35	0.47	3.08
JAMBI	134.57	0.98	3.02	MAMUJU	132.62	0.46	1.80
PALEMBANG	132.09	0.96	2.78	CILACAP	137.73	0.45	3.21
PARE-PARE	128.76	0.96	1.96	SINGKAWANG	136.31	0.43	3.18
BIMA	138.71	0.95	3.22	PADANGSIDIMPUAN	133.04	0.41	2.22
MAKASSAR	136.70	0.93	3.48	BUKITTINGGI	131.85	0.41	2.99
BALIKPAPAN	139.03	0.86	3.13	BULUKUMBA	141.56	0.40	3.85
TANJUNG PINANG	133.34	0.85	2.36	PEMATANG SIANTAR	139.09	0.38	2.15
TANJUNG PANDAN	143.35	0.84	2.72	SEMARANG	132.70	0.36	2.76
SINGARAJA	142.28	0.84	1.88	LUBUKLINGGAU	131.80	0.34	2.42
BENGKULU	143.13	0.79	2.35	BANDAR LAMPUNG	135.15	0.31	2.92
TERNATE	138.31	0.79	4.12	SAMARINDA	138.02	0.30	3.32
BOGOR	136.73	0.78	3.69	KEDIRI	129.27	0.29	1.97
MANADO	133.64	0.78	3.83	METRO	139.44	0.27	1.64
DENPASAR	131.50	0.77	3.40	TASIKMALAYA	132.23	0.25	2.30
PROBOLINGGO	129.77	0.72	2.18	MADIUN	132.09	0.25	2.71
BANDUNG	134.48	0.71	3.76	DUMAI	136.30	0.22	1.85
TEMBILAHAN	139.00	0.70	2.64	DEPOK	132.93	0.22	2.86
BANJARMASIN	134.56	0.70	2.63	WATAMPONE	132.88	0.21	4.69
TANJUNG	133.92	0.68	2.60	PEKANBARU	136.54	0.18	2.54
PALOPO	134.06	0.68	4.19	PADANG	139.77	0.16	2.55
MALANG	134.99	0.65	2.98	BUNGO	132.83	0.16	2.46
SURABAYA	135.24	0.65	3.03	MAUMERE	126.41	0.14	2.00
SERANG	145.19	0.64	3.78	MEDAN	138.53	0.12	1.00
TANGERANG	143.08	0.63	3.46	SIBOLGA	140.50	0.10	2.86
DKI JAKARTA	135.25	0.60	3.27	BANDA ACEH	128.20	0.02	1.93
BEKASI	132.13	0.59	4.23	KENDARI	128.48	-0.09	2.55
CIREBON	129.98	0.58	2.80	SORONG	134.89	-0.15	4.95

*) IHK Januari-Desember 2018

II. NILAI TUKAR PETANI DESEMBER 2018

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Desember 2018 didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 2012 (2012=100). Penghitungan NTP ini mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Pada bulan Desember 2018, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 107,02 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 111,38 untuk subsektor tanaman padi-palawija (NTP-P); 104,44 untuk sub sektor hortikultura (NTP-H); 102,21 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR); 108,36 untuk subsektor peternakan (NTP-Pt) dan 108,36 untuk subsektor perikanan (NTP-Pi). Terjadi penurunan sebesar -0,07 persen pada NTP Desember 2018 jika dibandingkan dengan NTP November 2018. Walaupun tidak signifikan namun dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan/daya beli dan daya tukar (term of trade) petani di pedesaan menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan pendapatan petani meningkat tidak sebanding dengan peningkatan harga barang konsumsi dan biaya produksi meningkat. Di daerah pedesaan terjadi inflasi pada bulan Desember 2018 sebesar 0,65%. Faktor pemicunya adalah adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada subkelompok bahan makanan, makanan jadi dan perumahan..

B. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Indeks harga yang diterima petani dari ke lima subsektor menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Desember 2018, indeks harga yang diterima petani meningkat 0,52 persen dibandingkan November 2018 yaitu dari 138,75 menjadi 139,47. Peningkatan It pada Desember 2018 disebabkan oleh meningkatnya indeks terima subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

C. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui indeks harga yang dibayar petani dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar di pedesaan serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Desember 2018 indeks harga yang dibayar petani dilaporkan mengalami peningkatan dibandingkan November 2018 yaitu dari 129,57 menjadi 130,32 atau naik sebesar 0,58 persen. Peningkatan indeks bayar ini terjadi di seluruh subsektor. Karena It meningkat tidak sebanding dengan peningkatan Ib maka NTP Desember 2018 mengalami penurunan.

D. NTP Subsektor

1. Subsektor Padi & Palawija

NTP subsektor padi dan palawija di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan 0,62 persen pada Desember 2018. Hal ini disebabkan karena It dan Ib meningkat sebesar 1,32 persen dan 0,69 persen. Meningkatnya It dipengaruhi oleh perubahan harga pada subkelompok padi (0,27%) dan palawija (1,81%). Sedangkan Ib dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja modal.

2. Subsektor Hortikultura

NTP untuk subsektor hortikultura mengalami peningkatan 0,79 persen pada Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Ib (0,54%) dan It (1,34%). It dipengaruhi peningkatan sayuran (1,55%) dan buah-buahan (1,33%). Sedangkan Ib utamanya dipengaruhi oleh perubahan subkelompok konsumsi rumahtangga (0,61%) dan BPPBM (0,20%).

3. Subsektor Perkebunan Rakyat

NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat Desember 2018 menurun sebesar -1,38 persen dibandingkan periode November 2018. Hal ini terjadi karena It menurun sebesar -0,75 persen dan Ib meningkat 0,64 persen. Pada Ib subkelompok konsumsi rumah tangga meningkat 0,74 persen dan indeks subkelompok BPPBM 0,07 persen.

4. Subsektor Peternakan

NTP subsektor peternakan mengalami penurunan pada Desember 2018 sebesar -0,20 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan It (0,24%) tidak sebanding dengan peningkatan Ib (0,44%). It dipengaruhi oleh perubahan subkelompok ternak besar (0,08%), subkelompok ternak kecil (0,22%), subkelompok unggas (2,22%). Untuk Ib subkelompok konsumsi rumahtangga meningkat sebesar 0,59 persen dan subkelompok BPPBM naik 0,05 persen pada periode Desember 2018.

Tabel 2.1
 Nilai Tukar Petani NTT Per Subsektor November –Desember 2018
 (2012=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2018	Desember 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Tanaman Padi-Palawija			
a.Indeks yang Diterima	144,43	146,33	1,32
b.Indeks yang Dibayar	130,47	131,38	0,69
c. Nilai Tukar Petani	110,70	111,38	0,62
2.Hortikultura			
a.Indeks yang Diterima	134,06	135,86	1,34
b.Indeks yang Dibayar	129,38	130,08	0,54
c. Nilai Tukar Petani	103,62	104,44	0,79
3.Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)			
a.Indeks yang Diterima	136,45	135,42	-0,75
b.Indeks yang Dibayar	131,64	132,48	0,64
c. Nilai Tukar Petani	103,65	102,21	-1,38
4.Peternakan			
a.Indeks yang Diterima	137,63	137,96	0,24
b.Indeks yang Dibayar	126,76	127,32	0,44
c. Nilai Tukar Petani	108,58	108,36	-0,20
5.Perikanan			
a.Indeks yang Diterima	139,37	139,06	-0,22
b.Indeks yang Dibayar	127,89	128,34	0,35
c. Nilai Tukar Petani	108,98	108,36	-0,57
5.1 Penangkapan Ikan			
a.Indeks yang Diterima	145,49	144,49	-0,69
b.Indeks yang Dibayar	128,27	128,75	0,37
c. Nilai Tukar Petani	113,42	112,23	-1,05
5.2 Budidaya Perikanan			
a.Indeks yang Diterima	124,10	125,51	1,14
b.Indeks yang Dibayar	126,94	127,31	0,30
c. Nilai Tukar Petani	97,77	98,58	0,84
Gabungan/Nusa Tenggara Timur			
a.Indeks yang Diterima	138,75	139,47	0,52
b.Indeks yang Dibayar	129,57	130,32	0,58
c. Nilai Tukar Petani	107,09	107,02	-0,07

5. Subsektor Perikanan

NTP subsektor perikanan secara umum mengalami penurunan sebesar -0,57 persen pada Desember 2018. Hal ini disebabkan It menurun sebesar -0,22 persen dan Ib meningkat 0,35 persen. Penurunan It disebabkan oleh menurunnya subkelompok tangkap -0,69. Ib dipengaruhi oleh meningkatnya subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,35 persen dan belanja modal 0,07 persen pada Desember 2018.

▪ Subkelompok Penangkapan Ikan

NTP subkelompok penangkapan ikan mengalami penurunan -1,05 persen dari 113,42 persen pada November menjadi 112,23 persen di Desember 2018. Hal ini disebabkan penurunan It tidak sebanding dengan peningkatan Ib masing-masing sebesar -0,69 persen dan 0,37 persen.

▪ Subkelompok Budidaya Perikanan

NTP subkelompok budidaya perikanan mengalami peningkatan 0,84 persen dari 97,77 di November menjadi 95,58 di Desember 2018. Hal ini terjadi karena peningkatan It sebesar 1,14 persen dan peningkatan Ib sebesar 0,30 persen. Peningkatan Ib dipengaruhi oleh subkelompok Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 0,47 persen.

Tabel 2.2
Indeks Harga Diterima Petani, Indeks Harga Dibayar Petani
per Subkelompok Pengeluaran serta Perubahannya Desember 2018
(2012=100)

Kelompok/SubKelompok	Indeks Gabungan Subsektor		Persentase Perubahan
	November	Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	138,75	139,47	0,52
2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	129,57	130,32	0,58
2.1. KONSUMSI RUMAH TANGGA	132,36	133,23	0,65
2.1.1. Bahan Makanan	136,46	137,63	0,86
2.1.2. Makanan Jadi	134,31	134,88	0,42
2.1.3. Perumahan	124,46	125,09	0,51
2.1.4. Sandang	137,98	139,63	1,19
2.1.5. Kesehatan	125,47	126,28	0,65
2.1.6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	116,63	116,76	0,11
2.1.7. Transportasi dan Komunikasi	128,89	129,06	0,13
2.2. BIAYA PRODUKSI & PENAMBAHAN BARANG MODAL	119,56	119,93	0,31
2.2.1. Bibit	114,45	114,65	0,18
2.2.2. Obat-obatan dan Pupuk	117,13	117,74	0,51
2.2.3. Sewa Lahan, Pajak dan Lainnya	111,22	111,23	0,01
2.2.4. Transportasi	132,05	131,95	-0,07
2.2.5. Penambahan Barang Modal	121,09	121,32	0,18
2.2.6. Upah Buruh Tani	117,05	117,51	0,39
3. NILAI TUKAR PETANI	107,09	107,02	-0,07
4. NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	116,05	116,30	0,21

E. Inflasi Perdesaan

Perubahan Indeks Konsumsi RumahTangga (IKRT) mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Desember 2018 di daerah pedesaan mengalami inflasi sebesar 0,65 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan diseluruh kelompok subsektor.

Tabel 2.3
 Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan Desember 2018
 (2012=100)

Kelompok	Subsektor					NTT
	Padipalawija	Hortikultura	TPR	Peternakan	Perikanan	
Umum/ KRT	0,67	0,61	0,74	0,59	0,47	0,65
BahanMakanan	0,89	0,77	1,02	0,75	0,65	0,86
MakananJadi	0,39	0,40	0,47	0,45	0,19	0,42
Perumahan	0,56	0,55	0,41	0,54	0,17	0,51
Sandang	1,21	1,16	1,25	1,13	1,31	1,19
Kesehatan	0,61	0,54	0,73	0,70	0,42	0,65
Pendidikan, Rekreasi, danOlahraga	0,09	0,26	0,06	0,08	0,05	0,11
TransportasidanKomunikasi	0,15	0,11	0,13	0,13	0,01	0,13

Inflasi year on year dan tahun kalender (Desember 2018 dibandingkan dengan Desember 2017) sebesar 2,65 persen.

Tabel 2.4
 Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan
 Periode November 2017- Desember 2018
 (2012=100)

Bulan	Kelompok							
	BahanMakanan	MakananJadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, &Olahraga	Transportasi &Komunikasi	Umum/KRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2017								
November	-0,48	0,39	0,22	0,23	0,42	-0,05	0,39	-0,09
Desember	0,87	-0,06	0,16	0,56	0,00	0,00	0,02	0,47
2018								
Januari	0,58	0,20	0,22	0,38	0,43	0,15	1,20	0,48
Februari	1,72	0,07	-0,22	0,04	0,77	0,14	0,07	0,88
Maret	-0,15	0,20	0,02	0,13	0,55	0,17	0,80	0,06
April	-0,38	0,07	0,12	-0,23	0,00	0,05	0,06	-0,17
Mei	-1,03	0,23	0,14	0,2	0,21	0,18	0,01	-0,43
Juni	-0,41	0,16	0,02	0,82	0,15	0,84	0,09	-0,08
Juli	0,05	0,63	0,19	0,34	0,11	0,42	0,38	0,23
Agustus	-0,85	0,44	0,35	0,30	0,13	0,80	0,16	-0,23
September	0,81	0,62	0,20	0,02	0,27	0,07	0,01	0,54
Oktober	0,58	0,82	0,54	0,42	0,03	0,46	0,95	0,61
November	-0,07	0,10	0,39	-0,04	0,22	0,17	0,26	0,07
Desember	0,86	0,42	0,51	1,19	0,65	0,11	0,13	0,65

F. Kebutuhan Petani Untuk Biaya Produksi

Kebutuhan petani untuk biaya produksi terdiri dari Bibit, obat-obatan dan pupuk, sewa lahan, pajak dan lainnya, transportasi, penambahan barang modal, upah buruh tani. Kebutuhan biaya produksi ini dihitung dalam bentuk Indeks Harga Biaya Produksi dan

Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara rata-rata mengalami peningkatan 0,31 persen dibanding November 2018. Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran seperti yang terlihat pada tabel 7, maka terjadi peningkatan indeks harga Bibit (0,18%) dan Pupuk, obat-obatan dan pakan (0,51%). Komoditas yang mengalami peningkatan harga antara lain; KCL, Bibit Jeruk, Bibit Cengkeh dan Pakan ternak.

Tabel 2.5
Indeks Harga BPPBM pada November-Desember 2018

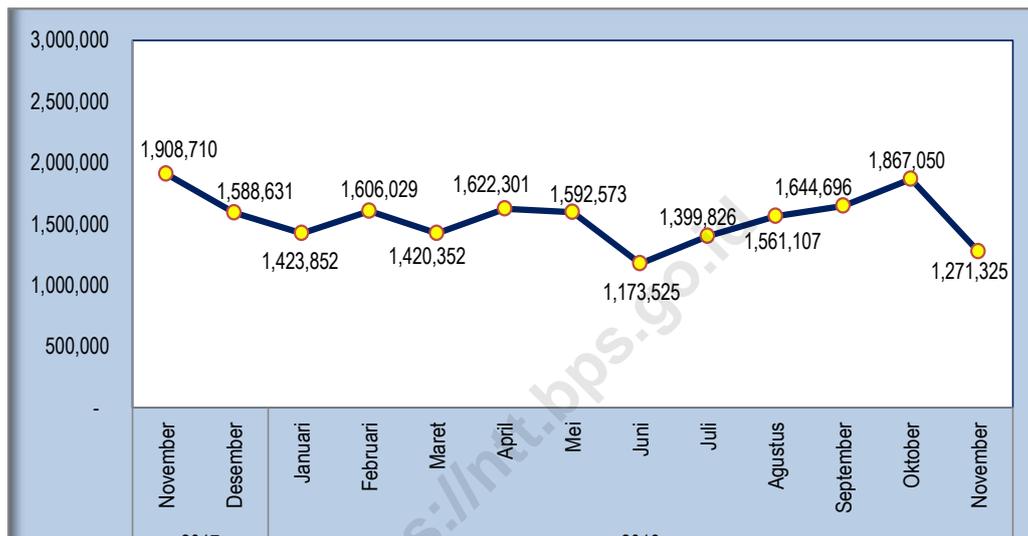
BPPBM	November	Desember	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
BPPBM	119,56	119,93	0,31
Bibit	114,45	114,65	0,18
Pupuk, Obat-obatan, dan Pakan	117,13	117,74	0,51
Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	111,22	111,23	0,01
Transportasi	132,05	131,95	-0,07
Penambahan Barang Modal	121,09	121,32	0,18
Upah Buruh	117,05	117,51	0,39

III. EKSPOR NOVEMBER 2018

A. Volume Dan Nilai Ekspor Bulan Oktober 2018*

Pada bulan November 2018, nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar US \$ 1.271.325 dengan volume sebesar 5.515,39 ton. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US \$ 185.259 dan ekspor non migas senilai US \$ 1.086.066. Nilai ekspor ini turun 31,91 persen atau berkurang senilai US \$ 595.725 jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Oktober 2018 sebesar US \$ 1.867.050. Bila dibandingkan dengan total ekspor pada periode yang sama pada bulan November tahun 2017 sebesar US \$ 1.908.710, maka terjadi penurunan sebesar 33,39 persen.

Gambar 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor NTT, November 2017-November 2018 (Dalam US \$)



*Angka Sementara

B. Pelabuhan Ekspor

Pada bulan November 2018 pengiriman komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui Pelabuhan Atapupu sebesar US \$ 1.271.325.

C. Negara Tujuan Ekspor

Pada bulan November 2018, komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur dikirim ke Timor Leste sebesar US \$ 1.271.325.

D. Komoditas Ekspor

Kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar pada bulan November 2018 adalah Garam, Belerang, Kapur (25) dengan nilai ekspor sebesar US \$ 191.928 atau 15,1 persen dari total ekspor.

Tabel 3.1
Ekspor NTT Menurut Beberapa Kelompok Komoditas, Oktober 2018-November 2018

KELOMPOK KOMODITAS	NILAI (US \$)		
	OKTOBER 2018	NOVEMBER 2018	% PERUBAHAN NOVEMBER 2018 THD OKTOBER 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Garam, Belerang, Kapur (25)	263.872	191.928	-27,26
Bahan Bakar Mineral (27)	262.422	185.259	-29,4
Kendaraan dan Bagiannya (87)	316.851	179.614	-43,31
Perabot, Penerangan Rumah (94)	225.947	118.933	-47,36
Minuman (22)	121.681	111.767	-8,15
Lainnya	676.278	483.824	-28,46
JUMLAH	1.867.050	1.271.325	-31,91

E. Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan

Pada bulan November 2018, komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur paling besar dikirim ke Vietnam sebesar US \$ 4.400.431.

Tabel 3.2.
Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan, November 2018

NEGARA TUJUAN	NILAI (US\$)
(1)	(2)
Vietnam	4.400.431
Timor Leste	1.271.325
Jepang	347.095
India	294.992
Singapura	116.546
Negara Lainnya	380.392
JUMLAH	6.810.781

F. Ekspor Provinsi Asal Menurut Komoditas

Kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar pada bulan November 2018 adalah Buah-buahan (08) dengan nilai ekspor sebesar US \$ 4.531.002.

Tabel 3.3
Ekspor Provinsi Asal Menurut Komoditas, November 2018

KOMODITAS	NILAI (US\$)
(1)	(2)
Buah-buahan (08)	4.531.002
Ikan dan udang (03)	431.229
Garam, belerang, kapur (25)	279.228
Kopi, Teh, Rempah-rempah (09)	226.468
Bahan Bakar Mineral (27)	185.259
Komoditas Lainnya	1.157.595
JUMLAH	6.810.781

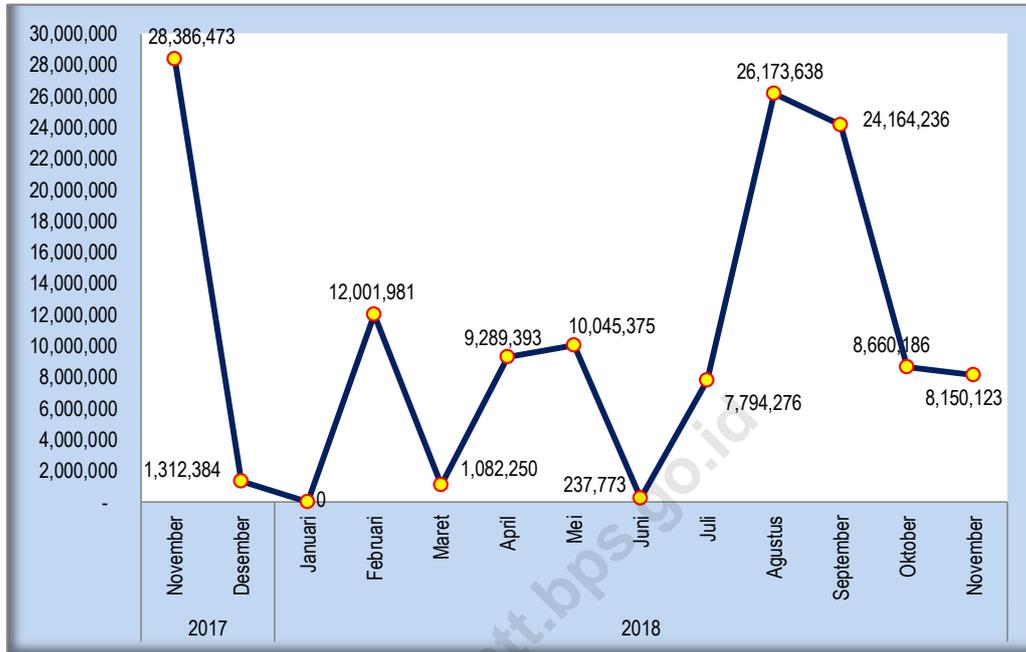
IV. IMPOR NOVEMBER 2018

A. Volume Dan Nilai Impor Bulan November 2018*

Pada bulan November 2018 nilai impor Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar US \$ 8.150.123 dengan volume sebesar 8.865,17 ton.

Gambar 4.1

Perkembangan Nilai Impor NTT, November 2017- November 2018 (Dalam US \$)



*Angka Sementara

B. Negara Asal Impor

Pada bulan November 2018 komoditas impor terbesar Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari Malaysia sebesar US \$ 4.028.000.

C. Komoditas Impor

Kelompok komoditas terbesar yang diimpor pada bulan November 2018 adalah Bahan Bakar Mineral (27) senilai US \$ 4.028.000.

Tabel 4.1
Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor) NTT, Tahun 2010 – 2018

PERIODE	NILAI EKSPOR(US\$)	NILAI IMPOR(US\$)	SELISIH (US\$)
2010	35.937.370	50.563.346	- 14.625.976
2011	26.806.053	14.072.322	12.733.731
2012	44.656.884	73.742.304	- 29.176.420
2013	21.236.947	27.055.314	-5.818.367
2014	20.785.147	31.919.488	-11.134.341
2015	23.938.131	7.872.784	16.065.347
2016	23.647.067	29.091.148	- 5.444.081
2017	22.683.281	73.706.153	- 51.022.872
2018*	16.582.636	107.599.231	- 91.016.595
Januari	1.423.852	0	1.423.852
Februari	1.606.029	12.001.981	- 10.395.952
Maret	1.420.352	1.082.250	338.102
April	1.622.301	9.289.393	- 7.667.092
Mei	1.592.573	10.045.375	-8.452.802
Juni	1.173.525	237.773	935.752
Juli	1.399.826	7.794.276	- 6.394.450
Agustus	1.561.107	26.173.638	- 24.612.531
September	1.644.696	24.164.236	- 22.519.540
Oktober	1.867.050	8.660.186	- 6.793.136
November	1.271.325	8.150.123	- 6.878.798

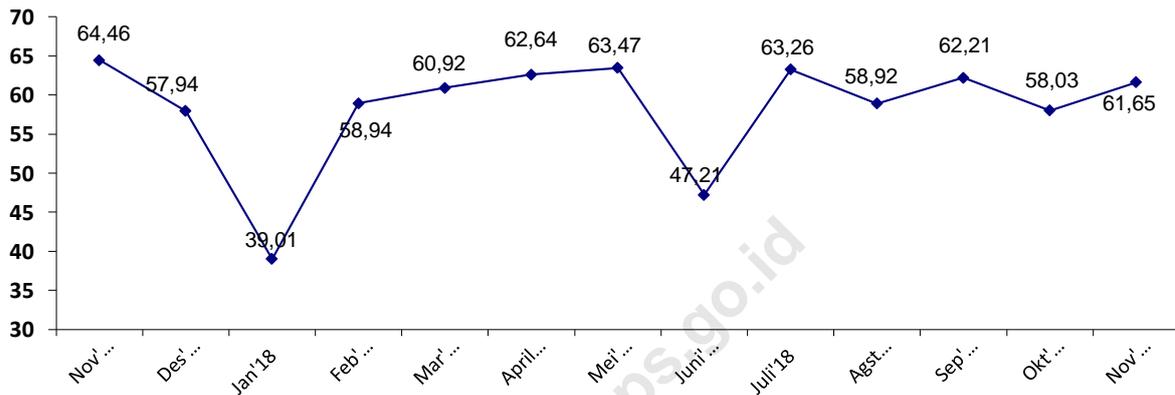
*Angka Sementara

V. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BINTANG NOVEMBER 2018

A. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK)

Pada bulan November 2018 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di NTT sebesar 61,65 persen, hal ini berarti dari seluruh kamar hotel bintang yang tersedia di NTT pada bulan November 2018 rata-rata terisi sekitar 61,65 persen. Angka TPK bulan November 2018 naik 3,62 poin dari TPK bulan Oktober 2018 sebesar 58,03 persen dan lebih rendah 2,81 poin dari November 2017 lalu yang sebesar 64,46 persen.

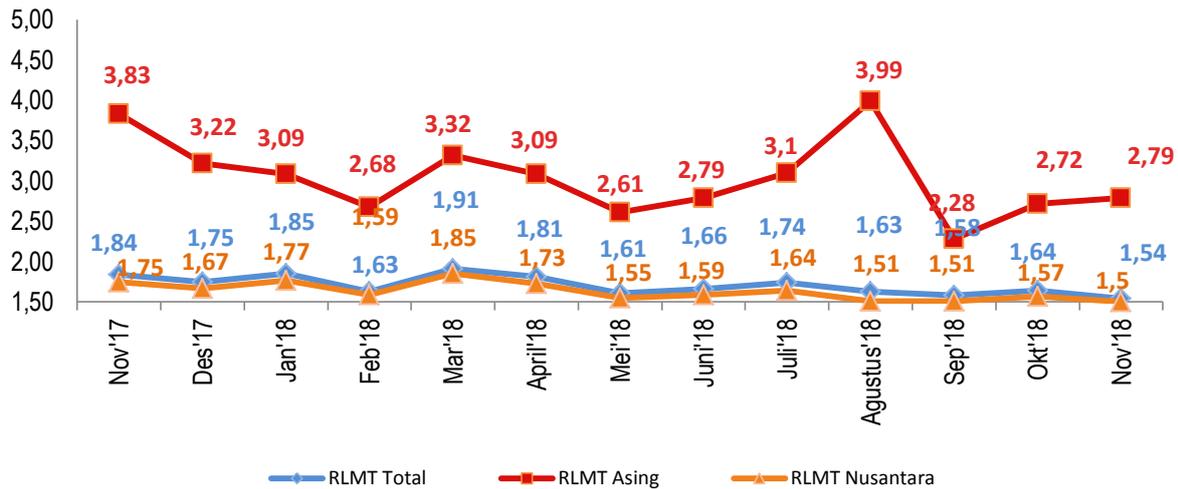
Gambar 5.1
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di NTT
November 2017 – November 2018 (%)



B. RATA-RATA LAMA MENGINAP

Rata-rata lama tamu menginap pada hotel bintang di NTT selama bulan November 2018 turun menjadi 1,54 hari dari rata-rata lama tamu menginap bulan Oktober 2018 sebesar 1,64 hari. Pada bulan November 2018 rata-rata lama menginap tamu mancanegara naik menjadi 2,79 hari dibandingkan pada bulan Oktober 2018 selama 2,72 hari. Rata-rata lama menginap tamu nusantara mengalami penurunan menjadi 1,50 hari pada bulan November 2018 dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 yaitu selama 1,57 hari.

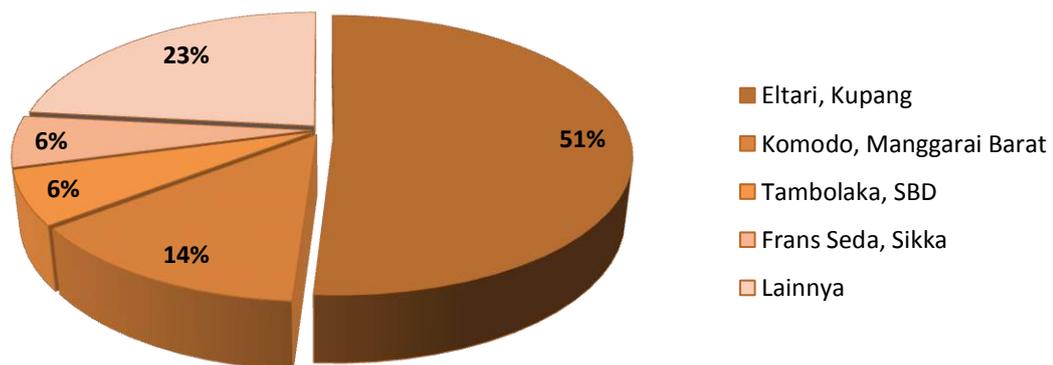
Gambar 5.2
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang di Provinsi NTT
November 2017 – November 2018



VI. PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA SIPIL NUSA TENGGARA TIMUR NOVEMBER 2018

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan November 2018 sebanyak 161.748 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 156.812 orang. Pada November 2018, empat bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat terbanyak adalah Bandara Eltari (51,03 persen), Komodo (13,53 persen), Tambolaka (6,23 persen), dan Frans Seda-Maumere (5,89 persen).

Gambar 6.1
Persentase Penumpang Angkutan Udara Menurut
Bandara Sipil di NTT, November 2018



Tabel 6.1
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT
Oktober – November 2018

NO	BANDARA	PENUMPANG DATANG			PENUMPANG BERANGKAT			JUMLAH PENUMPANG		
		Oktober	November	Perubahan (%)	Oktober	November	Perubahan (%)	Oktober	November	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eltari, Kota Kupang	91 569	84 788	-7.41	83 891	77 785	-7.28	175 460	162 573	-7.34
2.	Komodo, Manggarai Barat	24 829	21 235	-14.48	25 069	21 870	-12.76	49 898	43 105	-13.61
3.	H. H. Aroeboesman, Ende*)	7 936	7 936	0.00	8 797	8 797	0.00	16 733	16 733	0.00
4.	Tambolaka, Sumba Barat Daya	11 487	9 861	-14.16	10 891	9 972	-8.44	22 378	19 833	-11.37
5.	Frans Seda, Sikka	9 410	9 008	-4.27	9 618	9 747	1.34	19 028	18 755	-1.43
6.	Umbu Mehang Kunda, Sumba Timi	7 423	6 998	-5.73	7 866	7 100	-9.74	15 289	14 098	-7.79
7.	Mali, Alor	3 824	4 525	18.33	3 715	4 326	16.45	7 539	8 851	17.40
8.	Frans Sales Lega, Manggarai	1 555	1 266	-18.59	1 452	1 246	-14.19	3 007	2 512	-16.46
9.	Gewayantana, Flores Timur	4 000	3 912	-2.20	4 186	3 888	-7.12	8 186	7 800	-4.72
10.	Tureleleo, Ngada	3 220	3 821	18.66	3 761	3 661	-2.66	6 981	7 482	7.18
11.	Wunopito, Lembata	1 362	1 327	-2.57	1 367	1 189	-13.02	2 729	2 516	-7.81
12.	Terdamu, Sabu Raijua	570	497	-12.81	575	527	-8.35	1 145	1 024	-10.57
13.	A. A. Bere Tallo, Belu	5 272	4 326	-17.94	5 474	4 366	-20.24	10 746	8 692	-19.11
14.	Lekunik, Rote Ndao	2 892	2 248	-22.27	2 984	2 338	-21.65	5 876	4 586	-21.95
JUMLAH		175 349	161 748	-7.76	169 646	156 812	-7.57	344 995	318 560	-7.66

PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DI PINTU MASUK ATAMBUA

Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui pintu darat lintas batas Atambua pada bulan November 2018 sebanyak 8.207 orang, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,47% apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk pada bulan Oktober 2018 yaitu sebesar 8.246 orang.

VII. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2018

A. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2017-Maret 2018

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 1.142,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 4.510 orang (dari 1.015,70 ribu orang menjadi 1.020,21 ribu orang) dan untuk perkotaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2.910 orang (dari 119,04 ribu orang menjadi 121,95 ribu orang).

Tabel 7.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Maret 2018	121,95	9,94
Perdesaan		
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59
Maret 2018	1.020,21	24,74
Kota+Desa		
Maret 2017	1.150,79	21,85
September 2017	1.134,74	21,38
Maret 2018	1.142,17	21,35

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017, September 2017 dan Maret 2018

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2017 – Maret 2018:

- Selama periode September 2017 – Maret 2018 **inflasi umum sebesar 1,81 persen**.
- Tingkat **kesejahteraan petani cenderung meningkat** pada Bulan Maret 2018. Hal ini tercermin dari NTP Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2018 sebesar 104,48 meningkat 1,48 poin jika dibandingkan periode September 2017, yang sebesar 103,00.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di NTT pada Bulan Februari 2018 sebesar **2,98 persen**. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, yakni sebesar 1,46 juta (58,63 persen).

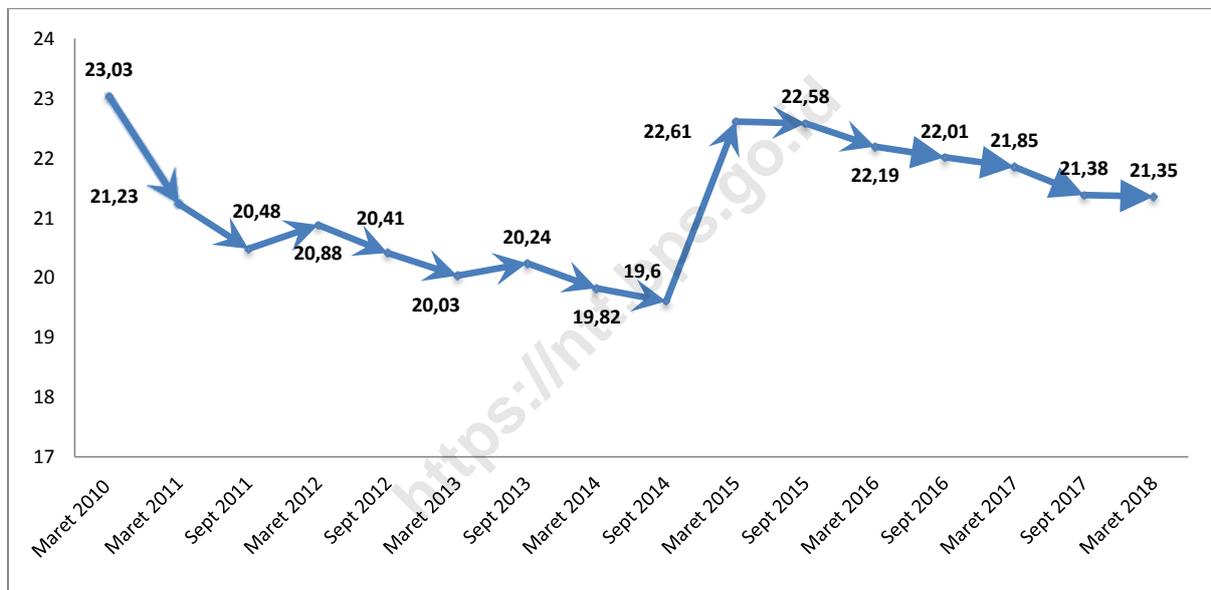
- d. *Gini Ratio* Provinsi NTT pada Maret 2018 sebesar 0,351, turun 0,008 poin dari periode September 2017 yang sebesar 0,359 .
- e. Pada periode November 2017 - Februari 2018, persentase rumah tangga penerima **raskin/rastra atau BPNT** sebesar 43,09 persen.
- f.

B. Perkembangan Kemiskinan Tahun 2010- Maret 2018

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2010 – Maret 2018 cenderung mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode Maret 2015 akan tetapi mulai bergerak turun secara perlahan. (lihat Gambar 7.1)

Gambar 7.1

Perkembangan Kemiskinan Provinsi NTT, 2010 - 2018



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

C. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2017 – Maret 2018

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 7.2

. Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
Maret 2017 – Maret 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2017	290.711	116.262	406.973
September 2017	292.048	117.333	409.382
Maret 2018	299.104	119.421	418.525
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	2,42	1,78	2,23
Perdesaan			
Maret 2017	268.004	58.316	326.320
September 2017	268.253	60.883	329.136
Maret 2018	273.466	63.119	336.584
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	1,94	3,67	2,26
Kota+Desa			
Maret 2017	272.537	70.859	343.396
September 2017	273.325	73.412	346.737
Maret 2018	278.911	75.987	354.898
Perubahan Sept'17-Mart'18 (%)	2,04	3,51	2,35

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017- Maret 2018

Periode September 2017– Maret 2018, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 2,35 persen, yaitu dari Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 354.898,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 78.83 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 78.59 persen.

Tabel 7.3

Daftar Komoditi Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan
Beserta Kontribusinya (%), Maret 2018

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	31,24	Beras	41,29
Rokok kretek filter	8,77	Rokok kretek filter	5,33
Gula Pasir	2,49	Gula pasir	3,48
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,11	Jagung pipilan/beras jagung	3,38
Roti	2,09	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	3,02
Telur Ayam Ras	2,08	Daun Ketela Pohon	2,80
Tongkol/Tuna/Cakalang	1,99	Daging Babi	1,97
Mie Instan	1,69	Roti	1,73
Daun Ketela Pohon	1,44	Mie Instan	1,62
Bukan Makanan			
Perumahan	10,38	Perumahan	7,14
Pendidikan	2,56	Kayu Bakar	1,75
Bensin	2,12	Pendidikan	1,28
Listrik	2,05	Bensin	1,28
Perlengkapan mandi	1,33	Perlengkapan Mandi	0,92
Angkutan	1,32	Listrik	0,80
Minyak Tanah	1,30	Angkutan	0,70
Kayu Bakar	1,25	Sabun cuci	0,55
Air	0,90	Kesehatan	0,49

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2018

Pada Maret 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok dan gula pasir. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, pendidikan, kayu bakar, perlengkapan mandi, bensin, listrik dan angkutan. Komoditi beras memberikan kontribusi terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan dan disusul rokok kretek filter yang memiliki kontribusi terbesar kedua.

D. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan

kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan”

Pada periode September 2017 - Maret 2018, Baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terlihat mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,158 pada September 2017 menjadi 3,908 pada Maret 2018. Demikian halnya Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,174 menjadi 1,026 pada periode yang sama.

Jika diamati secara total pada periode Maret 2017 – Maret 2018, penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 7.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di NTT
Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2017	1,823	5,034	4,340
September 2017	1,815	4,826	4,158
Maret 2018	1,605	4,593	3,908
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
Maret 2017	0,483	1,354	1,166
September 2017	0,469	1,375	1,174
Maret 2018	0,363	1,224	1,026

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017 – Maret 2018

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada periode September 2017 – Maret 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) daerah perkotaan mengalami penurunan dari 1,815 menjadi 1,605 dan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan juga turun dari 0,469 menjadi 0,363. Pada periode yang sama nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan mempunyai pola yang sama yaitu turun dari 4,826 menjadi 4,593. Demikian juga nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk daerah perdesaan turun dari 1,375 menjadi 1,224.

E. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret dan September. Jumlah sampel sebesar ± 75.000 rumah tangga secara nasional dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

VIII. KEADAAN KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2018

A. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2018 meningkat 1,08 poin yaitu dari 69,09 persen pada Agustus 2017 menjadi 70,17 persen pada Agustus 2018. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 67,26 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki sebesar 80,96 persen lebih tinggi dibanding perempuan 59,86 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2018 mencapai 2,41 juta orang, bertambah 91,5 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2017 sebesar 2,32 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 sebesar 3,01 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,26 poin dibanding Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 8.1

Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Februari 2017 – Agustus 2018

Jenis Kegiatan Utama	2017		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angkatan Kerja	2.503.057	2.398.609	2.559.204	2.486.281
Bekerja	2.422.809	2.320.061	2.482.878	2.411.533
Penganggur	80.248	78.548	76.326	74.748
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,82	69,09	73,00	70,17
Laki-laki	82,47	80,00	82,46	80,96
Perempuan	63,60	58,65	63,94	59,86
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,21	3,27	2,98	3,01
Perkotaan	4,61	8,66	5,42	6,96
Perdesaan	2,83	1,93	2,30	1,95

B. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015 pada Agustus 2018 relatif sama dengan Agustus 2017 dimana sebagian besar penduduk menekuni kategori A Pertanian sebesar 1,32 juta orang (54,73 persen), diikuti kategori E Perdagangan sebesar 0,23 juta orang (9,64 persen), kategori C Industri sebesar 0,22 juta orang (8,96 persen), kategori P Jasa Pendidikan sebesar 0,13 juta (5,47 persen), dan kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,12 juta orang (5,12 persen). Sebaliknya kategori yang paling sedikit menampung pekerja adalah gabungan kategori Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan (J,K,M,N) sebesar 38,5 ribu orang (1,60 persen) dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) sebesar 35,6 ribu orang (1,48 persen).

Tabel 8.2
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kategori Lapangan Pekerjaan Utama pada Februari 2017 - Agustus 2018

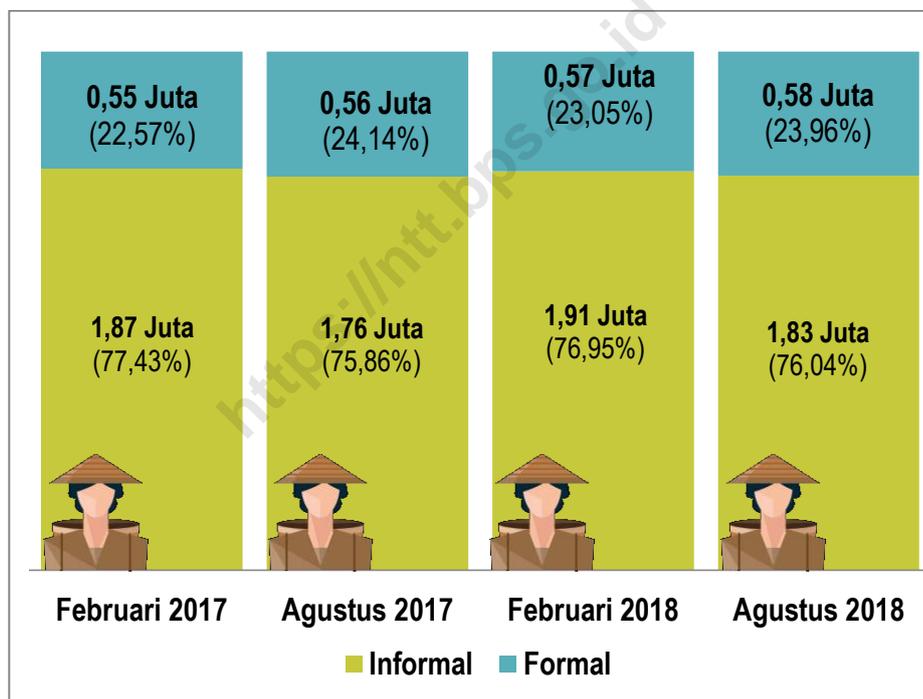
Kategori	2017		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.443.116	1.271.534	1.455.828	1.319.772
B,D,E Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas, Dan Air	32.837	33.559	36.311	41.017
C Industri Pengolahan	149.953	208.484	160.353	216.175
F Konstruksi	80.207	97.965	82.637	106.751
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	227.555	227.357	236.782	232.586
H,I Transportasi dan Akomodasi	125.793	117.414	119.721	118.416
J,K,L,M,N Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; dan Jasa Perusahaan	42.167	39.791	35.039	38.560
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	123.064	116.034	136.998	123.411
P Jasa Pendidikan	128.925	131.401	135.209	131.811
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.593	32.189	43.785	35.616
R,S,T,U Jasa Lainnya	32.599	44.333	40.215	47.418

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Bila dilihat menurut status pekerja, penduduk bekerja dapat dikelompokkan menjadi penduduk bekerja di sektor formal dan penduduk bekerja di sektor informal. Dari data terlihat indikasi belum adanya perubahan signifikan pada status pekerja dibandingkan dengan periode sebelumnya Agustus 2017 dimana pada Agustus 2018 status formal di NTT hanya sebesar 23,96 persen, dan pekerja informal NTT sebesar 76,04 persen.

Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 28,02 persen, diikuti Pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 26,51 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 1,97 persen dan Buruh/Karyawan/Pegawai yang sebesar 21,98 persen. Secara keseluruhan sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas pekerja di NTT. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk NTT yang bekerja belum memiliki jaminan sosial yang baik. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal.

Gambar 8.1
Pekerja Sektor Formal dan Informal NTT pada Februari 2017 – Agustus 2018

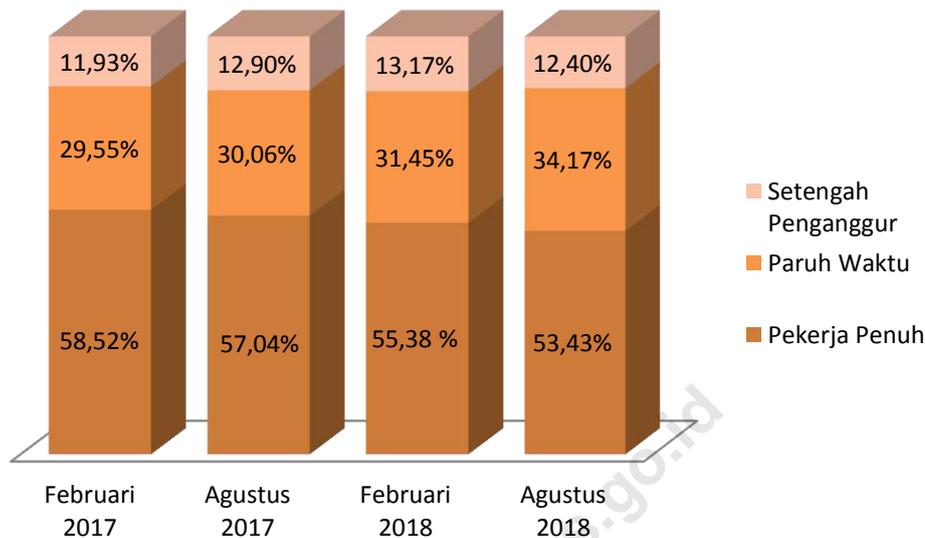


D. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Semakin tinggi tingkat pekerja tidak penuh maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Pekerja tidak penuh terbagi atas pekerja paruh waktu (freelance) dan setengah penganggur. Tingginya setengah penganggur merupakan permasalahan ketenagakerjaan tersendiri karena bekerja dibawah kapasitas optimalnya.

Dari 2,41 juta orang yang bekerja pada Agustus 2018 terdapat 46,57 persen pekerja tidak penuh, naik 3,61 persen dibanding Agustus 2017 yang sebesar 42,96 persen. Pekerja tidak penuh NTT terdiri dari 298,9 ribu orang (26,62 persen) setengah penganggur dan 824,1 ribu orang (73,38 persen) pekerja paruh waktu

Gambar 8.2
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Februari 2017 – Agustus 2018



E. Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Menurut Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan tenaga kerja dapat mencerminkan kualitas tenaga kerja. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran.

Dari 2,41 juta orang yang bekerja pada Agustus 2018, sebagian besar bekerja dengan pendidikan kurang dari atau sama dengan SD yaitu sebesar 56,78 persen. Selain itu komposisi pendidikan dari penduduk bekerja yaitu SMP (12,50 persen), SMA Umum (14,61 persen), SMA Kejuruan (5,83 persen), Diploma I/II/III (2,36 persen) dan Universitas (7,92 persen). Dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT terendah adalah yang berpendidikan SD kebawah sebesar 0,85 persen dan SMP sebesar 1,78 persen. Sedangkan TPT tertinggi dengan pendidikan Universitas sebesar 7,81 persen selanjutnya SMA Umum sebesar 7,54 persen

Tabel 8.3
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Dan Menganggur
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Februari 2017 – Agustus 2018 (jiwa)

Pendidikan Tertinggi yg ditamatkan	Jenis Kegiatan	2017		2018		TPT Agustus 2018
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	
<= SD	1.Bekerja	1.384.564	1.343.766	1.389.886	1.369.339	
	2.Pengangguran	24.355	14.985	14.774	11.803	0,85
	Angkatan Kerja	1.408.919	1.358.751	1.404.660	1.381.142	
SMP	1.Bekerja	311.585	308.646	324.521	301.438	
	2.Pengangguran	8.698	7.116	2.993	5.452	1,78
	Angkatan Kerja	320.283	315.762	327.514	306.890	
SMA Umum	1.Bekerja	362.138	319.502	362.607	352.242	
	2.Pengangguran	18.663	24.513	27.421	28.739	7,54
	Angkatan Kerja	380.801	344.015	390.028	380.981	
SMA Kejuruan	1.Bekerja	129.757	115.950	135.668	140.601	
	2.Pengangguran	5.874	10.611	7.122	8.419	5,65
	Angkatan Kerja	135.631	126.561	142.790	149.020	
Diploma I/II/III	1.Bekerja	61.141	52.125	71.309	56.899	
	2.Pengangguran	4.184	4.246	7.694	4.157	6,81
	Angkatan Kerja	65.325	56.371	79.003	61.056	
Universitas	1.Bekerja	173.624	180.072	198.887	191.014	
	2.Pengangguran	18.474	17.077	16.322	16.178	7,81
	Angkatan Kerja	192.098	197.149	215.209	207.192	

F. Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Menurut Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota, TPT terendah di kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 0,85 persen, diikuti Timor Tengah Selatan sebesar 1,01 persen dan Sumba Barat Daya 1,01 persen. Sebaliknya TPT tertinggi yaitu Kota Kupang 10,17 persen, diikuti Lembata 5,40 persen, dan Belu 5,26 persen. TPAK tertinggi di Sumba Barat Daya sebesar 79,68 persen sedangkan terendah di Kota Kupang sebesar 57,67 persen.

.Tabel 8.4
Penduduk NTT Usia 15 Tahun Menurut TPT dan TPAK
Agustus 2018 di Kabupaten/Kota

Kabupaten	TPT	TPAK
(1)	(2)	(3)
5301 Sumba Barat	4,06	63,97
5302 Sumba Timur	1,42	77,08
5303 Kupang	2,71	69,94
5304 Timor Tengah Selatan	1,01	75,96
5305 Timor Tengah Utara	0,85	75,04
5306 Belu	5,26	65,62
5307 Alor	4,09	65,83
5308 Lembata	5,40	68,06
5309 Flores Timur	4,01	68,98
5310 Sikka	2,43	70,63
5311 Ende	2,89	73,63
5312 Ngada	2,11	70,89
5313 Manggarai	3,21	73,14
5314 Rote Ndao	2,11	72,98
5315 Manggarai Barat	1,19	67,24
5316 Sumba Tengah	3,57	63,40
5317 Sumba Barat Daya	1,01	79,68
5318 Nagekeo	1,88	63,80
5319 Manggarai Timur	1,57	67,88
5320 Sabu Raijua	2,12	75,72
5321 Malaka	3,79	71,76
5371 Kota Kupang	10,17	57,67
Nusa Tenggara Timur	3,01	70,17

.Tabel 8.5

Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Agustus 2018

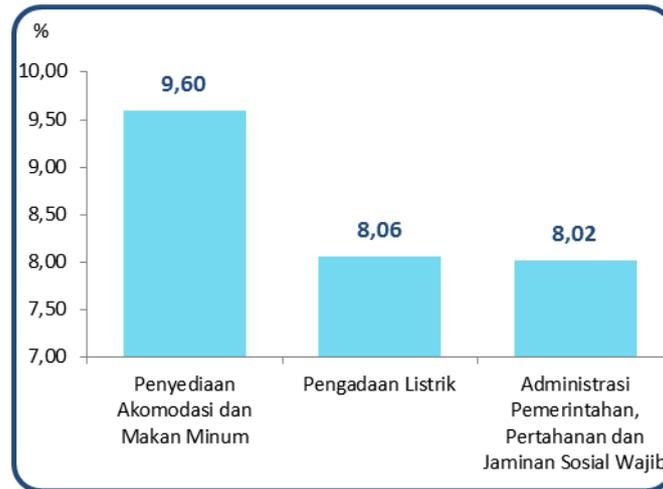
Kabupaten	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Total
5301 Sumba Barat	48.929	2.071	11.680	15.146	1.893	51.000	28.719	79.719
5302 Sumba Timur	128.308	1.852	10.678	22.913	5.114	130.160	38.705	168.865
5303 Kupang	175.856	4.895	25.196	42.471	10.030	180.751	77.697	258.448
5304 Timor Tengah Selatan	229.827	2.334	22.280	42.186	8.996	232.161	73.462	305.623
5305 Timor Tengah Utara	124.397	1.067	17.323	21.355	3.059	125.464	41.737	167.201
5306 Belu	87.936	4.878	16.586	28.831	3.211	92.814	48.628	141.442
5307 Alor	85.566	3.651	15.195	23.734	7.375	89.217	46.304	135.521
5308 Lembata	60.967	3.483	8.152	18.291	3.801	64.450	30.244	94.694
5309 Flores Timur	113.588	4.742	15.746	29.912	7.553	118.330	53.211	171.541
5310 Sikka	152.391	3.801	19.913	35.995	9.038	156.192	64.946	221.138
5311 Ende	136.020	4.044	14.722	29.928	5.507	140.064	50.157	190.221
5312 Ngada	73.815	1.592	12.315	11.895	6.749	75.407	30.959	106.366
5313 Manggarai	149.572	4.956	28.103	21.020	7.636	154.528	56.759	211.287
5314 Rote Ndao	79.486	1.714	9.341	17.190	3.525	81.200	30.056	111.256
5315 Manggarai Barat	110.731	1.329	17.762	30.978	5.855	112.060	54.595	166.655
5316 Sumba Tengah	27.171	1.007	4.346	10.030	1.888	28.178	16.264	44.442
5317 Sumba Barat Daya	155.953	1.585	17.182	18.798	4.207	157.538	40.187	197.725
5318 Nagekeo	60.634	1.164	7.708	20.731	6.621	61.798	35.060	96.858
5319 Manggarai Timur	119.397	1.906	17.120	36.077	4.206	121.303	57.403	178.706
5320 Sabu Raijua	44.605	966	6.712	5.452	2.449	45.571	14.613	60.184
5321 Malaka	83.831	3.303	14.434	15.403	4.459	87.134	34.296	121.430
5371 Kota Kupang	162.553	18.408	75.913	49.462	7.461	180.961	132.836	313.797
Nusa Tenggara Timur	2.411.533	74.748	388.407	547.798	120.633	2.486.281	1.056.838	3.543.119

IX. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2018

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018 Terhadap Triwulan III-2017 (y-on-y)

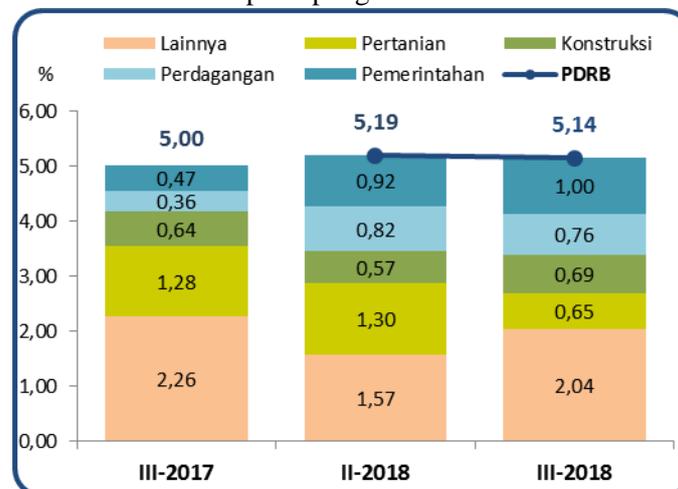
Gambar 9.1
Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2018 (y-on-y)



Ekonomi NTT triwulan III-2018 dibandingkan dengan triwulan III-2017 tumbuh sebesar 5,14 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 9,60 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,06 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,02 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan III-2018 dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 13,31 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,14 persen.

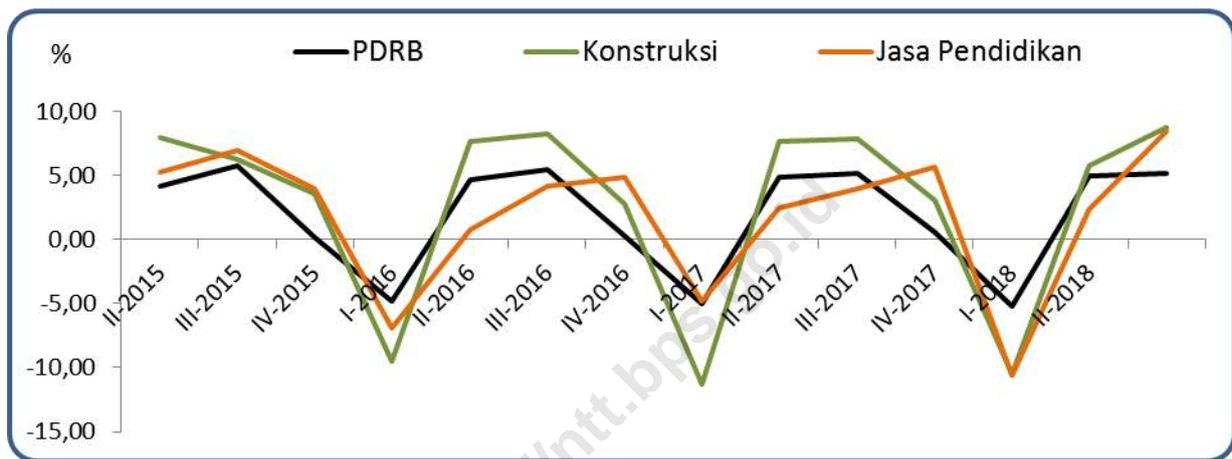
Gambar 9.2
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2018 (y-on-y)



Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III-2018, maka lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 1,00 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan lapangan usaha Konstruksi masing-masing sebesar 0,76 persen dan 0,69 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018 Terhadap Triwulan II-2018 (q-to-q)

Gambar 9.3
Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan III-2018 (q-to-q)



Ekonomi NTT triwulan III-2018 dibandingkan terhadap triwulan II-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Pada triwulan III-2018 seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,78 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masing-masing sebesar 8,42 persen dan 6,89 persen.

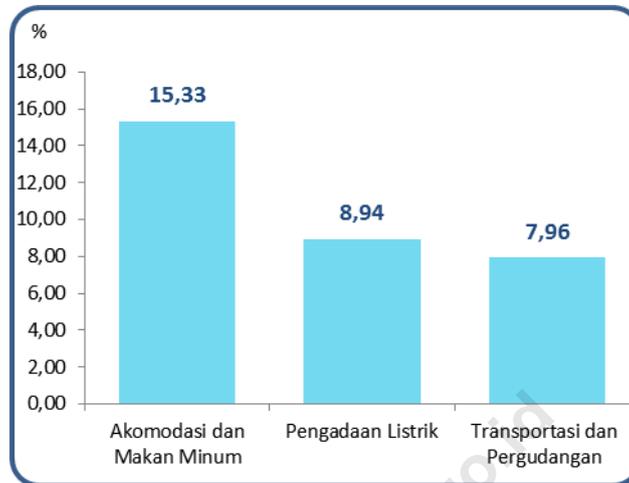
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-III 2018 Terhadap Triwulan I-III 2017 (c-to-c)

Perekonomian NTT triwulan I-III tahun 2018 tumbuh sebesar 5,14 persen. Secara umum terjadi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan terbesar pada triwulan I-III tahun 2018 terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 15,33 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,94 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,96 persen. Struktur ekonomi menurut lapangan usaha pada triwulan I sampai dengan triwulan III 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,92 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,13 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,12 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I-III 2018, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,93 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,87 persen dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,79 persen

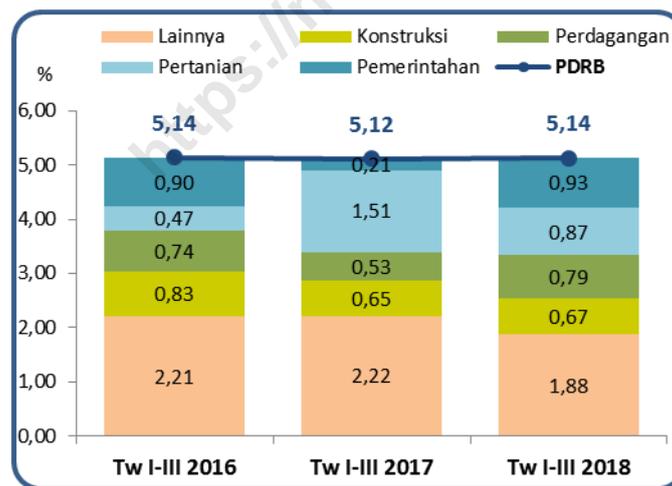
Gambar 9.4

Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-III 2018 (c-to-c)



Gambar 9.5

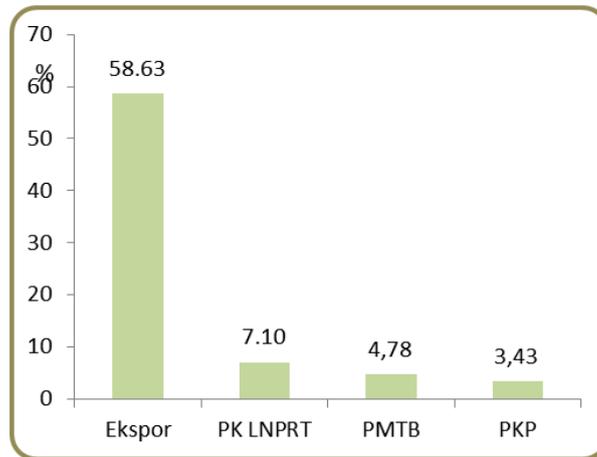
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-III 2018 (c-to-c)



B. PDRB MENURUT PENGELUARAN

Gambar 9.6

Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran
Triwulan III-2018 (y-on-y) (%)

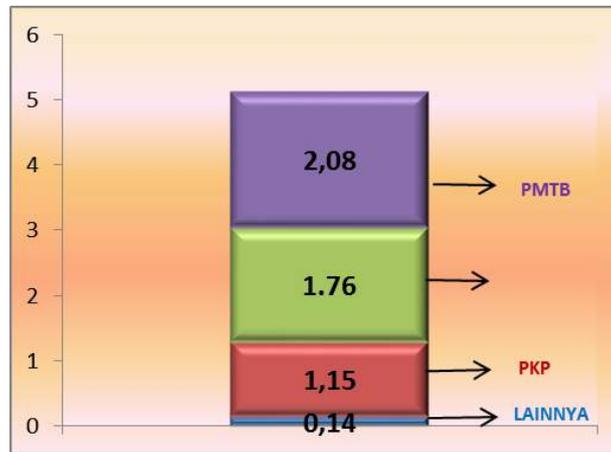


Dari sisi Pengeluaran, komponen dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III-2018 dibandingkan dengan triwulan III-2017 adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 58,63 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 7,10 persen. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,78 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 3,43 persen, lalu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,36 persen.

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (66,94 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,76 persen); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (36,09 persen), dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,15 persen), sedangkan Perubahan Inventori (0,96 persen) relatif kecil.

Gambar 9.7

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2018 (y-on-y) (%)

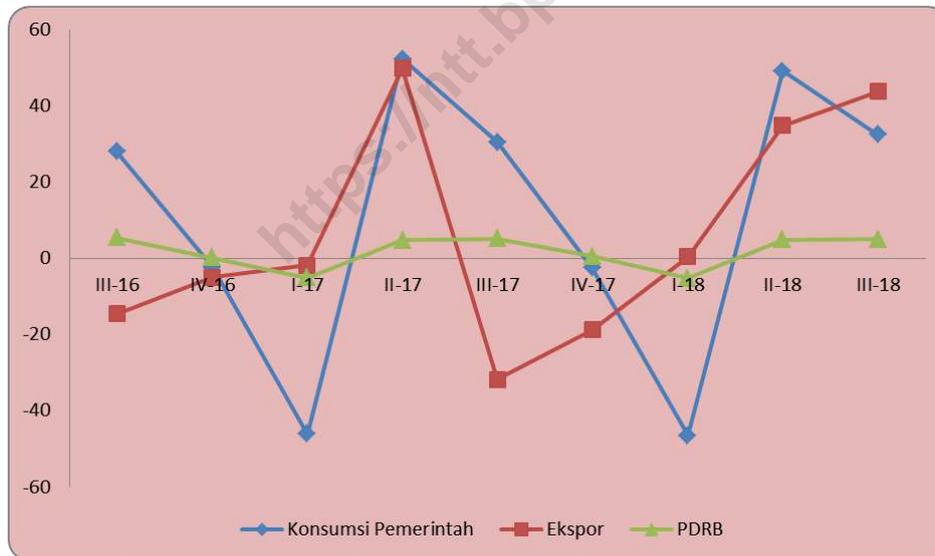


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III-2018 (y-on-y), maka Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,08 persen, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,76 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,15 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018 Terhadap Triwulan II-2018 (q-to-q)

Gambar 9.8

Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2018 (q-to-q) (%)



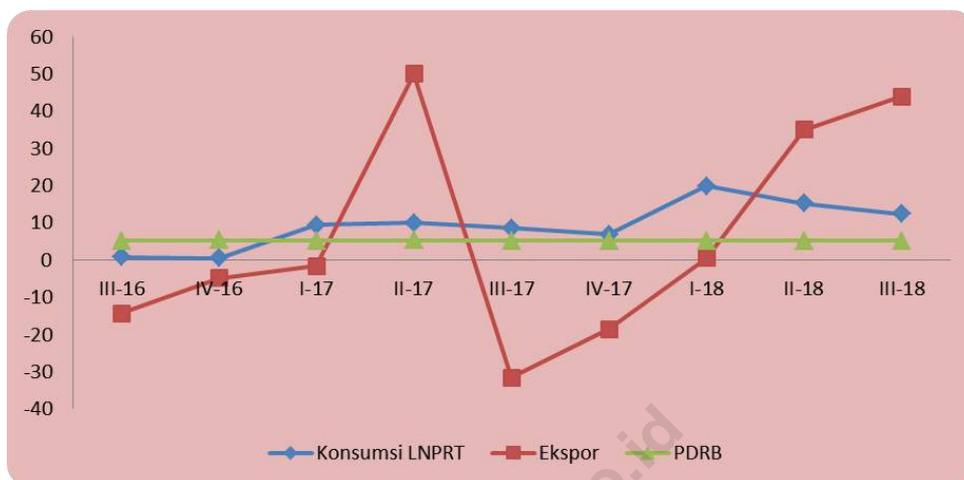
Ekonomi NTT triwulan III-2018 terhadap triwulan II-2018 (q-to-q) bertumbuh sebesar 5,11 persen. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan positif yang terjadi di hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Impor Barang dan Jasa dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Ekspor

Barang dan Jasa dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 43,87 persen dan 32,49 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018 Terhadap Triwulan III-2018 (c-to-c)

Gambar 9.9

Pertumbuhan Beberapa Komponen Semester I 2018 (c-to-c)



Tabel 9.1
 PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
 (Miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Tw III-2017	Tw II-2018	Tw III-2018	Tw III-2017	Tw II-2018	Tw III-2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6 903	7 148	7 407	4 554	4 576	4 660
B	Pertambangan dan Penggalian	301	292	306	228	221	231
C	Industri Pengolahan	296	305	312	207	207	209
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17	18	19	12	12	13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13	13	13	10	11	11
F	Konstruksi	2 566	2 575	2 836	1 798	1 756	1 910
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 618	2 701	2 882	1 879	1 891	2 003
H	Transportasi dan Pergudangan	1 291	1 332	1 415	851	859	911
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178	191	198	116	123	127
J	Informasi dan Komunikasi	1 562	1 572	1 707	1 401	1 400	1 496
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	945	997	1 030	629	640	652
L	Real Estat	603	626	653	406	415	431
M,N	Jasa Perusahaan	73	72	75	44	43	45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 065	3 202	3 442	2 031	2 053	2 194
P	Jasa Pendidikan	2 303	2 262	2 491	1 387	1 340	1 453
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	495	522	546	351	360	377
R,S,T,U	Jasa Lainnya	504	517	532	348	351	366
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		23 730	24 346	25 864	16 252	16 258	17 088

Tabel 9.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
(persen)

Lapangan Usaha	Tw III-2018 terhadap Tw II-2018 (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan Tw III-2018 (q-to-q)	Tw III-2018 terhadap Tw III-2017 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Tw III-2018 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,83	0,52	2,33	0,65
B Pertambangan dan Penggalian	4,14	0,06	1,05	0,01
C Industri Pengolahan	0,92	0,01	0,90	0,01
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	0,00	8,06	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,71	0,00	2,75	0,00
F Konstruksi	8,78	0,95	6,23	0,69
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,93	0,69	6,56	0,76
H Transportasi dan Pergudangan	6,09	0,32	7,07	0,37
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	0,03	9,60	0,07
J Informasi dan Komunikasi	6,89	0,59	6,81	0,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96	0,08	3,64	0,14
L Real Estat	3,76	0,10	6,27	0,16
M,N Jasa Perusahaan	5,51	0,01	2,36	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,88	0,87	8,02	1,00
P Jasa Pendidikan	8,42	0,69	4,78	0,41
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,55	0,10	7,28	0,16
R,S,T,U Jasa Lainnya	4,16	0,09	5,08	0,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,11	5,11	5,14	5,14

Tabel 9.3

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2017,
Triwulan II-2018 dan Triwulan III-2018
(persen)

Lapangan Usaha	Triwulan III-2017	2018	
		Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,09	29,36	28,64
B Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,20	1,18
C Industri Pengolahan	1,25	1,25	1,21
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
F Konstruksi	10,81	10,58	10,97
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,03	11,09	11,14
H Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,47	5,47
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,79	0,77
J Informasi dan Komunikasi	6,58	6,46	6,60
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,10	3,98
L Real Estat	2,54	2,57	2,52
M,N Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,29
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,92	13,15	13,31
P Jasa Pendidikan	9,70	9,29	9,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,14	2,11
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,12	2,12	2,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00

Tabel 9.4

PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw III-2017	Triw II-2018	Triw III-2018	Triw III-2017	Triw II-2018	Triw III-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.647,7	17.249,9	17.314,3	12.154,9	12.230,0	12.441,4
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	747,8	824,6	814,0	562,2	603,4	602,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.273,1	7.085,0	9.334,3	5.461,6	4.263,7	5.649,1
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9.846,2	10.189,8	10.801,3	7.068,0	7.053,0	7.406,1
5. Perubahan Inventori	164,5	234,0	248,8	101,9	140,5	149,0
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.044,1	2.373,8	3.476,6	1.350,4	1.489,0	2.142,1
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	13.993,1	13.611,0	16.125,7	10.446,4	9.521,8	11.301,7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	23.730,3	24.346,1	25.863,7	16.252,5	16.257,8	17.088,0

Tabel 9.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
(persen)

Komponen	Triw II-2018	Triw III-2018	Triw II-2018	Triw III-2018	Triw I-III-2018	Sumber Pertumbuhan
	Terhadap Triw I-2018 (q-to-q)	terhadap Triw II-2018 (q-to-q)	terhadap Triw II-2017 (y-on-y)	terhadap Triw III-2017 (y-on-y)	terhadap Triw I-III-2017 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,37	1,73	2,22	2,36	2,89	1,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,73	-0,22	10,91	7,10	12,34	0,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	49,15	32,49	1,93	3,43	3,08	1,15
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	12,79	5,01	4,61	4,78	3,94	2,08
5. Perubahan Inventori	46,93	6,05	50,86	46,20	48,11	0,29
6. Ekspor Barang dan Jasa	34,91	43,87	-24,63	58,63	9,17	5,07
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,21	18,69	-5,23	8,19	1,61	5,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	4,97	5,11	5,19	5,14	5,14	5,14

Tabel 9.6

Struktur PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II dan III Tahun 2017-2018
(persen)

Komponen	2017		2018	
	Triw II	Triw III	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	73,79	70,15	70,85	66,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,23	3,15	3,39	3,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29,69	34,86	29,10	36,09
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	41,90	41,49	41,85	41,76
5. Perubahan Inventori	0,67	0,69	0,96	0,96
6. Ekspor Barang dan Jasa	13,41	8,61	9,75	13,44
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62,68	58,97	55,91	62,35
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

X. LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI 2018

A. Pendahuluan

Ketidakakuratan data produksi padi telah diduga oleh banyak pihak sejak 1997. Studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1998 telah mengisyaratkan overestimasi luas panen sekitar 17,07 persen. [Sumber: BPS, Survei Luas Tanaman Padi Dengan Pendekatan Rumah tangga di Jawa Tahun 1996/97]. Begitu pula dengan perhitungan luas lahan baku sawah yang cenderung meningkat—walaupun fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pengalihan fungsi lahan untuk industri, perumahan atau infrastruktur, meskipun di sisi lain juga ada proses pencetakan sawah.

Walaupun sudah diduga sejak lama, namun upaya untuk memperbaiki metodologi perhitungan produksi padi baru dilakukan pada tahun 2015. BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berupaya memperbaiki metodologi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA merupakan metode perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras. Secara garis besar, tahapan dalam perhitungan produksi beras adalah:

1. Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional dengan menggunakan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 adalah sebesar 7.105.145 hektar. Sebagai perbandingan, luas lahan baku sawah nasional menurut SK Kepala BPN-RI No. 3296/Kep-100.18/ IV/2013 tanggal 23 April 2013 adalah 7.750.999 hektar.

2. Menetapkan Luas Panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah

mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3. Menetapkan Produktivitas per Hektar. BPS juga melakukan penyempurnaan metodologi dalam menghitung produktivitas per hektar, dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis sampel KSA.

4. Menetapkan Angka Konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan Angka Konversi dari GKG ke Beras. Penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei yang dilakukan oleh BPS di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi. Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional.

Keempat tahapan tersebut telah selesai disempurnakan.

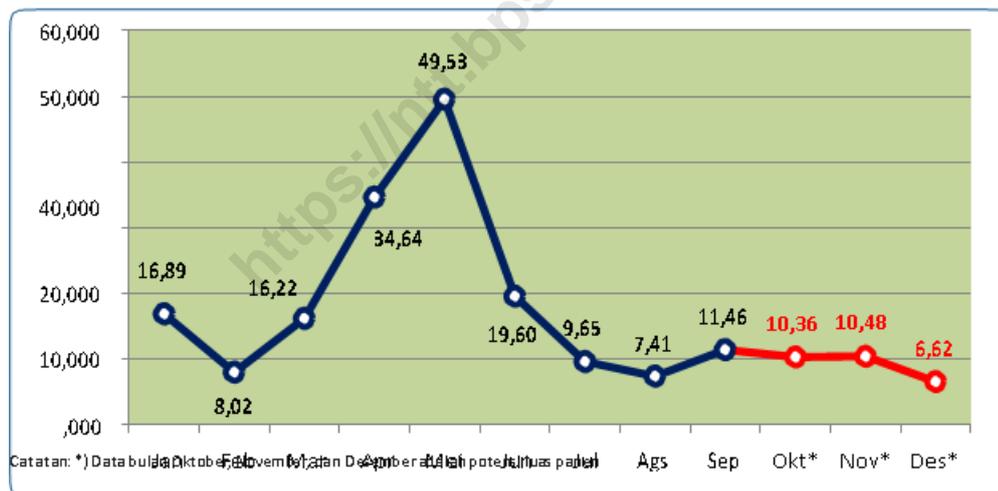
B. Luas Panen dan Produksi Padi di Nusa Tenggara Timur

1. Luas Panen Padi di NTT 2018

Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di NTT periode Januari–September 2018 sebesar 173,42 ribu hektar. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 49,53 ribu hektar, sementara luas panen terendah dalam periode Januari–September terjadi pada bulan Agustus dengan luas panen sebesar 7,41 ribu hektar. Sementara itu luas panen padi pada September 2018 sebesar 11,45 ribu hektar, mengalami kenaikan sebesar 54,55 persen dibandingkan luas panen pada bulan Agustus 2018.

Selain menghitung luas panen pada saat pengamatan berdasarkan fase tumbuh tanaman padi, survei KSA juga dapat menghitung potensi luas panen hingga tiga bulan ke depan. Berdasarkan hasil survei KSA pengamatan September, potensi luas panen pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 10,36 ribu hektar, 10,48 ribu hektar, dan 6,62 ribu hektar. Dengan demikian, total luas panen 2018 adalah sebesar 200,88 ribu hektar.

Gambar 10.1
Perkembangan Luas Panen Padi di NTT, Januari–Desember*) 2018



2. Produksi Padi di NTT 2018

Produksi Padi di NTT dari Januari hingga September 2018 sebesar 690,82 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 189,24 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 28,04 ribu ton. Sementara itu, potensi produksi padi pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 42,33 ribu ton, 43,29 ribu ton, dan 24,55 ribu ton. Dengan demikian, perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 800,98 ribu ton.

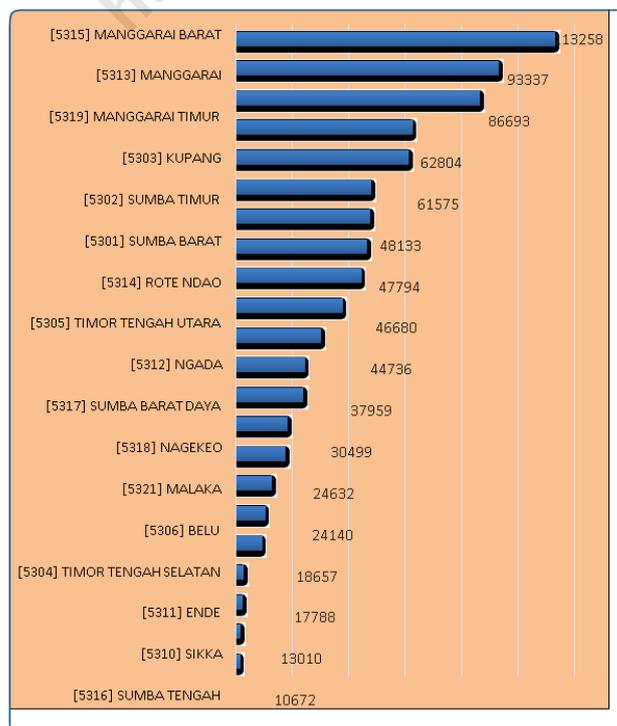
Gambar 10.2
Perkembangan Produksi Padi (GKG) di NTT, Januari–Desember*) 2018



Catatan: **Produksi Padi** = Luas Panen x Produktivitas;
Produktivitas menggunakan Angka Ubinan kondisi 18 Oktober 2018;
Luas panen menggunakan luas panen bersih setelah memperhitungkan nilai konversi galangan;
Konversi GKP ke GKG menggunakan hasil Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) 2018
 *) Data bulan Oktober, November, dan Desember adalah potensi produksi padi

Tiga kabupaten dengan produksi padi (GKG) tertinggi terjadi di Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur dengan produksi masing-masing sebesar 113,26 ribu ton, 93,34 ribu ton, dan 86,69 ribu ton.

Gambar 10.3
Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di NTT, Januari–Desember*) 2018 (Ton-GKG)



C. Penjelasan Teknis

1. Menetapkan Luas Bahan Baku Sawah Nasional

Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah disempurnakan melalui verifikasi 2 tahap. Verifikasi tahap pertama menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi. Pemanfaatan citra satelit dalam statistik pangan telah dibahas dalam lokakarya internasional yang melibatkan FAO, IFPRI, Kementerian Pertanian, BPPT, MAPIN, IRRI, BPS, dan BIG di Kantor Staf Presiden pada tanggal 27 November 2017. Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari LAPAN yang kemudian diolah oleh BIG menggunakan metode *Cylindrical Equal Area* (CEA) untuk dilakukan pemilahan dan deliniasi antara lahan baku sawah dan bukan sawah. Metode ini menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/ BPN. Masukan informasi dari hasil KSA BPS juga digunakan dalam validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Sampai saat ini, verifikasi 2 tahap ini telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87% dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk 18 provinsi lainnya, verifikasi 2 tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Terkait dengan hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Ketetapan No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 Hektar. Walaupun menggunakan metodologi perhitungan yang berbeda, sebagai perbandingan, Luas Lahan Baku Sawah Nasional menurut SK Kepala BPN-RI tahun 2013, adalah 7.750.999 Hektar.

2. Menetapkan Luas Panen

Menggunakan Luas Lahan Baku Sawah tersebut, BPS melakukan penyempurnaan perhitungan luas panen padi berdasarkan pengamatan yang objektif (*objective measurement*) menggunakan metodologi KSA yang dikembangkan bersama BPPT. Metodologi KSA telah mendapat pengakuan dari LIPI. Metodologi KSA menggunakan 24.223 sampel segmen lahan berbentuk bujur sangkar berukuran 300 X 300 m dengan lokasi yang tetap. Dalam setiap periode tertentu, masing-masing sampel segmen tadi diamati secara visual di 9 titik dengan menggunakan HP berbasis android, sehingga dapat diamati kondisi sampel segmen tersebut apakah berada dalam kondisi persiapan lahan, fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahan puso, lahan sawah bukan padi, atau lahan bukan sawah yang kemudian difoto dan dikirimkan ke *server* pusat untuk diolah. Pengamatan yang dilakukan setiap bulan memungkinkan pula untuk memperkirakan potensi produksi beras untuk 3 bulan ke depan sehingga dapat digunakan sebagai basis perencanaan manajemen beras yang lebih baik. Total titik amatan setiap bulan 217.053 titik amatan.

3. Menetapkan Produktivitas per Hektar

BPS juga melakukan penyempurnaan metodologi dalam menghitung produktivitas per hektar, dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis sampel KSA. Penggunaan basis KSA dalam menentukan sampel ubinan adalah untuk mengurangi risiko lewat panen sehingga perhitungan menjadi lebih akurat. Penentuan lokasi sampel ubinan yang tadinya dilakukan secara manual saat ini menggunakan aplikasi berbasis android. Koordinat plot ubinan

digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan analisa spasial ubinan. Untuk meningkatkan kualitas petugas ubinan telah dilakukan pelatihan secara berjenjang. Selain itu, telah dikembangkan pula metode pengolahan data ubinan berbasis *web* dan *software* untuk pengecekan data *outlier* sehingga meminimalkan tingkat kesalahan data, sehingga dapat dihasilkan data yang akurat sesuai kondisi lapangan.

4. Menyempurnakan Angka Konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan Angka Konversi dari GKG ke Beras

Penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi sehingga akan didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi. Sebelumnya, konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional.

Tabel 10.1
Luas Panen Padi menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2018

Kabupaten/Kota	Luas Panen Padi	Potensi Panen Padi	Luas Panen Padi
	Januari—September 2018 (Hektar)	Oktober—Desember 2018 (Hektar)	Januari—Desember 2018 (Hektar)
(1)	(2)	(3)	(4)
[5301] SUMBA BARAT	11.299	635	11.934
[5302] SUMBA TIMUR	17.066	1.794	18.860
[5303] KUPANG	13.192	1.017	14.209
[5304] TIMOR TENGAH SELATAN	2.997	746	3.743
[5305] TIMOR TENGAH UTARA	9.415	1.080	10.495
[5306] BELU	5.505	371	5.876
[5307] ALOR	1.159	89	1.248
[5308] LEMBATA	823	31	854
[5309] FLORES TIMUR	2.902	20	2.922
[5310] SIKKA	3.559	620	4.179
[5311] ENDE	3.966	940	4.906
[5312] NGADA	6.982	2.146	9.128
[5313] MANGGARAI	15.485	5.004	20.489
[5314] ROTE NDAO	8.838	1.223	10.061
[5315] MANGGARAI BARAT	20.640	2.656	23.296
[5316] SUMBA TENGAH	5.068	184	5.252
[5317] SUMBA BARAT DAYA	13.809	630	14.439
[5318] NAGEKEO	9.104	2.557	11.661
[5319] MANGGARAI TIMUR	15.738	4.802	20.540
[5320] SABU RAIJUA	368	70	438
[5321] MALAKA	5.186	822	6.008
[5371] KUPANG	319	20	339
[5300] NUSA TENGGARA TIMUR	173.420	27.457	200.877

Tabel 10.2

Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2018

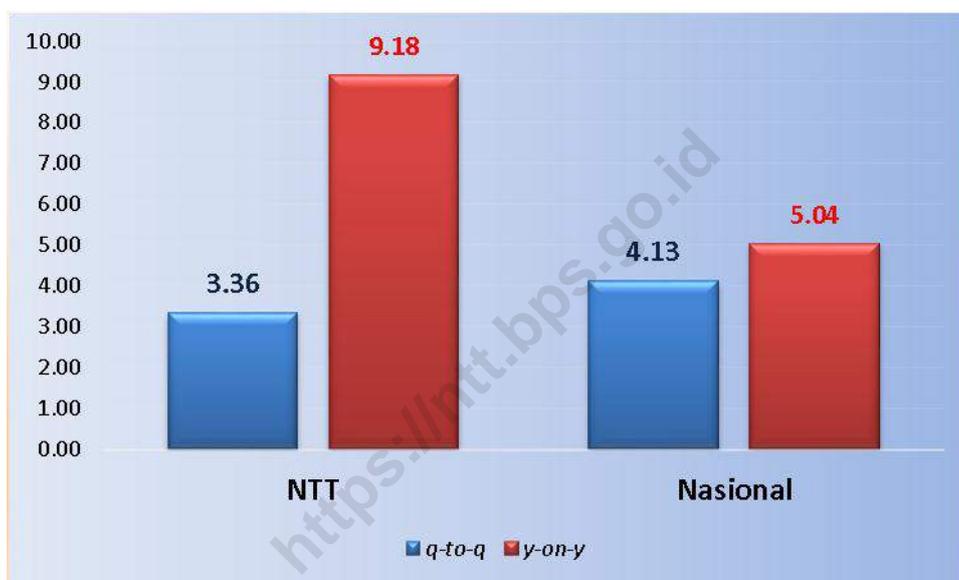
Kabupaten/Kota	Produksi Padi Januari— September 2018 (ton- GKG)	Potensi Produksi Padi Oktober—Desember 2018 (ton-GKG)	Produksi Padi Januari—Desember 2018 (ton-GKG)
(1)	(2)	(3)	(4)
[5301] SUMBA BARAT	45.605	2.528	48.133
[5302] SUMBA TIMUR	56.479	5.096	61.575
[5303] KUPANG	58.117	4.687	62.804
[5304] TIMOR TENGAH SELATAN	14.751	3.906	18.657
[5305] TIMOR TENGAH UTARA	42.034	4.646	46.680
[5306] BELU	23.004	1.136	24.140
[5307] ALOR	2.173	356	2.529
[5308] LEMBATA	2.928	108	3.036
[5309] FLORES TIMUR	9.411	68	9.479
[5310] SIKKA	10.823	2.187	13.010
[5311] ENDE	14.145	3.643	17.788
[5312] NGADA	35.372	9.364	44.736
[5313] MANGGARAI	70.301	23.036	93.337
[5314] ROTE NDAO	41.927	5.867	47.794
[5315] MANGGARAI BARAT	100.704	12.554	113.258
[5316] SUMBA TENGAH	10.317	355	10.672
[5317] SUMBA BARAT DAYA	36.567	1.392	37.959
[5318] NAGEKEO	24.531	5.968	30.499
[5319] MANGGARAI TIMUR	67.112	19.581	86.693
[5320] SABU RAIJUA	1.420	274	1.694
[5321] MALAKA	21.317	3.315	24.632
[5371] KUPANG	1.782	93	1.875
[5300] NUSA TENGGARA TIMUR	690.820	110.160	800.980

XI. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III 2018

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) triwulan III tahun 2018 di NTT mengalami kenaikan sebesar 3,36 persen dibanding triwulan II tahun 2018, dan pertumbuhan (y-on-y) triwulan III tahun 2018 terhadap triwulan III tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,18 persen. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (q-to-q) triwulan III tahun 2018 naik sebesar 1,03 persen dibanding triwulan II tahun 2018, dan pertumbuhan (y-on-y) triwulan III tahun 2018 terhadap triwulan yang sama tahun 2017 NTT naik sebesar 30,35 persen.

Gambar 11.1
 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang
 Triwulan III Tahun 2018 NTT & Nasional
 (q to q) dan (y on y)



Naiknya pertumbuhan produksi IBS NTT pada triwulan III tahun 2018 (q-to-q) NTT sebesar 3,36 persen dipengaruhi oleh kontribusi pertumbuhan positif Industri Manufaktur Barang Galian Bukan Logam mengalami peningkatan sebesar 62,65 persen dan Industri Manufaktur Minuman mengalami kenaikan sebesar 24, 31 persen. Sedangkan Industri Manufaktur Makanan mengalami penurunan sebesar -14,50 persen dan Industri Manufaktur Furnitur sebesar -8,15 persen.

Apabila dilihat dari tabel 11.1 pada triwulan III tahun 2018, perusahaan Industri Barang Galian Bukan Logam menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibanding industri besar lainnya yang ada di NTT yaitu : Industri Makanan, Industri Minuman dan Industri Furnitur. Sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, kontribusi nilai produksi Industri Barang Galian Bukan Logam juga memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai produksi IBS di NTT selama triwulan III tahun 2018. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : perusahaan Industri Barang Galian Bukan Logam mampu menyerap tenaga kerja sebesar 31,77 persen dan memberikan kontribusi sebesar 65,90 persen

terhadap nilai produksi (output) IBS NTT. Industri Makanan mampu menyerap 29,12 persen tenaga dan memberikan kontribusi sebesar 14,69 persen.

Tabel 11.1
 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, Kontribusi Nilai Produksi Terhadap Total Nilai Produksi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar Sedang Pada Trw II Tahun 2018 dan Trw III Tahun 2018

No	Jenis Industri	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Kontribusi Nilai Produksi (%)	Produktivitas (Rp.Juta)	
				Trw II 2018	Trw III 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Makanan	29,12	14,69	11,06	9.80
2	Industri Minuman	23,26	12,57	9,45	10.49
3	Industri Furnitur	15,85	6,84	8,33	8.38
4	Barang Galian Bukan Logam	31,77	65,90	27,53	40.29
Jumlah		100,00	100,00	15,42	19,42

Sumber : Hasil Olahan Survei IBS Bulanan

Industri Minuman mampu menyerap 23,26 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 12,57 persen dan Industri Furnitur yang paling rendah yaitu menyerap 15,85 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 6,84 persen.

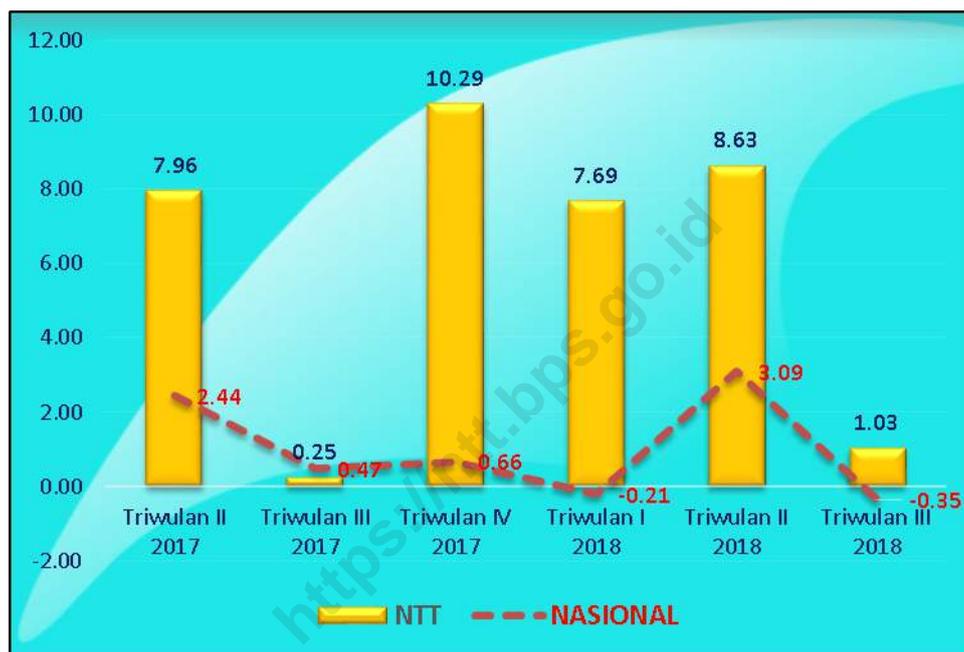
Pada triwulan III tahun 2018 produktivitas tenaga kerja sektor industri manufaktur besar dan sedang di NTT mengalami kenaikan sebesar 25,94 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 15,42 juta rupiah per tenaga kerja selama triwulan II tahun 2018 menjadi 19,42 juta rupiah per tenaga kerja selama triwulan III tahun 2018. Jika dilihat menurut jenis industri manufaktur, maka produktivitas tenaga kerja tertinggi dalam kurun waktu triwulan III tahun 2018 adalah sektor Industri Manufaktur Barang Galian Bukan Logam yaitu sebesar Rp. 40,29 juta per tenaga kerja, selanjutnya Industri Minuman sebesar Rp. 10,49 juta per tenaga kerja, sementara produktivitas Industri Manufaktur Makanan dan Industri Manufaktur Furnitur masing-masing sebesar Rp. 9,80 juta dan Rp. 8,38 juta per tenaga kerja selama triwulan III tahun 2018.

B. Industri Mikro Dan Kecil

Pada triwulan III tahun 2018 pertumbuhan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) (q-to-q) tumbuh sebesar 1,03 persen dibanding triwulan II tahun 2018. Kontribusi pertumbuhan positif produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III tahun 2018 (q-to-q) berasal dari kenaikan sebagian besar jenis IMK yang ada di NTT, seperti: Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat tradisional (11,84 %), Industri Pengolahan Lainnya (9,21 %), Industri Makanan (6,80 %), Industri Barang Galian Bukan Logam

(4,40 %), Industri Pakaian Jadi (2,65 %), Industri Tekstil (1,19 %) dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (83,04 %). Sedangkan IMK yang mengalami pertumbuhan negatif diantaranya : Industri Minuman (-7,37 %), Industri Furnitur (-6,46 %), Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (-6,15 %), Industri Kayu serta Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (-6,04 %). Secara rinci mengenai pertumbuhan IMK q-to-q dan y-on-y Nasional dan Provinsi NTT dapat dilihat pada grafik dan tabel 11.2.

Gambar 11.2
 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
 Triwulan I Tahun 2017 s/d Triwulan III 2018 (q-to-q) NTT dan Nasional



Tabel 11.2
 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
 Triwulan III Tahun 2018

No	Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan Triw III Tahun 2018 (persen)	
			q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	10	Industri Makanan	6.80	60.83
2	11	Industri Minuman	-7.37	-15.37
3	13	Industri Tekstil	1.19	-12.35
4	14	Industri Pakaian Jadi	2.65	33.17
5	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6.04	-16.37
6	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.86	147.15
7	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	11.84	31.20
8	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	4.40	59.33
9	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-6.15	16.14
10	31	Industri Furnitur	-6.46	-17.38
11	32	Industri Pengolahan Lainnya	9.21	66.69
IMK (Industri Mikro dan Kecil)			1.03	30.35

XII. INDEKS TENDENSI KONSUMEN TRIWULAN II 2018

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan indeks komposit persepsi rumahtangga yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi terhadap situasi perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang, ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya,
- Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya,
- Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya,

A. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2018

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) NTT pada triwulan III-2018 sebesar 113,64, artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan nilai ITK Nasional yang mencapai 101,23 maka nilai ITK NTT lebih tinggi 12,41 poin dan secara nasional ada di peringkat pertama. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 116,48), tidak adanya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (nilai indeks sebesar 123,44), juga penurunan volume konsumsi (nilai indeks sebesar 94,44).

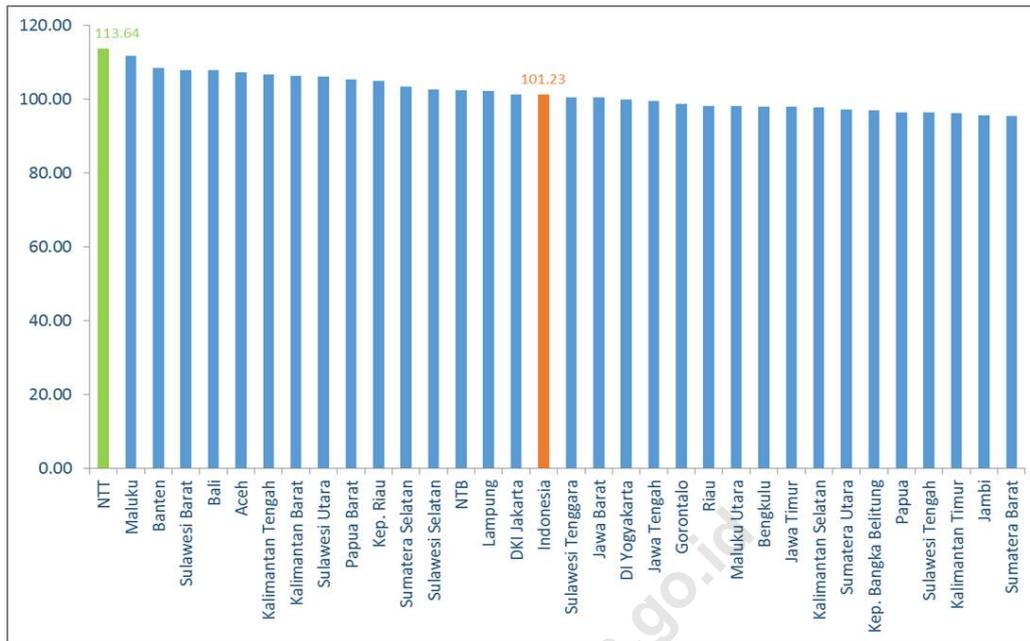
Tabel 12.1
Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2018 dan Triwulan III-2018
Menurut Variabel Pembentuknya

Variabel Pembentuk	ITK Triwulan II 2018	ITK Triwulan III 2018
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumahtangga	144,44	116,48
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	107,92	123,44
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bahan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi)	112,78	94,44
Indeks Tendensi Konsumen	120,86	113,64

Secara nasional, kondisi perekonomian di seluruh wilayah Indonesia pada triwulan III-2018 mengalami sedikit peningkatan. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah NTT dengan nilai indeks sebesar 113,64, diikuti Maluku (nilai ITK sebesar 111,82) dan Banten (nilai ITK sebesar 108,55). Sedangkan, 3 (tiga) provinsi yang memiliki ITK terendah masing-masing adalah Sumatera Barat dengan nilai indeks sebesar 95,39 diikuti Jambi (nilai ITK sebesar 95,61) dan Kalimantan Timur (nilai ITK sebesar

96,26). Perbandingan nilai ITK Triwulan III-2018 tingkat nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 12.1.

Gambar 12.1
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2018
Tingkat Nasional dan Provinsi



B. Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV 2018

Nilai ITK NTT pada triwulan IV-2018 diperkirakan sebesar 125,81, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan lebih meningkat. Tingkat optimisme konsumen diperkirakan akan naik dibandingkan triwulan III-2018 (sebesar 113,64). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2018 dipengaruhi oleh meningkatnya indeks perkiraan pendapatan rumah tangga mendatang (127,80) dan meningkatnya rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan (nilai indeks sebesar 122,32).

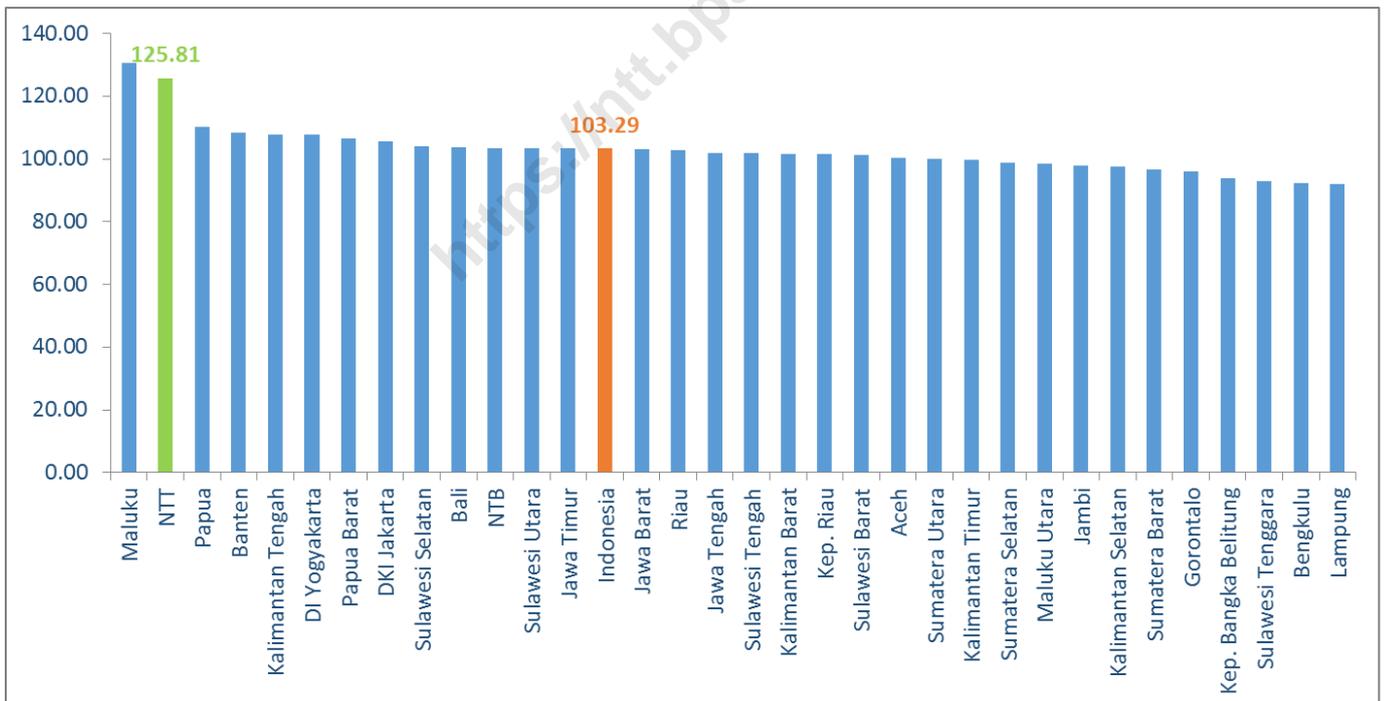
Tabel 12.2
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2018 dan Triwulan IV-2018
Menurut Variabel Pembentuknya

Variabel Pembentuk	Perkiraan	
	ITK Triwulan III-2018	ITK Triwulan IV-2018
(1)	(2)	(3)
Perkiraan pendapatan rumahtangga mendatang	102,71	127,80
Rencana pembelian barang tahan lama, Rekreasi, dan Pesta/Hajatan	78,04	122,32
Indeks Tendensi Konsumen	93,75	125,81

Pada triwulan IV-2018 diperkirakan ITK Nusa Tenggara Timur sebesar 125,81 dan pada tataran nasional berada pada urutan ke-2 dengan selisih indeks sebesar 22,52 poin diatas perkiraan ITK Nasional. Perkiraan ITK Triwulan IV-2018 nasional sebesar 103,29 dan sebanyak 20 provinsi angka indeksnya dibawah angka nasional.

Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2018 terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia, disebabkan oleh kombinasi optimisme pendapatan rumah tangga mendatang dan rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi dan pesta/hajatan. Tiga provinsi yang memiliki perkiraan nilai ITK tertinggi adalah Maluku dengan nilai indeks sebesar 130,61, diikuti NTT (nilai ITK sebesar 125,81) dan Papua (nilai ITK sebesar 110,11), sedang provinsi yang memiliki perkiraan nilai ITK terendah adalah Lampung dengan nilai indeks sebesar 92,07 diikuti Bengkulu (nilai ITK sebesar 92,23) dan Sulawesi Tenggara (nilai ITK sebesar 93,01). Perbandingan perkiraan nilai ITK Triwulan IV-2018 tingkat nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 12. 2.

Gambar 12.2
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2018
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 12.3
Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2017 sampai dengan Triwulan III-2018
Tingkat Nasional dan Provinsi

No	Provinsi	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	114,40	101,98	101,23	124.61	107.23
2	Sumatera Utara	101,97	109,73	101,22	125.05	97.16
3	Sumatera Barat	102,76	103,28	97,48	120.64	95.39
4	Riau	102,86	104,80	98,16	117.18	98.25
5	Jambi	104,13	106,20	107,40	123.88	95.61
6	Sumatera Selatan	105,35	103,69	102,30	125.06	103.35
7	Bengkulu	103,88	101,29	100,81	124.86	98.03
8	Lampung	104,08	110,49	97,08	124.71	102.19
9	Kepulauan Bangka Belitung	103,60	104,63	110,51	126.89	97.03
10	Kepulauan Riau	107,25	106,66	104,22	122.78	105.01
11	DKI Jakarta	110,01	111,08	101,09	126.45	101.27
12	Jawa Barat	110,19	105,43	102,96	126.34	100.51
13	Jawa Tengah	110,47	106,63	105,47	126.73	99.51
14	DI Yogyakarta	119,09	115,18	107,16	127.41	99.89
15	Jawa Timur	110,52	107,76	108,76	127.71	97.93
16	Banten	109,93	108,57	109,70	128.34	108.55
17	Bali	109,83	103,24	106,30	124.89	107.87
18	Nusa Tenggara Barat	106,27	105,81	104,75	121.10	102.50
19	Nusa Tenggara Timur	113,40	122,25	80,84	120.86	113.64
20	Kalimantan Barat	106,31	106,63	101,85	117.22	106.28
21	Kalimantan Tengah	104,99	105,59	106,69	118.11	106.65
22	Kalimantan Selatan	104,85	101,32	105,68	122.32	97.76
23	Kalimantan Timur	105,69	97,91	97,43	119.44	96.26
24	Sulawesi Utara	106,05	110,97	92,69	111.12	106.19
25	Sulawesi Tengah	104,75	108,70	100,83	109.80	96.38
26	Sulawesi Selatan	105,53	103,32	107,39	130.22	102.64
27	Sulawesi Tenggara	110,03	103,09	103,77	125.92	100.55
28	Gorontalo	110,89	109,78	102,01	133.20	98.79
29	Sulawesi Barat	110,44	103,87	101,61	123.11	107.96
30	Maluku	116,46	117,50	93,57	112.95	111.82
31	Maluku Utara	106,27	102,71	102,25	129.95	98.13
32	Papua Barat	118,14	111,45	97,70	105.35	105.35
33	Papua	107,72	118,80	97,95	96.42	96.42
Indonesia		109,42	107,00	103,83	125,43	101.23

XIII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

A. Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2017

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

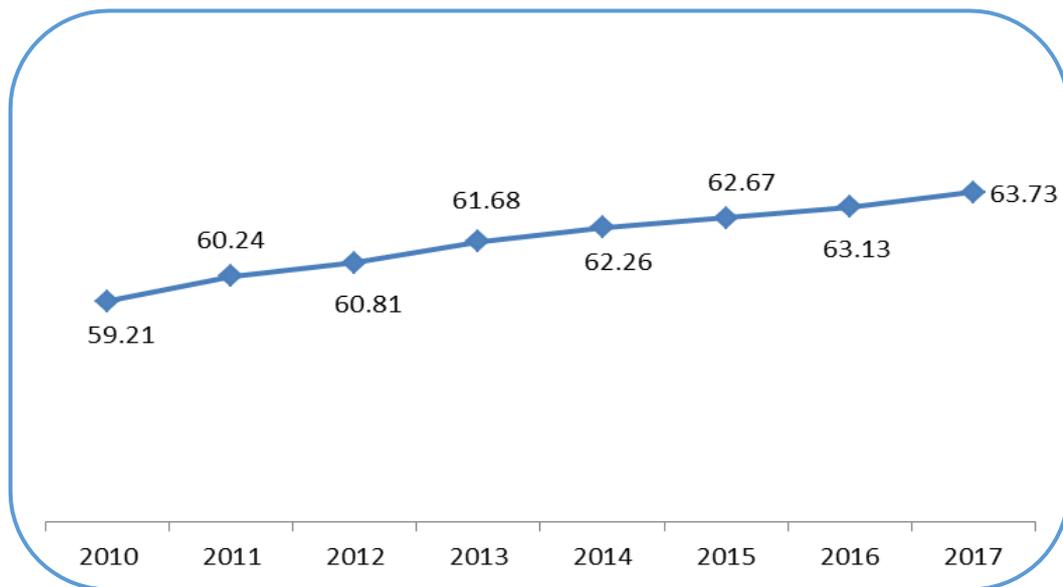
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia NTT terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2016. IPM NTT meningkat dari 60,81 pada tahun 2012 menjadi 63,13 pada tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM NTT rata-rata tumbuh sebesar 0,94 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM NTT tumbuh 0,73 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2014-2015, tumbuh sebesar 0,66 persen. Meskipun selama periode 2012 hingga 2016 IPM NTT menunjukkan kemajuan yang cukup besar, status pembangunan manusia NTT masih stagnan, dari tahun 2012-2016 IPM NTT masih berstatus “sedang”.

Gambar 13.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT, 2010-2017



B. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun

Tabel 13.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Menurut Komponen, 2010-2017

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	65,28	65,45	65,64	65,82	65,91	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,85	11,55	11,73	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,50	6,60	6,71	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	6.615	6.678	6.785	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350
IPM		59,21	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73
Pertumbuhan IPM	%		1,74	0,95	1,43	0,95	0,65	0,73	0,95

5. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, NTT telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,79 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di NTT sebesar 65,28 tahun, dan pada tahun 2017 telah mencapai 66,07.

Gambar 13.2
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) NTT (tahun), 2010-2017



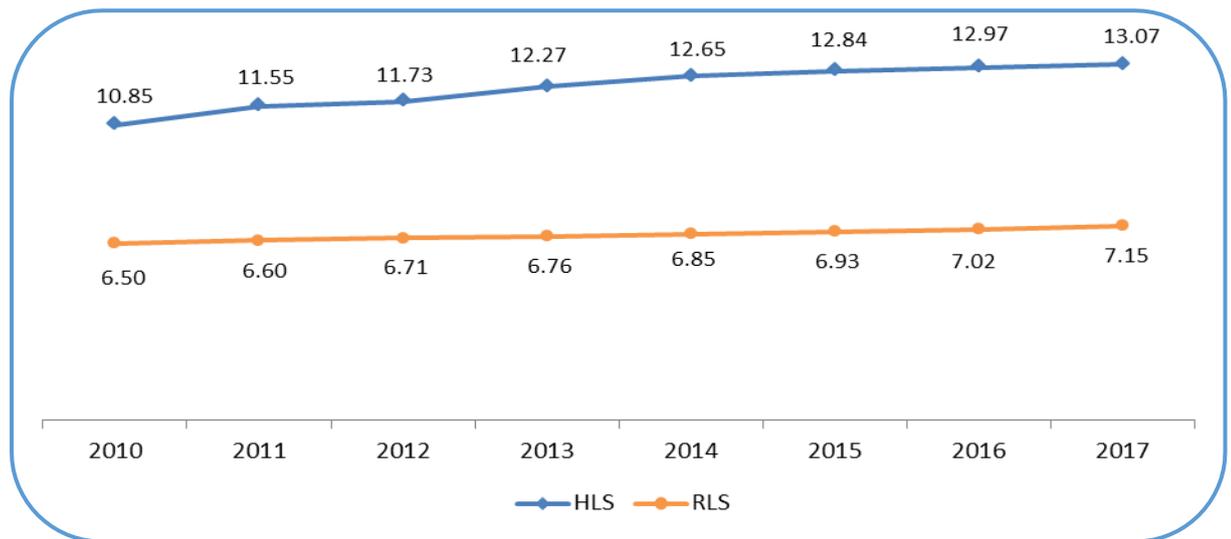
6. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah di NTT telah meningkat sebesar 2,22 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,65 tahun.

Selama periode 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 2,71 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di NTT telah mencapai 13,07 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTT tumbuh 1,37 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia NTT yang lebih baik. Pada tahun 2017, secara rata-rata penduduk NTT usia 25 tahun ke atas mencapai 7,15 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas I).

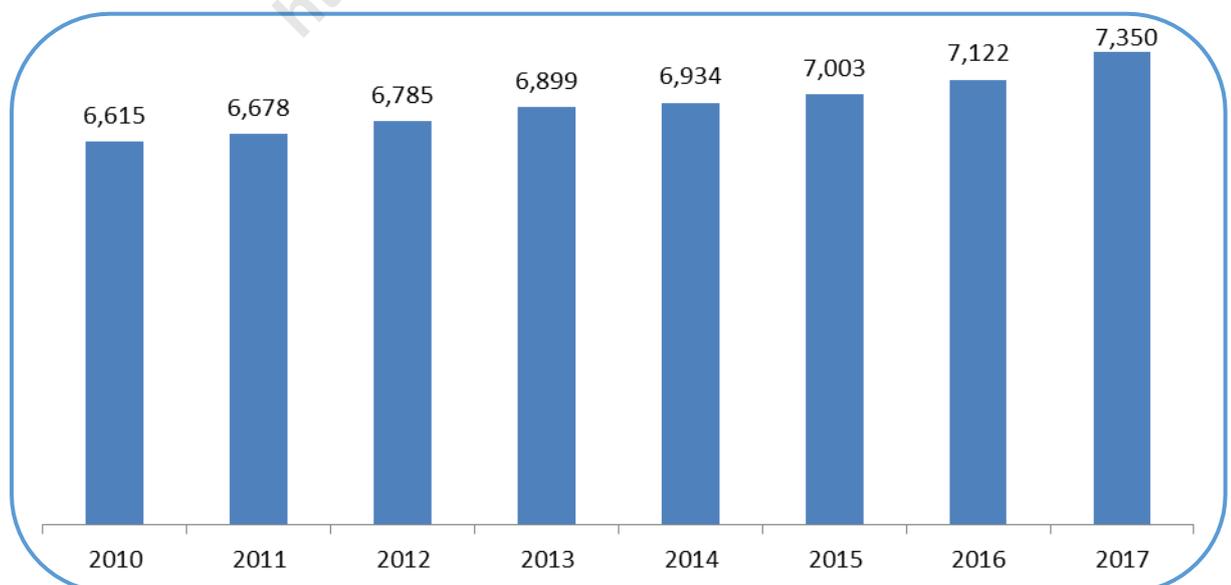
Gambar 13.3
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah NTT (tahun),
2010-2017



7. Dimensi Standard Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita masyarakat NTT mencapai Rp. 7,35 juta per tahun. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 1,52 persen per tahun.

Gambar 13.4
Pengeluaran per Kapita per Tahun, 2010-2017 (Rp. 000)



C. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

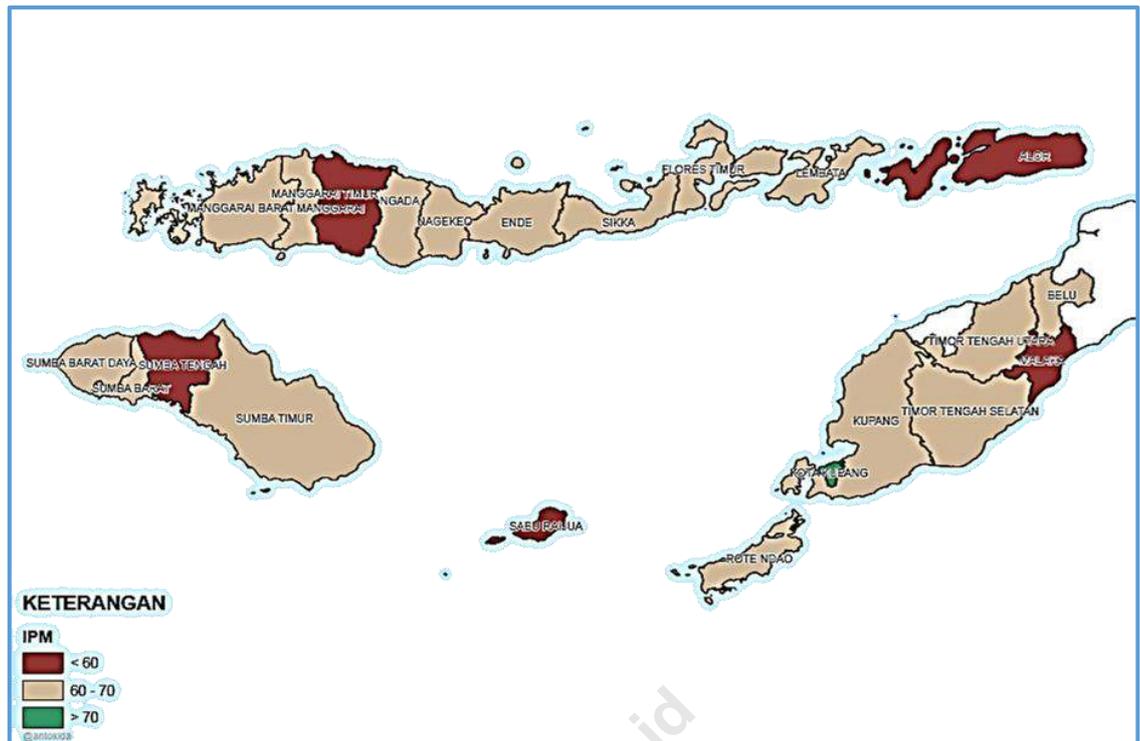
Pada tahun 2017, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kab/Kota cukup bervariasi. IPM pada level Kab/Kota berkisar antara 55,22 (Kabupaten Sabu Raijua) hingga 78,25 (Kota Kupang). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 59 tahun (Kabupaten Sabu Raijua) hingga 68,58 tahun (Kota Kupang). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,04 tahun (Kabupaten Manggarai Timur) hingga 15,77 tahun (Kota Kupang), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,51 tahun (Kabupaten Sumba Tengah) hingga 11,45 tahun (Kota Kupang). Pengeluaran per kapita di tingkat Kab/Kota berkisar antara 5,120 juta rupiah per tahun (Kabupaten Sabu Raijua) hingga 13,028 juta rupiah (Kota Kupang).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2017 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota yang berstatus “rendah” berkurang dari 6 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menjadi 5 Kabupaten/Kota pada tahun 2017. Satu Kabupaten yang berstatus “rendah” pada tahun 2016 berubah status menjadi “sedang” pada tahun 2017. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Rote Ndao. Hingga saat ini, terdapat hanya Kota Kupang yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”. Sementara itu, hingga tahun 2017, masih terdapat lima Kabupaten/Kota yang berstatus pembangunan manusia “rendah”, yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level Kabupaten/Kota. Selama periode 2016 hingga 2017, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga Kabupaten/Kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Rote Ndao (2,07 persen), Kabupaten Sabu Raijua (1,96 persen), dan Kabupaten Manggarai Timur (1,76 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

Gambar 13.5

IPM NTT Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2017



Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2015 hingga 2016, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Sabu Raijua (1,652%), Kabupaten Rote Ndao (1,646%), dan Kabupaten Malaka (1,356%). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten didorong oleh pertumbuhan variabel rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kupang (0,564%), Kabupaten Ende (0,305%), dan Kota Kupang (0,244%) tercatat paling lambat di NTT selama tahun 2015-2016.

Tabel 13.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)		IPM		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Capaian		Pertumbuhan (%)
									2016	2017	2016-2017
Sumba Barat	66,15	66,20	12,64	12,87	6,45	6,51	6.914	6.997	61,85	62,30	0,73
Sumba Timur	64,00	64,12	12,30	12,79	6,48	6,73	9.004	9.093	63,22	64,19	1,53
Kupang	63,33	63,49	13,48	13,49	6,93	7,10	7.217	7.301	62,39	62,79	0,64
Timor Tengah Selatan	65,60	65,65	12,53	12,54	6,27	6,39	6.360	6.676	60,37	61,08	1,18
Timor Tengah Utara	66,14	66,19	13,27	13,28	7,13	7,14	5.930	6.164	61,54	62,03	0,80
Belu	63,21	63,42	12,02	12,24	7,06	7,07	7.199	7.251	61,04	61,44	0,66
Alor	60,35	60,47	11,64	12,08	7,76	7,77	6.468	6.553	58,99	59,61	1,05
Lembata	66,02	66,19	12,23	12,25	7,52	7,58	7.010	7.084	62,81	63,09	0,45
Flores Timur	64,36	64,45	12,38	12,88	6,99	7,12	7.237	7.442	61,90	62,89	1,60
Sikka	66,20	66,30	11,91	12,34	6,55	6,56	7.740	7.855	62,42	63,08	1,06
Ende	64,42	64,48	13,74	13,75	7,38	7,63	8.801	8.841	65,74	66,11	0,56
Ngada	67,34	67,36	12,66	12,67	7,61	7,85	8.195	8.649	65,61	66,47	1,31
Manggarai	65,66	65,84	11,92	12,32	6,97	6,98	7.008	7.056	61,67	62,24	0,92
Rote Ndao	63,13	63,41	12,51	12,91	6,67	6,98	6.110	6.320	59,28	60,51	2,07
Manggarai Barat	66,19	66,19	10,67	11,09	6,82	7,14	7.149	7.269	60,63	61,65	1,68
Sumba Tengah	67,73	67,74	11,93	12,31	5,21	5,51	5.907	5.946	58,52	59,39	1,49
Sumba Barat Daya	67,71	67,76	13,02	13,03	6,30	6,31	6.079	6.134	61,31	61,46	0,24
Nageko	66,31	66,36	11,98	12,45	7,34	7,52	8.054	8.119	63,93	64,74	1,27
Manggarai Timur	67,39	67,40	10,58	11,04	6,44	6,45	5.396	5.643	57,50	58,51	1,76
Sabu Raijua	58,69	59,00	13,00	13,11	5,68	6,02	4.923	5.120	54,16	55,22	1,96
Malaka	64,27	64,29	12,28	12,75	6,31	6,32	5.658	5.726	58,29	58,90	1,05
Kota Kupang	68,46	68,58	15,76	15,77	11,44	11,45	12.986	13.028	78,14	78,25	0,14
Nusa Tenggara Timur	66,04	66,07	12,97	13,07	7,02	7,15	7.122	7.350	63,13	63,73	0,95

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

XIV. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2017

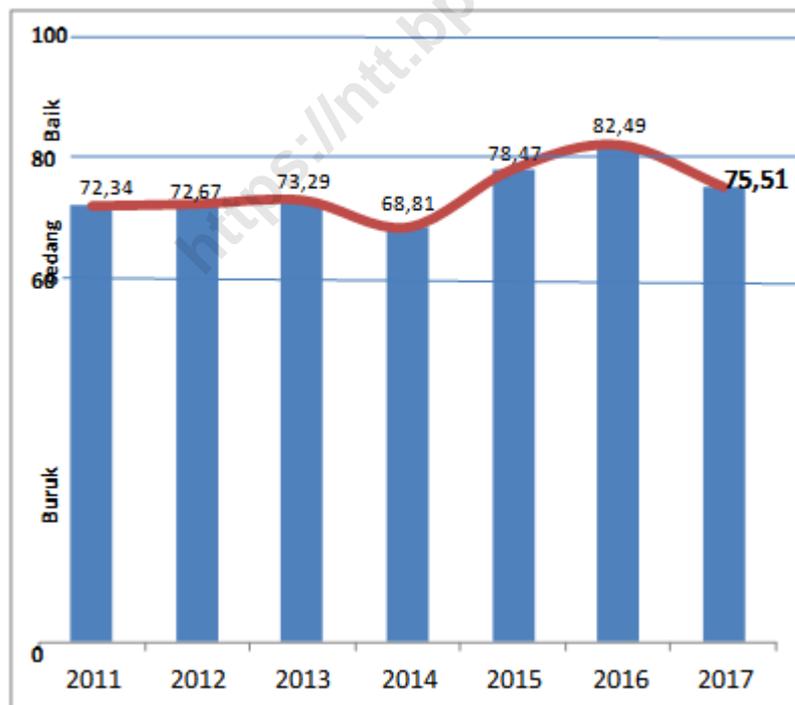
A. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebesar 75,51 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,98 poin dibandingkan dengan IDI NTT 2016 sebesar 82,49. Penurunan ini menjadikan tingkat demokrasi Indonesia di NTT bergeser dari kategori “baik” menjadi kategori “sedang”.

Perkembangan IDI di NTT dari 2011 hingga 2017 mengalami fluktuasi (2011 sebesar 72,34; 2012 sebesar 72,67, 2013 sebesar 73,29, 2014 sebesar 68,81, 2015 sebesar 78,47, 2016 sebesar 82,49 dan 2017 sebesar 75,51). Dengan demikian, tingkat demokrasi NTT berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2011 hingga 2015 masih berada pada kategori sedang dan berubah menjadi kategori baik pada 2016 akan tetapi kembali berubah pada kategori sedang di tahun 2017. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Gambar 14.1

Perkembangan IDI NTT, 2011-2017

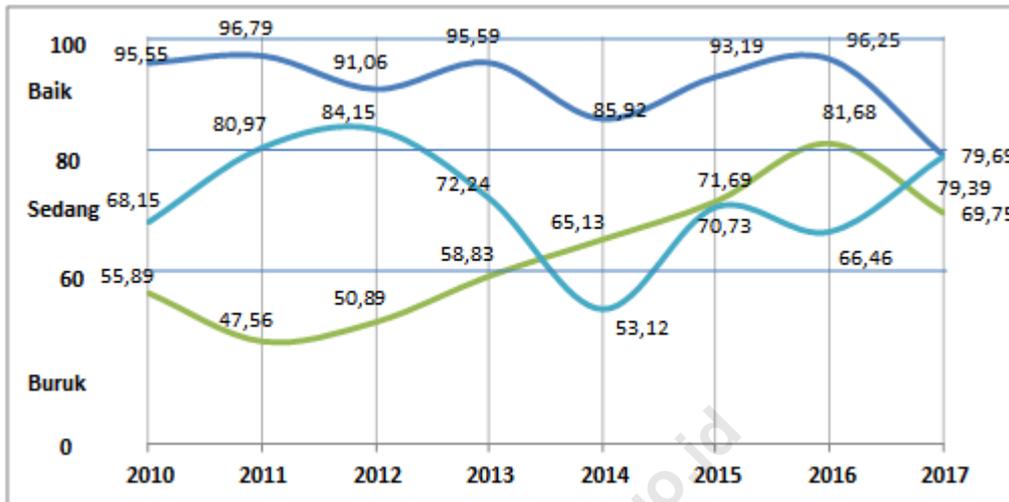


A. Perkembangan Indeks Aspek IDI

Angka IDI NTT Tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil sebesar 79,69 aspek hak-hak politik sebesar 69,75 dan aspek lembaga demokrasi sebesar 79,39.

Gambar 14.2

PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK IDI NTT, 2010-2017



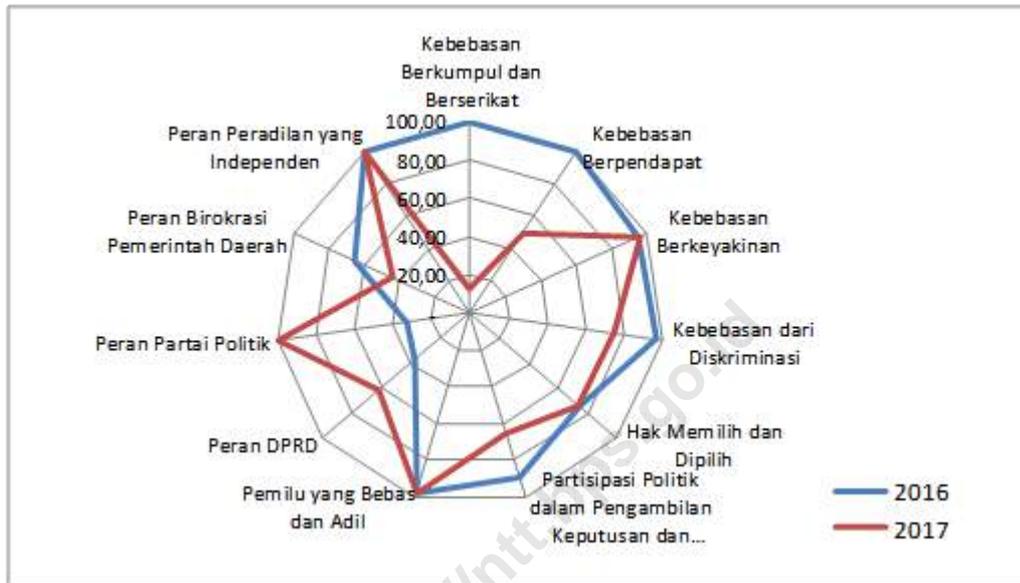
Secara lebih rinci, pada 2017 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil dan hak politik mengalami penurunan berturut-turut sebesar 16,56 dan 11,93 poin sedangkan pada aspek lembaga demokrasi terlihat mengalami kenaikan sebesar 12,93 poin. Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2017 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2010 sudah mencapai kategori “baik” akan tetapi tahun 2017 berubah menjadi kategori “sedang”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2010 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014 dan 2015 yang menembus kategori “sedang” bahkan menembus kategori “baik” pada IDI 2016, akan tetapi aspek Hak-hak Politik kembali turun menjadi kategori “sedang” pada tahun 2017. Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang sangat berfluktuatif. Pengukuran pada 2010 masih pada kategori “sedang” kemudian pada 2011-2012 beralih ke kategori “baik” akan tetapi pada periode hingga 2014 aspek Lembaga Demokrasi sempat turun sampai kategori “buruk” dan kemudian kembali pada kategori “sedang” di tahun 2015, 2016 dan 2017.

B. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Menurut nilai indeks variabel IDI 2017 terdapat enam variabel yang mengalami penurunan indeks, dua variabel yang tidak berubah nilai indeksnya dan tiga variabel mengalami peningkatan. Dari enam variabel yang mengalami penurunan, lima diantaranya menurun cukup bermakna. Penurunan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2016 dengan plot tahun 2017, memperlihatkan variabel tersebut menurun paling besar, dari kategori baik menjadi kategori buruk, dari 100,00 pada 2016 menjadi 12,50 pada 2017.

Variabel lain yang juga menurun secara bermakna adalah variabel Kebebasan Berpendapat turun dari 100,00 pada tahun 2016 menjadi 50,00 di tahun 2017 disusul variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan dari nilai 89,13 menjadi 65,76 pada periode yang sama, kemudian variabel Kebebasan dari Diskriminasi dari nilai 96,53 di tahun 2016 turun menjadi 74,38 di tahun 2017 dan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dari nilai 65,35 menjadi 44,21 pada periode yang sama.

Gambar 14.3
Perkembangan Indeks Variabel IDI NTT, 2016-2017



C. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI 2017, dari 28 indikator terdapat 14 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- a. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- b. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
- c. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
- d. Indikator 7, Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Dari Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Masyarakat Lain Terkait Dengan Ajaran Agama
- e. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- f. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
- g. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan
- h. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
- i. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara,
- j. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu,
- k. Indikator 24, Persentase Perempuan Dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi

- l. Indikator 25, Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Dinyatakan Bersalah Oleh Keputusan PTUN
- m. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan
- n. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2017. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 1, Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat,
- b. Indikator 3, Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Yang Menghambat Kebebasan Berpendapat
- c. Indikator 4, Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat Yang Menghambat Kebebasan Berpendapat
- d. Indikator 9, Tindakan Atau Pernyataan Pejabat Pemerintah Daerah Yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis Atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya,
- e. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi,
- f. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok Yang Bersifat Kekerasan
- g. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD,
- h. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif,
- i. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik

D. Perkembangan IDI Provinsi

Terdapat empat provinsi yang berkategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta yang naik dari 70,85 pada 2016 menjadi 84,73 pada 2017. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta turun dari 85,58 pada 2016 menjadi 83,61 pada 2017, Kalimantan Utara naik dari 76,98 pada 2016 menjadi 81,06 pada 2017, dan Kep. Bangka Belitung yang turun dari 83,00 pada 2016 menjadi 80,11 pada 2017 (lihat Tabel 2). Sedangkan sebanyak 30 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2016, nilai IDI di 16 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turun 6,98 poin dari 82,49 pada 2016 menjadi 75,51 pada 2017. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Selatan yang turun 6,91 poin dari 80,95 pada 2016 menjadi 74,04 pada 2017.

E. Penjelasan Teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai

perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Tabel 14.1

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2017

Aspek	Variabel	Indikator *)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang

kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

F. Tabel-tabel

Tabel 14.2
Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2016-2017

o	ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2016	2017
A.	KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)	96.25	79.69
I.	Kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	12.50
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	0.00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	100.00
II.	Kebebasan berpendapat	100.00	50.00
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100.00	50.00
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100.00	50.00
III.	Kebebasan berkeyakinan	95.01	96.26
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100.00	100.00
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	87.50	90.63
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	80.00	85.00
IV.	Kebebasan dari diskriminasi	96.53	74.38
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100.00	100.00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87.50	37.50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100.00	75.00
B.	HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)	81.68	69.75
V.	Hak memilih dan dipilih	74.24	73.75
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	96.79	96.79
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60.00	60.00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	75.14	75.14
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	76.56	76.56
15	Persentase Anggota Perempuan DPRD provinsi	35.90	30.77
VI.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	89.13	65.76
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	78.26	31.52
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100.00	100.00
C.	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)	66.46	79.39
VII.	Pemilu yang bebas dan adil	97.47	97.47
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu	100.00	100.00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	94.94	94.94
VIII.	Peran DPRD	38.32	61.63
20	Skor alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan	46.33	74.97
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	50.00	57.14
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0.00	17.86
IX.	Peran Partai politik	33.31	100.00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	28.57	100.00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	75.97	100.00

Tabel 14.3
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2016-2017

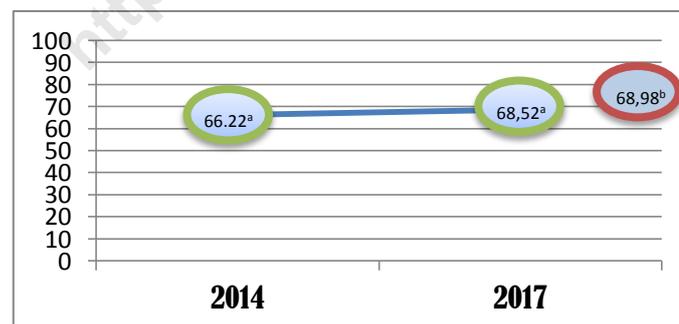
Provinsi	IDI 2016				IDI 2017			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	72,48	92,92	63,94	60,33	70,93	87,27	63,94	61,47
Sumatera Utara	67,37	82,71	62,29	56,13	68,08	74,75	62,29	68,87
Sumatera Barat	54,41	51,01	54,33	58,82	69,50	61,66	61,08	92,72
Riau	71,89	71,78	77,98	62,34	73,41	82,03	66,57	73,41
Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58	74,12	86,81	62,08	77,27
Sumatera Selatan	80,95	91,17	81,94	66,53	74,04	90,83	63,90	69,03
Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01	72,73	88,51	59,42	74,03
Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31	72,01	74,12	67,20	77,00
Kep. Bangka Belitung	83,00	87,65	81,09	80,20	80,11	83,07	82,30	72,89
Kepulauan Riau	72,84	85,43	71,28	59,48	76,33	90,84	71,45	65,82
DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19	84,73	87,73	80,86	87,12
Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79	68,78	73,61	71,02	59,16
Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69	70,85	69,07	67,24	78,82
D.I.Yogyakarta	85,58	90,00	81,59	86,37	83,61	93,25	82,31	73,55
Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63	70,92	78,98	60,98	76,57
Banten	71,36	83,47	68,30	60,99	73,72	85,16	63,87	74,98
Bali	78,95	96,94	69,60	71,18	78,80	95,51	66,80	76,85
Nusa Tenggara Barat	65,41	65,06	62,08	71,13	76,04	79,40	62,08	93,98
Nusa Tenggara Timur	82,49	96,25	81,68	66,46	75,51	79,69	69,75	79,39
Kalimantan Barat	75,28	83,29	75,70	64,54	79,13	97,15	76,36	60,85
Kalimantan Tengah	74,77	84,98	70,66	68,43	76,12	95,58	56,69	82,50
Kalimantan Selatan	73,43	61,04	83,58	72,89	76,25	60,16	81,09	88,79
Kalimantan Timur	73,64	78,25	78,35	60,36	72,86	83,33	67,18	68,72
Kalimantan Utara	76,98	100,00	66,64	64,48	81,06	98,57	68,54	78,93
Sulawesi Utara	76,34	96,31	70,42	60,62	75,76	90,87	72,12	62,54
Sulawesi Tengah	72,20	80,39	67,89	68,76	69,79	90,04	55,88	66,44
Sulawesi Selatan	68,53	75,54	61,51	70,86	70,79	77,48	64,58	72,23
Sulawesi Tenggara	71,13	88,07	55,51	74,66	68,51	77,66	60,49	69,74
Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42	73,92	85,30	68,18	68,73
Sulawesi Barat	72,37	82,89	69,02	64,47	67,74	73,56	60,84	71,39
Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13	77,45	81,78	74,85	76,15
Maluku Utara	73,27	92,27	61,79	67,59	70,73	90,19	65,84	54,02
Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85	62,76	92,42	39,05	63,14
Papua	61,02	92,15	41,13	53,45	61,34	89,09	42,16	56,91
INDONESIA	70,09	76,45	70,11	62,05	72,11	78,75	66,63	72,49

XV. INDEKS KEBAHAGIAAN TAHUN 2017

A. Perkembangan Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2014 dan 2017

Indeks Kebahagiaan NTT merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia. Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan, karena terdapat penambahan cakupan indeks dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya, pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. SPTK 2014 dilaksanakan untuk menghasilkan indikator kebahagiaan penduduk Indonesia dengan pendekatan kepuasan hidup, Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek kehidupan tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Penilaian terhadap tingkat kepuasan hidup didasarkan pada evaluasi terhadap kondisi obyektif (faktual) yang dialami oleh responden.

Gambar 15.1
Perkembangan Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2014 dan 2017



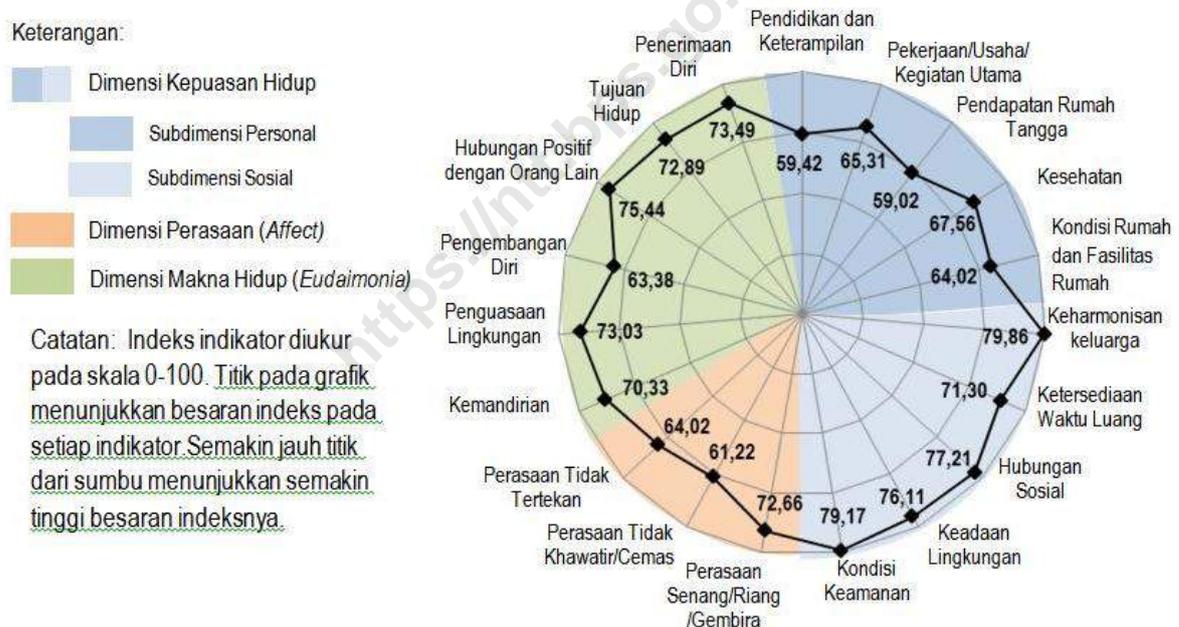
Indeks Kebahagiaan NTT tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 68,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 66,22. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan indeks sebesar 2,3 poin. Indeks Kebahagiaan NTT tahun 2017 sebesar 68,98. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan NTT, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 69,83, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 62,92 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 76,75; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 65,23; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 71,53. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100. Berdasarkan Indeks

Kebahagiaan NTT 2017 tersebut, masing-masing dimensi memiliki kontribusi sebagai berikut: Kepuasan Hidup 34,80 persen (Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, masing-masing 50 persen), Perasaan (Affect) 31,18 persen, dan Makna Hidup (Eudaimonia) 34,02 persen.

B. Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2017

Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan NTT dapat dilihat pada grafik radar (spider chart) di Gambar 16.2. Indeks indikator tertinggi adalah keharmonisan keluarga 79,86 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendapatan Rumah Tangga 59,02 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator lain yang memiliki indeks dibawah 70 yaitu Pendidikan dan keterampilan, Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama, Kesehatan, Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas, Perasaan Tidak Tertekan dan Pengembangan Diri.

Gambar 15.2
Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan NTT Tahun 2017



Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada tingkatan 72,66, sementara yang terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 61,22. Pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Hubungan Positif Dengan Orang Lain (75,44), sebaliknya yang terendah adalah Pengembangan Diri (63,38). Dapat disimpulkan, bahwa penduduk NTT pada umumnya cenderung menjunjung tinggi kebersamaan dengan nilai hubungan positif dengan orang lain mencapai level 75,44. Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu 63,38.

C. Indikator Kebahagiaan NTT Menurut Beberapa Karakteristik

Untuk memahami lebih jauh dan membandingkan antar karakteristik yang berkaitan dengan tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, perasaan, serta makna hidup, maka Indeks Kebahagiaan NTT disajikan menurut beberapa karakteristik. Kategori karakteristik tersebut adalah klasifikasi wilayah yang mencakup perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). Sementara itu, karakteristik lainnya meliputi jenis kelamin, status perkawinan, dan kelompok umur.

D. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi

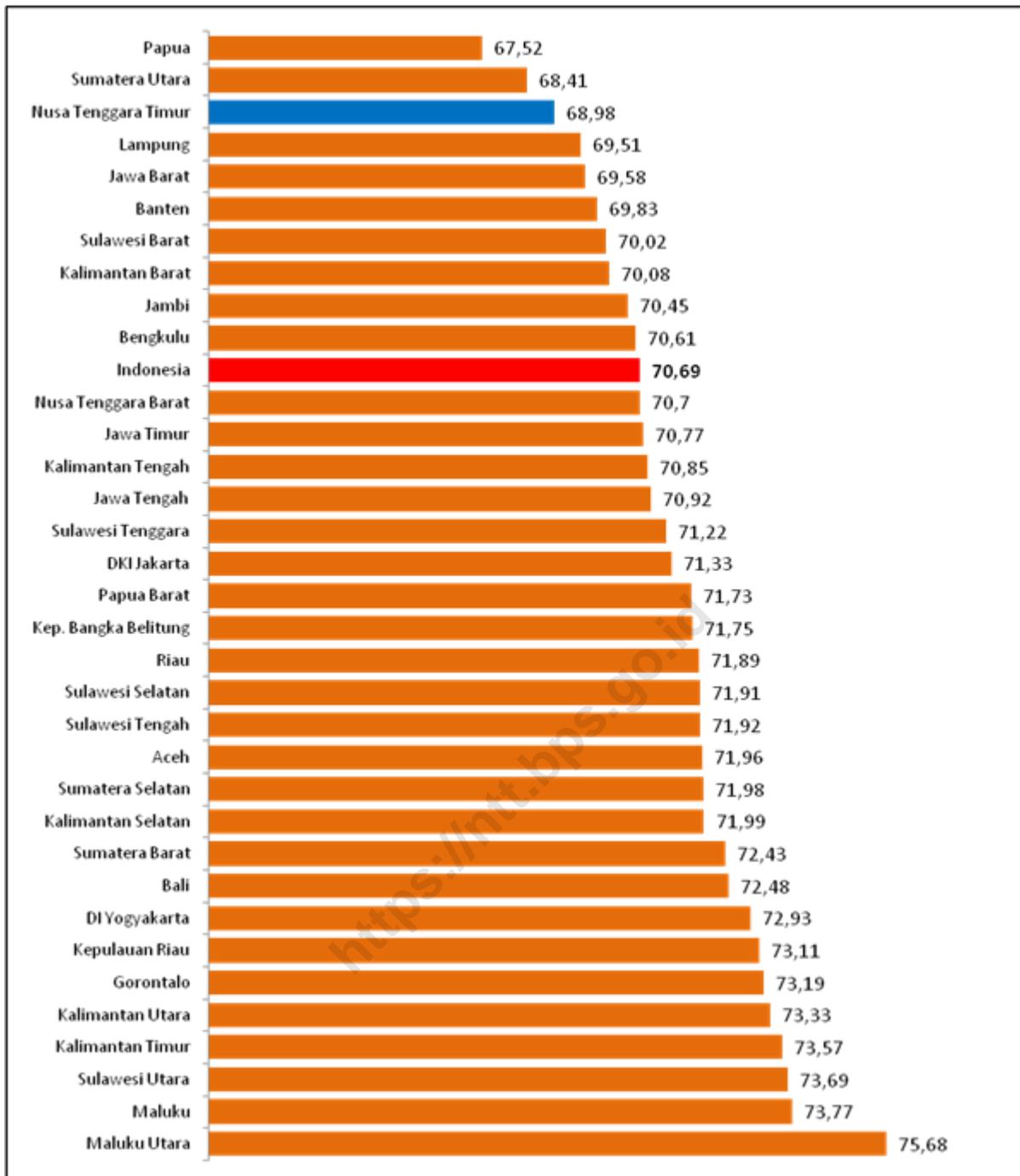
Sebaran nilai Indeks Kebahagiaan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 7. Terdapat 24 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki nilai Indeks Kebahagiaan di atas angka nasional. Hal ini berarti mayoritas provinsi di Indonesia sudah memiliki nilai Indeks Kebahagiaan di atas angka nasional. Indeks Kebahagiaan antar provinsi bervariasi dengan rentang antara 67,52 sampai dengan 75,68. Tiga provinsi yang memiliki nilai Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara (75,68), Maluku (73,77), dan Sulawesi Utara (73,69). Sedangkan Provinsi Papua, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur merupakan tiga provinsi yang memiliki Indeks Kebahagiaan terendah dengan nilai indeks masing-masing 67,52; 68,41; dan 68,98.

Tabel 15.1
Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusunnya Menurut Karakteristik
Provinsi NTT, 2017

Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusunnya Menurut Karakteristik Prov. NTT, 2017							
Karakteristik Demografi dan Ekonomi	Indeks Kebahagiaan	Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)	
		Total	SubDimensi Personal	SubDimensi Sosial			
Klasifikasi Wilayah:							
Perkotaan	72,94	73,12	68,87	77,37	69,67	75,73	
Perdesaan	67,81	68,86	61,16	76,57	63,91	70,30	
Jenis Kelamin:							
Laki-Laki	69,27	69,37	62,29	76,44	65,99	72,18	
Perempuan	68,62	70,39	63,67	77,12	64,30	70,75	
Status Perkawinan:							
Belum Menikah	71,52	72,59	68,55	76,62	66,91	74,66	
Menikah	69,10	69,71	62,64	76,78	65,47	71,79	
Cerai Hidup	68,94	70,58	64,89	76,28	62,88	72,80	
Cerai Mati	67,22	69,32	61,98	76,65	63,37	68,60	
Kelompok Umur:							
≤ 24 Tahun	70,03	70,26	65,62	74,90	63,49	75,79	
25-40 Tahun	69,27	69,96	62,81	77,11	65,33	72,18	
41-64 Tahun	68,93	69,85	63,08	76,62	64,99	71,59	
≥ 65 Tahun	68,17	69,34	61,83	76,85	66,42	68,57	
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:							
Kepala Rumah Tangga	68,87	69,48	62,46	76,51	65,21	71,60	
Pasangan Kepala Rumah Tangga	69,26	70,79	64,17	77,41	65,27	71,36	
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:							
1 Orang	69,57	70,51	65,62	75,40	65,96	71,93	
2 Orang	69,50	71,34	65,25	77,43	65,78	71,02	
3 Orang	68,97	69,73	62,36	77,11	65,21	71,62	
4 Orang	69,41	70,67	63,69	77,65	65,58	71,62	
5 Orang atau Lebih	68,55	68,98	61,75	76,22	64,81	71,53	
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:							
Tidak pernah sekolah	65,25	67,02	59,13	74,90	62,68	65,80	
Tidak tamat SD/ sederajat	67,72	68,73	60,74	76,71	65,03	69,15	
SD sederajat	66,39	67,73	59,18	76,28	62,14	68,92	
SMP sederajat	69,98	70,48	63,77	77,19	65,80	73,28	
SMA sederajat	72,04	72,18	67,56	76,80	67,75	75,84	
Diploma I, II, III	75,60	75,83	72,91	78,76	70,69	79,86	
Diploma IV/S1	77,04	76,86	74,11	79,60	73,76	80,22	
S2, S3	79,81	79,55	79,47	79,63	73,31	86,04	
Pendapatan Rumah Tangga:							
Hingga Rp 1.800.000	66,37	67,26	58,54	75,97	62,55	68,96	
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	69,44	70,54	63,79	77,29	65,46	71,96	
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	71,91	72,84	68,15	77,54	68,50	74,07	
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,28	75,10	72,44	77,75	69,85	77,50	
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,73	75,97	73,45	78,48	72,83	78,13	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	68,98	69,83	62,92	76,75	65,23	71,53	

Gambar 15.3

Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi, 2017



XVI. HASIL PENDAFTARAN USAHA SENSUS EKONOMI 2016

1. Pendahuluan

Dalam rangka Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), pada bulan Mei –Juni 2016 telah dilakukan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan seluruh lapangan usaha, tidak termasuk lapangan usaha pertanian. Pendaftaran usaha/perusahaan tersebut menggunakan 2 (dua) macam kuesioner, yaitu daftar SE2016-L1 dan SE2016-L2. Daftar SE2016-L1 digunakan untuk mendaftar seluruh usaha/perusahaan rumahtangga, lokasi permanen dan lokasi tidak permanen yaitu usaha/ perusahaan yang berada di luar bangunan atau di dalam bangunan tetapi bukan bangunan tempat usaha (seperti, pedagang di area Mall, di koridor pertokoan/fasilitas umum). Daftar SE2016-L2 digunakan untuk mendata seluruh usaha/perusahaan secara lengkap. Secara umum dari hasil pendaftaran SE2016 diperoleh database UMK di wilayah perkotaan dan UMB diseluruh wilayah Indonesia menurut kategori lapangan usaha, skala usaha dan wilayah.

Hasil pendaftaran SE2016 Provinsi NTT tercatat sebanyak 436,4 ribu usaha/perusahaan yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Bila dibedakan menurut skala usaha, 433,1 ribu usaha/perusahaan (99,24 persen) berskala UMK dan 3,3 ribu usaha/perusahaan (0,76 persen) berskala UMB. Dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2006 (SE06) jumlah usaha/ perusahaan meningkat 51,99 persen dari 287,1 ribu menjadi 436,4 ribu di Provinsi NTT.

2. Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan

2.1 Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha

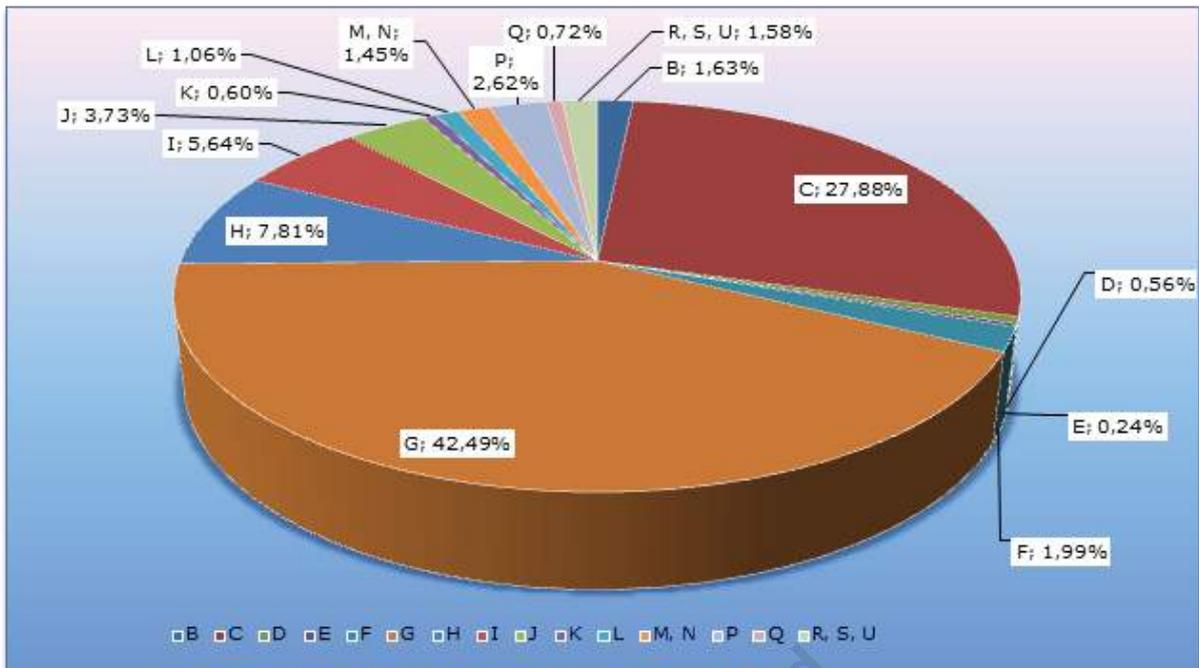
Tabel 16.1
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	7.103	25	7.128
C. Industri Pengolahan	121.608	68	121.676
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2.351	94	2.445
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.042	21	1.063
F. Konstruksi	8.257	411	8.668
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	184.580	871	185.451
H. Pengangkutan dan pergudangan	33.789	295	34.084
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	24.529	104	24.633
J. Informasi Dan Komunikasi	16.154	108	16.262
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	1.855	761	2.616
L. Real Estat	4.601	16	4.617
M,N. Jasa Perusahaan	6.064	273	6.337
P. Pendidikan	11.252	176	11.428
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	3.093	43	3.136
R,S,U. Jasa Lainnya	6.835	42	6.877
Jumlah	433.113	3.308	436.421
	(99,24)	(0,76)	(100,00)

Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa distribusi usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 185,4 ribu usaha/perusahaan atau 42,49 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Provinsi NTT. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 27,88 persen, pengangkutan dan pergudangan sebesar 7,81 persen dan selebihnya 21,82 persen merupakan lapangan usaha lainnya. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Tabel 17.1 dan Gambar 17.1

Gambar 16.1

Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

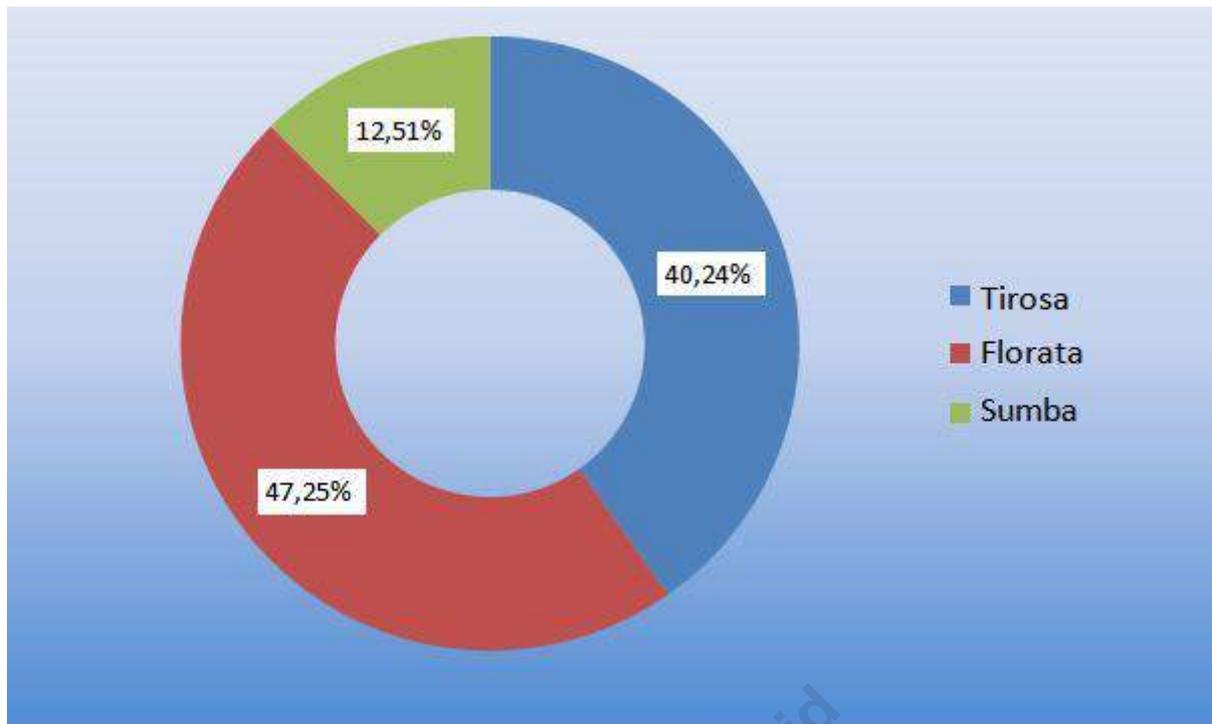


Sebaran usaha/perusahaan antar pulau secara umum menunjukkan 47,25 persen terkonsentrasi di Pulau Flores, Lembata dan Alor (Florata) atau sebanyak 206,2 ribu usaha/perusahaan. Sebanyak 175,6 ribu usaha/perusahaan berada di Pulau Timor, Rote dan Sabu (Tirosa) atau 40,24 persen dan 12,51 persen sisanya berada di Kawasan Sumba. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Tabel 17.2 dan Gambar 17.2.

Tabel 16.2
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Kawasan	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tirosa	173.941	1.657	175.598
Florata	204.887	1.341	206.228
Sumba	54.285	310	54.595
Jumlah	433.113	3.308	436.421
	(98,33)	(1,67)	(100,00)

Gambar 16.2
Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha



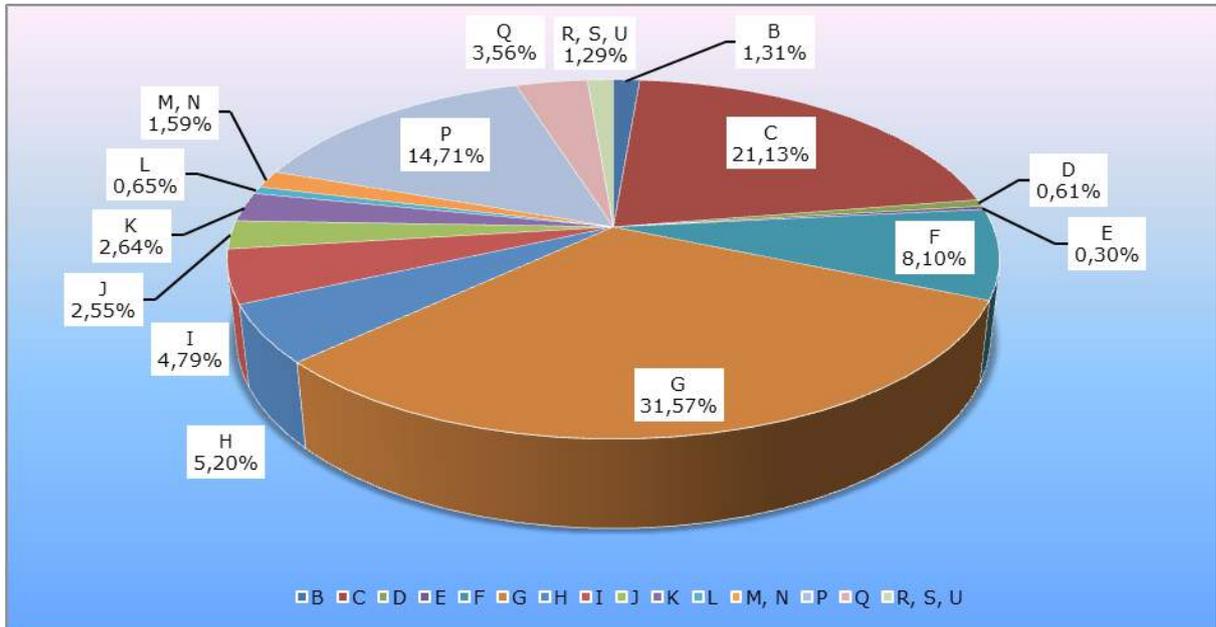
2.2 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha

Tabel 16.3
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	11.687	372	12.059
C. Industri Pengolahan	189.645	4.452	194.097
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3.518	2.092	5.610
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.904	835	2.739
F. Konstruksi	63.536	10.844	74.380
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	277.817	12.252	290.069
H. Pengangkutan dan pergudangan	43.540	4.267	47.807
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	40.896	3.154	44.050
J. Informasi Dan Komunikasi	21.838	1.588	23.426
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	11.726	12.525	24.251
L. Real Estat	5.363	649	6.012
M,N. Jasa Perusahaan	11.712	2.875	14.587
P. Pendidikan	124.522	10.625	135.147
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	24.444	8.296	32.740
R,S,U. Jasa Lainnya	11.338	478	11.816
Jumlah	843.486	75.304	918.790
	(91,80)	(8,20)	(100,00)

Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 290,1ribu orang atau 31,57 persen dari tenaga kerja yang ada di Provinsi NTT. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 21,13 persen atau sebanyak 194,1 ribu orang, kategori pendidikan sebesar 14,71 persen dan selebihnya sebesar 32,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Tabel 17.3 dan Gambar 17.3.

Gambar 16.3
Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016



Sebaran tenaga kerja antar kawasan dan antar pulau secara umum menunjukkan bahwa 43,88 persen berada di Flores (termasuk Alor dan Lembata), 42,76 persen tenaga kerja berada di Timor (termasuk Rote Ndao dan Sabu Raijua) dan 13,37 persen tenaga kerja bekerja di Pulau Sumba. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Tabel 17. 4 dan Gambar 17.4

Tabel 16.4
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Kawasan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Kawasan	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tirosa	350.508	42.338	392.846
Florata	377.656	25.469	403.125
Sumba	115.322	7.497	122.819
Jumlah	843.486	75.304	918.790
	(91,80)	(8,20)	(100,00)

Gambar 16.4
Persentase Tenaga Kerja menurut Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016



2.3 Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kawasan

Sebaran jumlah usaha/perusahaan antar pulau menunjukkan bahwa sebanyak 206,2 ribu usaha/perusahaan berada di Flores (termasuk Alor dan Lembata) atau 47,25 persen terhadap seluruh jumlah usaha/perusahaan di Provinsi NTT, sebanyak 40,24 persen berada di Timor (termasuk Rote Ndao dan Sabu Raijua) dan sisanya sebanyak 12,51 persen berada di Pulau Sumba. Pada Tabel 5. terlihat bahwa dominasi jumlah usaha/perusahaan untuk setiap kategori lapangan usaha terbagi antar Flores dan Timor. Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pengelolaan air/air limbah, konstruksi, penyediaan akomodasi/makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, dan jasa lainnya paling banyak berada di Pulau Timor, Rote, dan Sabu. Sedangkan kategori lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik/gas, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, real estate, pendidikan, dan aktivitas kesehatan lebih dominan di Pulau Flores, Alor, dan Lembata.

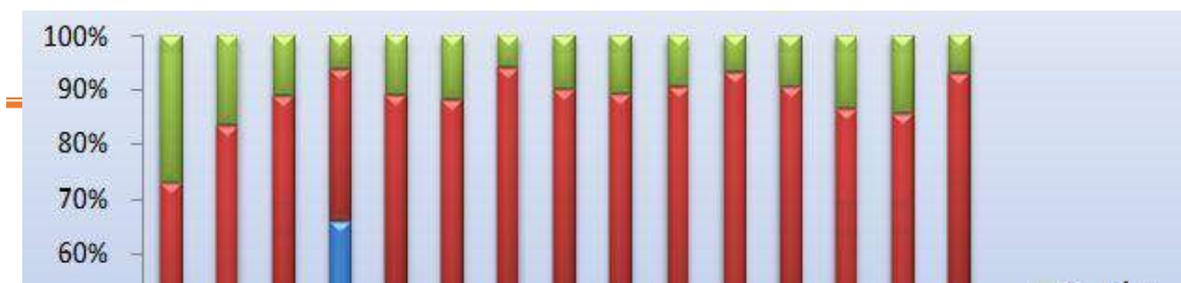
Jika dilihat tiap kategorinya, hanya pertambangan dan penggalian yang merata di tiap kelompok pulau. Industri pengolahan lebih dominan di daerah Flores dengan jumlah mencapai 64.800 usaha/perusahaan (53,26 persen). Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran paling banyak terdapat di daerah Flores yaitu mencapai 84.829 usaha/perusahaan dan daerah Timor dengan jumlah 78.894 usaha/perusahaan. Perbandingan data yang rinci dapat dilihat pada Tabel 17.5 dan Gambar 17.5.

Tabel 16.5
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Persentase Menurut Lapangan Usaha dan Kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Lapangan Usaha	Tirosa	Florata	Sumba	NTT
----------------	--------	---------	-------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	2.974	2.241	1.913	7.128
	41,72%	31,44%	26,84%	100,00%
C. Industri Pengolahan	36.967	64.800	19.909	121.676
	30,38%	53,26%	16,36%	100,00%
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.046	1.131	268	2.445
	42,78%	46,26%	10,96%	100,00%
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	707	291	65	1.063
	66,51%	27,38%	6,11%	100,00%
F. Konstruksi	4.454	3.272	942	8.668
	51,38%	37,75%	10,87%	100,00%
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	78.894	84.829	21.728	185.451
	42,54%	45,74%	11,72%	100,00%
H. Pengangkutan dan pergudangan	15.970	16.100	2.014	34.084
	46,85%	47,24%	5,91%	100,00%
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	12.087	10.126	2.420	24.633
	49,07%	41,11%	9,82%	100,00%
J. Informasi Dan Komunikasi	7.341	7.186	1.735	16.262
	45,14%	44,19%	10,67%	100,00%
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	1.195	1.176	245	2.616
	45,68%	44,95%	9,37%	100,00%
L. Real Estat	1.726	2.581	310	4.617
	37,38%	55,90%	6,71%	100,00%
M, N. Jasa Perusahaan	2985	2755	597	6.337
	47,10%	43,47%	9,42%	100,00%
P. Pendidikan	4.450	5.444	1.534	11.428
	38,94%	47,64%	13,42%	100,00%
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1.146	1.543	447	3.136
	36,54%	49,20%	14,25%	100,00%
R, S, U. Jasa Lainnya	3656	2753	468	6.877
	53,16%	40,03%	6,81%	100,00%
Jumlah	175.598	206.228	54.595	436.421

Gambar 16.5
 Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016



3. Kegiatan Lanjutan SE2016

SE2016 merupakan kegiatan yang berskala besar sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan yang dilakukan pada tahun 2016 merupakan tahap awal dari SE2016. Berdasarkan hasil pendaftaran tersebut diperoleh kerangka sampel usaha/ perusahaan berskala mikro dan kecil, serta direktori usaha/ perusahaan berskala menengah dan besar.

Pada tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan SE2016 lanjutan, berupa pendataan terhadap UMK dan UMB. Pencacahan terhadap UMK akan dilakukan secara sampel, sedangkan untuk UMB dilakukan secara lengkap kecuali kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) sesuai dengan direktori usaha/perusahaan berskala menengah dan besar. Pencacahan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai struktur ketenagakerjaan, struktur permodalan, struktur biaya dan produksi, prospek usaha dan lainnya.

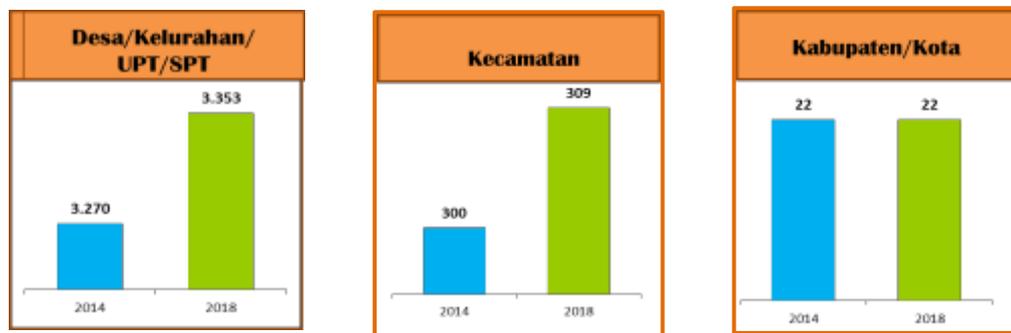
XVII. PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2018 PROVINSI NTT

1. Cakupan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/Kelurahan/Unit Permukiman

Transmigrasi (UPT)/ Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah administrasi pemerintahan yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) ada wilayah, 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, terdapat sebanyak 3.353 wilayah setingkat desa, 309 kecamatan, 22 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 3.048 desa dan 305 kelurahan. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Gambar 17.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota Hasil Podes, 2014 - 2018



2. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mencantumkan sebanyak 111 pulau kecil terluar. Menurut Podes 2018, di Nusa Tenggara Timur pulau kecil terluar tersebut berada di 5 Kabupaten/Kota, 28 Kecamatan, dan 294 Desa/Kelurahan. Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 17.1
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2018

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Di Pulau Kecil Terluar		
			Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Aceh	7	4	7	23
2	Sumatera Utara	3	3	3	8
3	Sumatera Barat	3	1	3	3
4	Riau	4	3	4	4
5	Bengkulu	2	1	2	7
6	Lampung	1	1	1	1
7	Kepulauan Riau	22	5	12	20
8	Jawa Barat	2	1	1	1
9	Jawa Tengah	1	1	2	2
10	Jawa Timur	3	2	3	3
11	Banten	3	1	2	2
12	Bali	1	1	1	14
13	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1
14	NTT	7	5	28	294
15	Kalimantan Timur	2	1	2	5
16	Kalimantan Utara	2	1	5	19
17	Sulawesi Utara	12	5	8	15
18	Sulawesi Tengah	3	1	3	3
19	Maluku	19	4	18	76
20	Maluku Utara	1	1	1	1
21	Papua Barat	3	2	2	2
22	Papua	9	4	6	30
	Indonesia	111	49	117	543

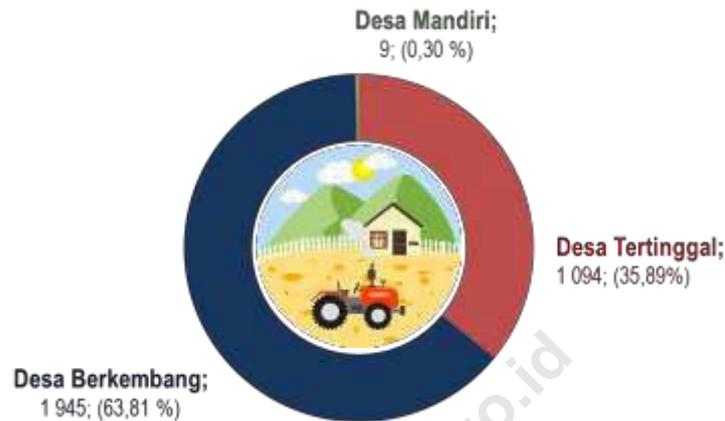
3. Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan,

membangun Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 5 dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

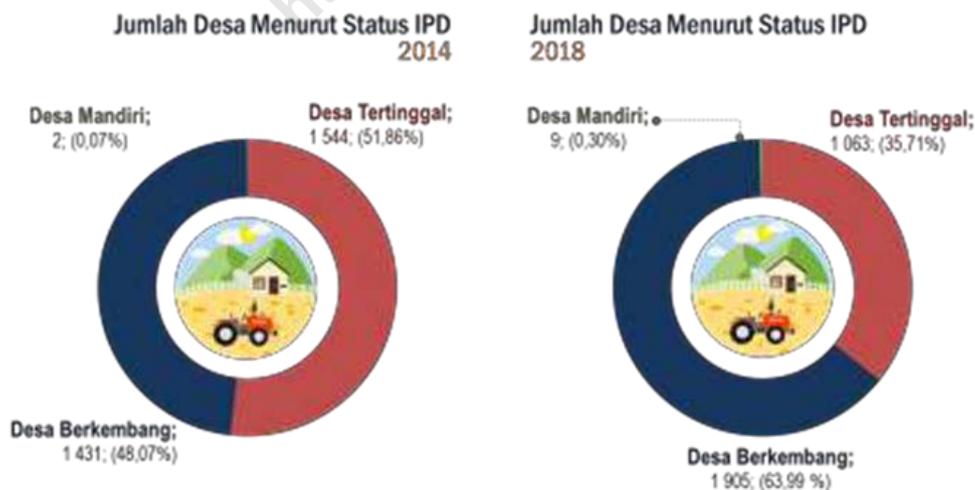
Desa-desanya berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam 3 (tiga) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Gambar 2 menyajikan jumlah desa menurut status IPD 2018.

Gambar 17.2
Jumlah Desa Menurut Status IPD, 2018



Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan IPD 2014, desa tertinggal menurun sebesar 16,15 persen, desa berkembang meningkat sebesar 15,92 persen, dan desa mandiri meningkat sebesar 0,23 persen. Gambar 3 menunjukkan perkembangan desa menurut status IPD.

Gambar 17.3
Perkembangan Desa Menurut Status IPD, 2018



3.1 Kemandirian Desa

Secara umum semua dimensi IPD mengalami kenaikan, dimensi yang paling tinggi kenaikannya adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan kenaikan sebesar 12,61 poin, kemudian menyusul Dimensi Pelayanan Umum yang meningkat sebesar 4,51 poin. Sedangkan dimensi yang paling rendah kenaikannya adalah Dimensi Transportasi (2,44 poin). Gambar 4 menunjukkan kenaikan masing-masing dimensi penyusun IPD.

Gambar 17.4
Tingkat Kenaikan IPD Menurut Dimensi Penyusunnya, 2014 – 2018



Setiap dimensi penyusun IPD dibentuk dari beberapa indikator. Kenaikan nilai setiap dimensi penyusun IPD yang telah disebutkan sebelumnya tidak lepas dari kenaikan nilai dari indikator-indikator penyusunnya. Pada tahun 2018, indikator yang mengalami perubahan nilai terbesar dibandingkan tahun 2014 menurut dimensi pembentuk IPD yaitu: kualitas SDM sekretaris desa pada Dimensi Pemerintahan Desa, tempat buang air besar sebagian besar keluarga pada Dimensi Kondisi Infrastruktur, waktu yang ditempuh per kilometer ke Kantor Camat pada Dimensi Transportasi, penanganan gizi buruk pada Dimensi Pelayanan Umum, serta ketersediaan dan akses ke SMA sederajat pada Dimensi Pelayanan Dasar.

4. Potensi Desa/Kelurahan

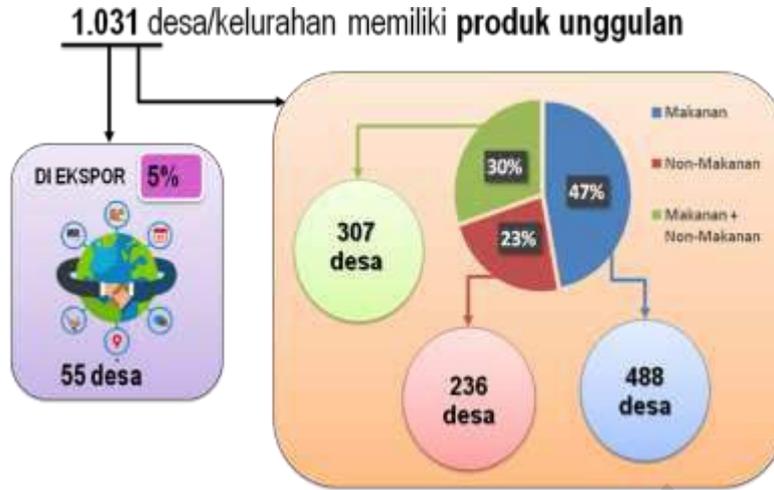
Selain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, Podes 2018 juga menyajikan berbagai informasi terkait potensi-potensi desa/kelurahan dan ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Indonesia. Pada bidang ekonomi, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan keberadaan Industri Kecil dan Mikro mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri dari Kain Tenun, yaitu sebesar 24 persen (menjadi 1.477 desa/kelurahan). Selain itu, terjadi peningkatan pula pada desa/kelurahan dengan keberadaan Industri dari kayu yaitu sebesar 27 persen (menjadi 1.588 desa/kelurahan).

Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan, seperti keberadaan koperasi, pasar, mini market, Restoran dan warung kelontong. Desa/kelurahan dengan keberadaan koperasi meningkat sebesar 46 persen dibanding tahun 2014 (menjadi 1.613 desa/kelurahan), selain itu Desa/kelurahan dengan keberadaan pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen, meningkat sebesar enam persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 482 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan mini market meningkat sebesar 23 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 111 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan toko/warung kelontong meningkat sebesar 13 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 2.931 desa/kelurahan.

Sementara itu, pada tahun 2018 telah ada 1.031 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan. Produk unggulan ini ada dua macam, yaitu produk makanan dan produk non- makanan. Ada sebanyak 488 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan makanan, sementara ada 236 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan non-makanan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan desa/kelurahan memiliki 2 macam produk unggulan tersebut, seperti yang terjadi pada 307 desa/kelurahan. Lebih jauh lagi, ternyata

ada 55 desa/kelurahan memiliki produk unggulan yang telah diekspor keluar negeri (lihat Gambar 18.5).

Gambar 17.5
Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Produk Unggulan 2018



Pada bidang kesehatan, sarana kesehatan mengalami peningkatannya itu pada keberadaan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan Posyandu. Desa/kelurahan dengan keberadaan Rumah Sakit meningkat sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 48 desa/ kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan Puskesmas meningkat sebesar 8 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 414 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan Posyandu dengan penyelenggaraan kegiatan sebulan sekali meningkat sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 3.334 desa/kelurahan.

Selanjutnya, pada bidang perumahan dan lingkungan hidup, ada beberapa peningkatan di beberapa hal, contohnya pada penggunaan sumber air minum, dan jamban. Pertama, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 3.111 desa/kelurahan. Kedua, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 12 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 3.185 desa/kelurahan.

Kemudian, pada bidang pendidikan diketahui bahwa 3.207 desa/kelurahan telah mempunyai SD/MI. Hal ini berarti bahwa desa dengan keberadaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meningkat sebesar 2 persen. Sementara itu, dari segi pendidikan kepala desa/lurah yang berpendidikan minimal SMU/ sederajat menunjukkan kenaikan sebesar 11 persen bila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 3.168 desa/kelurahan.

Terakhir, pada bidang komunikasi dan informasi, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan keberadaan pelayanan dari Pos Indonesia (baik itu berupa Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos, atau Pos Keliling) meningkat sebesar 56 persen dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu menjadi 348 desa/kelurahan. Selain itu, pada tahun 2018, ternyata desa/kelurahan dengan keberadaan jasa ekspedisi ada sebesar 49 persen atau sebanyak 117 desa/kelurahan. Sementara itu, desa/kelurahan dengan keberadaan jangkauan sinyal telepon sudah mencapai 3.156 desa/kelurahan, sedangkan yang sudah terjangkau sinyal internet ada sebanyak 2.563 desa/kelurahan.

5. Tantangan Desa/Kelurahan

- Bencana masih menjadi masalah yang menjadi perhatian di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tiga kejadian bencana terbesar secara berturut-turut adalah kekeringan, angin puyuh/puting beliung dan tanah longsor masing-masing sebesar 1.042 desa/kelurahan, 840 desa/kelurahan dan 637 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang mengalami kejadian bencana lainnya antara lain bencana banjir sebanyak 532 desa/kelurahan, kebakaran hutan sebanyak 264 desa/kelurahan, gempa bumi sebanyak 255 desa/kelurahan, gelombang pasang laut sebanyak 143 desa/kelurahan, banjir bandang sebanyak 42 desa/kelurahan dan gunung meletus sebanyak 6 desa/kelurahan.
- SDGs goal 13 target 3 adalah meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut, jumlah desa dengan upaya mitigasi bencana alam antara lain terdapat 306 desa/kelurahan yang ada sistem peringatan dini bencana alam, jalur evakuasi sebanyak 360 desa/kelurahan, perlengkapan keselamatan sebanyak 35 desa/kelurahan, serta peringatan dini tsunami sebanyak 28 desa/kelurahan.
- Permasalahan desa/kelurahan lainnya adalah terkait pencemaran. Desa yang mengalami pencemaran air meningkat 57 persen dibanding tahun 2014, yaitu menjadi 122 desa/kelurahan di tahun 2018. Selain itu, pencemaran tanah dan udara juga mengalami peningkatan sebesar 53 persen dan 39 persen. Untuk pencemaran tanah menjadi 30 desa/kelurahan sedangkan pencemaran udara menjadi 147 desa/kelurahan.
- Terkait keamanan, yang masih menjadi tantangan antara lain yaitu berkaitan dengan tindak kejahatan dan perkelahian massal. Desa/kelurahan dengan kejadian tindak kejahatan naik sebesar 9 persen, dari 1.039 di tahun 2014 naik menjadi 1.148 desa/kelurahan di tahun 2018. Begitu pula dengan desa/kelurahan dengan kejadian perkelahian massal naik 15 persen dibanding tahun 2014 yaitu 174 desa/kelurahan naik menjadi 205 desa/kelurahan di tahun 2018.

Tabel 17.2
Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten, 2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Kecamatan <i>District</i>	Desa/Kelurahan <i>Village/Sub-District</i>
Sumba Barat	6	74
Sumba Timur	22	156

Kupang	24	177
Timor Tengah Selatan	32	278
Timor Tengah Utara	24	193
Belu	12	81
Alor	17	175
Lembata	9	151
Flores Timur	19	250
Sikka	21	160
Ende	21	278
Ngada	12	151
Manggarai	12	171
Rote Ndao	10	119
Manggarai Barat	12	169
Sumba Tengah	5	65
Sumba Barat Daya	11	175
Nagekeo	7	113
Manggarai Timur	9	176
Sabu Raijua	6	63
Malaka	12	127
Kupang	6	51
NUSA TENGGARA TIMUR	309	3 353

Tabel 17.3
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa
Menurut Kabupaten/Kota, 2018

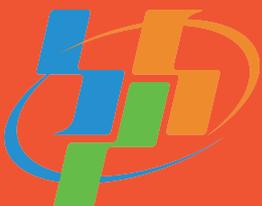
Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Sub-District</i>	UPT/SPT <i>Transmigration Settlement Unit/</i> <i>Total Entity of Transmigration</i> <i>Settlement</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumba Barat	63	11	-	74

Sumba Timur	140	16	-	1
Kupang	160	17	-	1
Timor Tengah Selatan	266	12	-	2
Timor Tengah Utara	182	11	-	1
Belu	69	12	-	81
Alor	158	17	-	1
Lembata	144	7	-	1
Flores Timur	229	21	-	2
Sikka	147	13	-	1
Ende	255	23	-	2
Ngada	135	16	-	1
Manggarai	145	26	-	1
Rote Ndao	112	7	-	1
Manggarai Barat	164	5	-	1
Sumba Tengah	65	-	-	65
Sumba Barat Daya	173	2	-	1
Nagekeo	97	16	-	1
Manggarai Timur	159	17	-	1
Sabu Raijua	58	5	-	63
Malaka	127	-	-	1
Kupang	-	51	-	51
NUSA TENGGARA TIMUR	3 048	305	-	3

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289, 821755
Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps.go.id, bps5300@bps.go.id



2528-0910